



RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah

KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025





BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR : 16 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan";

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang_Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang_Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2025-2029

20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025
21. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 74 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 24);
22. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 185 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 124);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 – 2029;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009-2029;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021 Kabupaten Buru Selatan Nomor 4);

27. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buru Selatan (Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 Kabupaten Buru Selatan Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Buru Selatan;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Buru Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan;
5. Perencanaan, adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
6. Pembangunan Nasional, adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara;
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas

pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;

8. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan periode 20 (dua puluh) tahun;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 satu tahun;
12. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-OPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun;
13. Visi, adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
14. Misi, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
16. Kebijakan, adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
17. Program, adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran;

18. Kegiatan, adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM, adalah tolak ukur kinerja daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat;
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang, adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
21. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output), dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
23. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program, sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
24. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (Impact).
25. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

26. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum dan sesudah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
27. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024.

BAB II

POKOK-POKOK PENYUSUNAN

Pasal 2

Ruang Lingkup RKPD adalah:

- (1) RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Buru Selatan dalam periode 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026, yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.

Sistematika RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada pasal (1) ayat (5) terdiri dari :

- Bab 1. Pendahuluan;
- Bab 2. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- Bab 3. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
- Bab 4. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- Bab 5. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- Bab 6. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Bab 7. Penutup

Uraian Bab I sampai Bab VII sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menjadi:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat ikut serta partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan tahun 2025; dan
- b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam menyusun KUA PPAS serta RAPBD Tahun 2025.

BAB III

PENYESUAIAN RKPD

Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun 2025 dengan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025.

Pasal 5

Dalam hal RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berbeda dari hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menggunakan RKPD Tahun 2025 hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di : Namrole

Pada tanggal : 09 Agustus 2024

 **BUPATI BURU SELATAN,**
Hj. SAFITRI MALIK SOULISA, S.IP, M.Si

Diundangkan di : Namrole

Pada tanggal : 12 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH BURU SELATAN

DIS. RUSLAN MAKATITA, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 16 TAHUN 2024

DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR DIAGRAM	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	I
1.1. LATAR BELAKANG	I-1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-4
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-6
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	I-8
1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD	I-8
BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II-1
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-17
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM	II-26
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH	II-45
2.5. EVALUASI RKPD KABUPATEN BURU SELATAN.....	II-51
2.6. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	II-53
2.7. REALISASI DAN TARGET PENERAPAN SPM	II-59
BAB. III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	III-1
3.2. ARAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-17
BAB. IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2025	IV-13
4.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025	IV-18
4.4. PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	IV-40
BAB. V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V
5.1. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025	V-1
5.2. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2025	V-2
5.3. RENCANA PENDANAAN DAN TARGET KINERJA PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) ...	V-5
5.4. RENCANA ALTERNATIF PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	V-7
BAB. VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI
6.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	VI-1
6.2. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KUNCI KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025	VI-5
BAB. VII PENUTUP	VII
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1 Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Buru Selatan Menurut Kecamatan Tahun 2023	II-3
Tabel 2.2 Peta Akuifer Hidrologi Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023	II-4
Tabel 2.3 Data Klimatologi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023 Berdasarkan Pengamatan di Stasiun Pengamat Kabupaten Buru	II-7
Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023	II-7
Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023	II-8
Tabel 2.6 Kepadatan dan Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023	II-8
Tabel 2.7 Hierarki Sistem Pusat – Pusat Permukiman Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023	II-15
Tabel 2.8 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buru Selatan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2021 - 2023	II-18
Tabel 2.9 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019 - 2023	II-20
Tabel 2.10 PDRB Kabupaten Buru Selatan atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Jenis Pengeluaran (Juta rupiah), 2021-2023	II-21
Tabel 2.11 PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021 – 2023 Nilai PDRB (JutaRupiah)	II-22
Tabel 2.12 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buru Selatan Berdasarkan Komponen IPM Tahun 2019-2023	II-26
Tabel 2.13 Capaian Kinerja Indikator Bidang Pendidikan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023	II-27
Tabel 2.14 Capaian Indikator Kesehatan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021 - 2023	II-28
Tabel 2.15 Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023	II-29
Tabel 2.16 Jumlah Kematian Ibu Maternal dan Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023	II-29
Tabel 2.17 Jumlah Persentase KB Aktif di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023	II-30
Tabel 2.18 Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih Tahun 2021-2023	II-30
Tabel 2.19 Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Sanitasi Tahun 2021-2023	II-30
Tabel 2.20 Kondisi Jaringan Jalan Kewenangan Kabupaten di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023	II-31
Tabel 2.21 Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2023	II-31
Tabel 2.22 Capaian Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2023	II-31
Tabel 2.23 Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023	II-32
Tabel 2.24 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2021-2023	II-33
Tabel 2.25 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2023	II-33

Tabel 2.26	Rasio Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023	II-33
Tabel 2.27	Tersusunnya RPPLH, Terintegrasinya RPPLH dan Terselenggaranya KLHS Tahun 2021-2023	II-34
Tabel 2.28	Pemberian Penghargaan dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2021-2023..	II-34
Tabel 2.29	Cakupan Area Pelayanan Tahun 2021-2023	II-34
Tabel 2.30	Timbulan Sampah, Jumlah sampah dan TPA/TPST/SPA Tahun 2021 - 2023	II-34
Tabel 2.31	Rasio Penduduk ber-KTP Tahun 2021-2023	II-35
Tabel 2.32	Rasio Bayi berakte Kelahiran Tahun 2021-2023	II-35
Tabel 2.33	Rasio Pasangan Berakte Nikah Tahun 2021-2023	II-35
Tabel 2.34	Database Skala Kabupaten Tahun 2021-2023	II-36
Tabel 2.35	KTP Nasional berbasis NIK Tahun 2021-2023	II-36
Tabel 2.36	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021-2022.....	II-37
Tabel 2.37	Indikator Kinerja Daerah Perhubungan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023	II-37
Tabel 2.38	Aksesibilitas Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023	II-38
Tabel 2.39	Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023	II-38
Tabel 2.40	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023	II-38
Tabel 2.41	Perkembangan Jumlah Lalu Lintas Penumpang Pesawat Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022	II-38
Tabel 2.42	Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023	II-39
Tabel 2.43	Persentase penduduk Kabupatenn Buru Selatan yang Menggunakan Handphone/Telepon Genggam Tahun 2021-2023	II-39
Tabel 2.44	Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023	II-40
Tabel 2.45	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021 - 2023	II-40
Tabel 2.46	Presentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2021-2023	II-40
Tabel 2.47	Capaian Indikator Kinerja Bidang Koperasi dan UKM Tahun 2021-2023.....	II-40
Tabel 2.48	Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023	II-41
Tabel 2.49	Organisasi Pemuda Aktif dan Wirausaha Muda di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023	II-41
Tabel 2.50	Persentase Bidang Olahraga Tahun 2021-2023	II-42
Tabel 2.51	Capaian Indikator Bidang Urusan Perpustakaan Tahun 2021-2023	II-42
Tabel 2.52	Capaian Indikator Bidang Urusan Kearsipan Tahun 2021-2023	II-42
Tabel 2.53	Produksi Perikanan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023	II-43
Tabel 2.54	Nilai Tukar Nelayan dan Jumlah Konsumsi Ikan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023	II-43
Tabel 2.55	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021 - 2023	II-43
Tabel 2.56	Capaian Indikator Bidang Pertanian Tahun 2021-2023	II-44
Tabel 2.57	Capaian Urusan Kebudayaan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023	II-44
Tabel 2.58	Target Capaian Urusan Pariwisata	II-45
Tabel 2.59	Capaian Indikator Bidang Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021-2023	II-45

Tabel 2.60	Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023	II-46
Tabel 2.61	Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023	II-46
Tabel 2.62	Daya Terpasang dan Distribusi Listrik di Kab. Buru Selatan Tahun 2023	II-47
Tabel 2.63	Capaian Indikator Fasilitas Hotel dan Restoran di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022-2023	II-47
Tabel 2.64	Capaian Indikator Fasilitas Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022	II-48
Tabel 2.65	Jenis-jenis Perizinan dan Lama Proses Pembuatan di Kabupaten Buru Selatan tahun 2021-2022	II-48
Tabel 2.66	Angka Kriminalitas Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023	II-50
Tabel 2.67	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2023	II-50
Tabel 2.68	Evaluasi RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2023	II-50
Tabel 2.69	Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Buru Selatan	II-59
Tabel 2.70	Realisasi SPM 2024 dan Target SPM 2025	II-53
Tabel 3.1	Kondisi dan Target Indikator Makro Ekonomi Nasional	III-5
Tabel 3.2	Kondisi dan Target Indikator Makro Provinsi Maluku	III-9
Tabel 3.3	Capaian Perkembangan Ekonomi Tahun 2023 dan Target Tahun 2024 serta Proyeksi tahun 2025 di Kabupaten Buru Selatan	III-16
Tabel 3.4	Sandingan Target Indikator Ekonomi Makro Nasional, Provinsi Maluku dan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025	III-17
Tabel 3.5	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023, Target Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025	III-20
Tabel 3.6	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023, Target Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025	III-22
Tabel 3.7	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023, Target Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025	III-24
Tabel 4.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026	IV-7
Tabel 4.2	Tabel Keterkaitan Strategi, Arah Kebijakan dan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025	IV-16
Tabel 4.3	Program dan Kegiatan Penunjang Prioritas Pembangunan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025	IV-29
Tabel 4.4	Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025	IV-40
Tabel 5.1	Rancangan Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025	V-1
Tabel 5.2	Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan per masing-masing Urusan Pemerintahan pada RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025	V-3
Tabel 5.3	Tabel 5.3. Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025.....	V-5
Tabel 5.4	Rencana Program/Kegiatan yang Bersumber dari APBN/APBD I Tahun 2025.....	V-7
Tabel 6.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Buru Selatan Tahun Target 2025	VI-1
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Kunci Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026	VI-5

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I-7
Gambar 1.2 Gambar 1.2. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Spasial dan A-Spasial	I-7
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administratif Kabupaten Buru Selatan	II-1
Gambar 2.2 Peta Tol Laut dan ALKI III Kabupaten Buru Selatan	II-2
Gambar 2.3 Peta Wilayah Pengembangan Kabupaten Buru Selatan	II-9
Gambar 2.4 Peta Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Selatan ...	II-12
Gambar 4.1 Visi Indonesia 2045	IV-14

DAFTAR DIAGRAM

	Hal.
Diagram 2.1	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023 II-8
Diagram 2.2	Perkembangan PDRB Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023 II-17
Diagram 2.3	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019 - 2023 II-23
Diagram 2.4	Tingkat TPAK dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019-2023 II-24
Diagram 2.5	Rata-Rata IPM Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku Tahun 2023 II-25
Diagram 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Maluku Tahun 2019-2023 III-6
Diagram 3.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional dan Provinsi Maluku Tahun 2019-2023 III-7
Diagram 3.3	Tingkat Kemiskinan Nasional dan Provinsi Maluku Tahun 2019-2023 III-7
Diagram 3.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional dan Provinsi Maluku Tahun 2019-2023 III-8
Diagram 3.5	Indeks Gini Nasional dan Provinsi Maluku Tahun 2019-2023 III-9
Diagram 3.6	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019-2013 III-13
Diagram 3.7	Perbandingan TPT Kabupaten Buru Selatan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Maluku Tahun 2023 III-14
Diagram 3.8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019-2023 III-14

DAFTAR GRAFIK

	Hal.
Grafik 2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2019-2023	II-19
Grafik 2.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019-2023	II-19
Grafik 2.3 Perkembangan Garis Kemiskinan Kab. Buru Selatan Tahun 2019-2023 ..	II-23
Grafik 2.4 Laju Inflasi Kabupaten Buru Tahun 2019-2023	II-24
Grafik 2.5 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2019-2023	II-26
Grafik 3.1 Perkembangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019-2023	III-12
Grafik 3.2 Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019-2023	III-12
Grafik 3.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019-2023	III-13
Grafik 3.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020-2023	III-15

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah tersebut untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan yaitu berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, program-program dan kegiatan pembangunan yang terukur disertai pagu indikatif dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen RKPD juga merupakan dokumen publik, sehingga keterlibatan semua stakeholders terkait dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi pengarusutamaan dalam proses penyusunan dokumen ini. Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen RKPD dapat diakses oleh semua stakeholders, baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka perhatian yang besar harus diberikan sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, dengan fungsi mencakup sebagai berikut :

1. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah
3. Arahan penyusunan RENJA dan RKA OPD
4. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD
5. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah

6. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah
7. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target standarpelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan OPD
8. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat
9. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

1.1.1. Proses Penyusunan

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 dilaksanakan melalui tahapan yang sudah diatur dalam Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan RKPD;
Tahap pertama yang dilakukan adalah tahap persiapan penyusunan yang meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
Penyusunan RKPD diawali dengan perumusan rancangan awal RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD untuk menyusun rancangan awal Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan top-down/bottom-up, teknokratis dan partisipatif maupun politis, termasuk mengakomodir proses telaahan pokok-pokok pikiran DPRD.
3. Penyusunan Rancangan RKPD;
Penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja OPD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
Musrenbang RKPD dilaksanakan dengan tujuan membahas rancangan RKPD yang meliputi : (1) menyepakati permasalahan pembangunan daerah; (2) menyepakati prioritas pembangunan daerah; (3) menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi; (4) penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; (5) klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah dengan

program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan.

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan

Rancangan akhir RKPD merupakan hasil penyelarasan Rancangan RKPD dengan memperhatikan hasil musrenbang RKPD Kabupaten Buru Selatan, Rancangan RKPD Provinsi Maluku dan Rancangan RKP pada saat Musrenbang Nasional.

6. Penetapan RKPD.

Penetapan RKPD adalah tahap akhir yang dilakukan setelah pembahasan/fasilitasi rancangan peraturan kepala daerah tentang RKPD dibahas di provinsi. Penetapan RKPD paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan RKPD Provinsi.

1.1.2. Prinsip dan Pendekatan Penyusunan

Untuk memastikan bahwa output dari hasil penyusunan berkualitas, taat regulasi dan operasional, maka prinsip dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Buru Selatan tahun 2025 melibatkan beberapa hal yaitu, **Keterkaitan, Konsistensi, Kelengkapan dan Kedalaman, Keterukuran dan Inovasi Kebijakan**. Dalam aspek yang lain penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan proses penyusunan yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom up/top down serta politik. Detail konfigurasi pendekatan proses penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 adalah **Bottom-Up** merupakan Usulan dari Musrenbang Desa dan Kecamatan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan tahun 2025 dan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan tahun 2025, **Top-Down** merupakan sinkronisasi prioritas daerah dalam RKPD Kabupaten Buru Selatan tahun 2025 dan prioritas Nasional dalam RKP 2025 dan sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025, RKPD Provinsi Maluku Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025. **Teknokratik** merupakan pelaksanaan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 serta kapasitas perencana daerah dalam penyiapan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025. **Partisipatif** merupakan pelaksanaan yang melibatkan pemangku kepentingan dan **Politik** merupakan pelaksanaan dengan menerjemahkan visi dan misi Kabupaten Buru Selatan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang dibahas bersama dengan DPRD, pertimbangan dan pendapat DPRD Kabupaten Buru Selatan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 serta konsultasi publik dalam penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025.

Sedangkan dalam pendekatan substansi, RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 memperhatikan pendekatan **Holistik-Tematik** yaitu dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan **Integratif** yaitu menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah dan pendekatan **Spasial** merupakan pelaksanaan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
3. Undang-Undang RI Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Maluku;
 21. Peraturan Gubernur No 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi maluku Tahun 2025-2026;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 – 2029;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009-2029;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026;

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

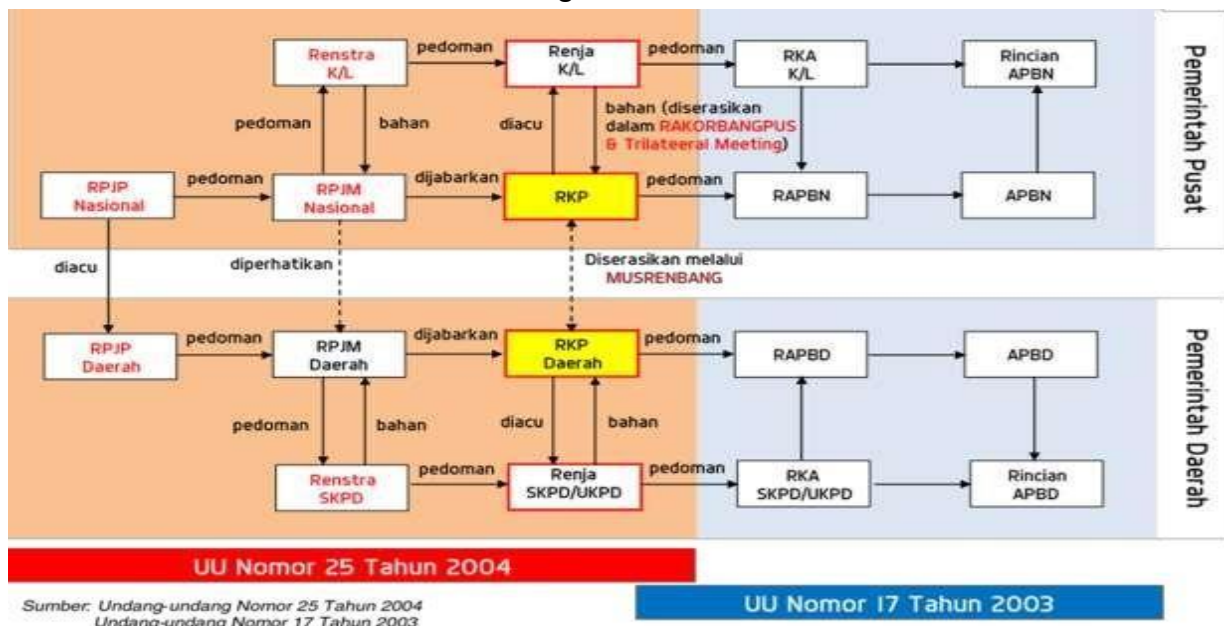
Sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi.

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.1. Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran RPJMD yang berpedoman pada RPJPD. RKPD tersebut menjadi pedoman bagi OPD dalam menyusun Renja OPD, dimana Renja OPD akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungannya dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RKPD diselaraskan dengan RKP melalui forum Musrenbang Nasional. Selanjutnya RKPD menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2025. Dengan demikian, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dengan dokumen lainnya dan menjadi bagian dalam proses penyusunan APBD Tahun 2025.

Dari segi kerangka waktu, penyusunan dokumen RKPD harus diselesaikan pada setiap bulan Mei, sedangkan dokumen APBD harus sudah disahkan paling lambat tanggal 1 Desember. Substansi RKPD memuat program dan kegiatan OPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Renja OPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD

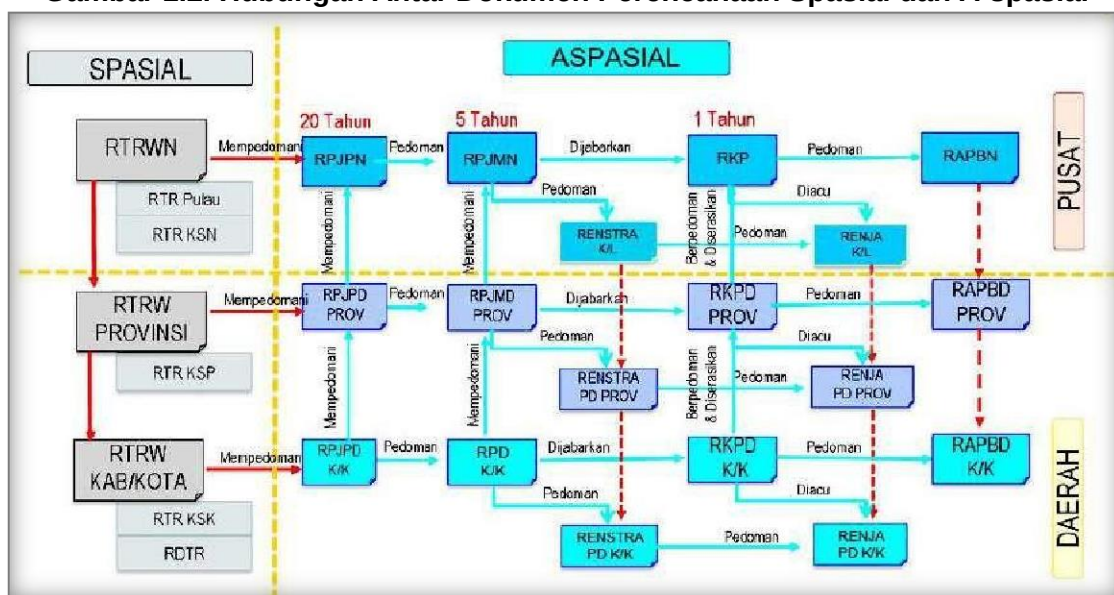
dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja OPD (Renja OPD).

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Disamping dokumen-dokumen perencanaan sebagaimana tersebut diatas yang bersifat aspasial perlu disinkronisasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial yaitu dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) serta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis. Dimana dokumen-dokumen spasial tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD, RPJMD maupun RPD yang merupakan dokumen acuan dalam penyusunan RKPD sebagaimana dijabarkan dalam gambar 1.2.

Gambar 1.2. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Spasial dan A-spasial



1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen RKPD Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah Tahun 2025. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. Menciptakan kepastian kebijakan dan kepatutan perencanaan karena merupakan komitmen pembangunan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan;
3. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintah dalam rangka pencapaian target perjanjian kinerja (perkin) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025;
4. Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar OPD, dan antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Pusat;
5. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan kondusif, dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
6. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
7. Merupakan acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RENJA) OPD Tahun 2025;
8. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta APBD tahun 2025;

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPD, Renstra OPD, Renja OPD serta tindaklanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya yang relevan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Berisi uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Menjelaskan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografis dan Demografi

Menjelaskan secara umum kondisi daerah dari aspek geografis yang mencakup pendekatan keruangan, kelingkungan dan kompleks kewilayahan serta aspek demografi yang mencakup keadaan dan komposisi penduduk di Kabupaten Buru Selatan.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan tentang kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buru Selatan yang difokuskan pada pemerataan ekonomi dan pemerataan sosial.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan tentang segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah

Menjelaskan dan melakukan identifikasi permasalahan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan arah kebijakan Nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan kebijakan ekonomi daerah Tahun 2025 dalam RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2025 serta pendanaan pembangunan lainnya.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan hubungan visi dan misi dan tujuan, strategi, arah kebijakan pembangunan, dan indikator pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2001-2026.

4.2. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi Maluku Tahun 2025

Menjelaskan Isu Global dan Isu Nasional, Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2025.

4.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025

Menjelaskan isu strategis, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas yang bersumber dari program pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021–2026 pada tahun berkenaan.

4.4. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Menjelaskan tentang hasil penelaahan pokok pokok pikiran DPRD yang disusun dengan berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunannya memperhatikan saran dan pendapat DPRD berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2025

Menjelaskan rancangan kerangka pendanaan dan pagu indikatif Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025.

5.2. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Tahun 2025

Menjelaskan tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 dengan mempertimbangkan RPJMN dan RPJMD Provinsi Maluku serta RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026 untuk mendukung pembangunan secara menyeluruh.

5.3. Rencana Pendanaan dan Target Kinerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Menjelaskan tentang rencana pendanaan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025.

5.4. Rencana Alternatif Pendanaan Pembangunan Tahun 2025

Menjelaskan tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dari APBN tahun 2025 yang merupakan rencana alternatif pendanaan pembangunan tahun 2025.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Menjelaskan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang akan menjadi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun perencanaan.

6.2. Penetapan Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025

Menjelaskan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang akan menjadi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

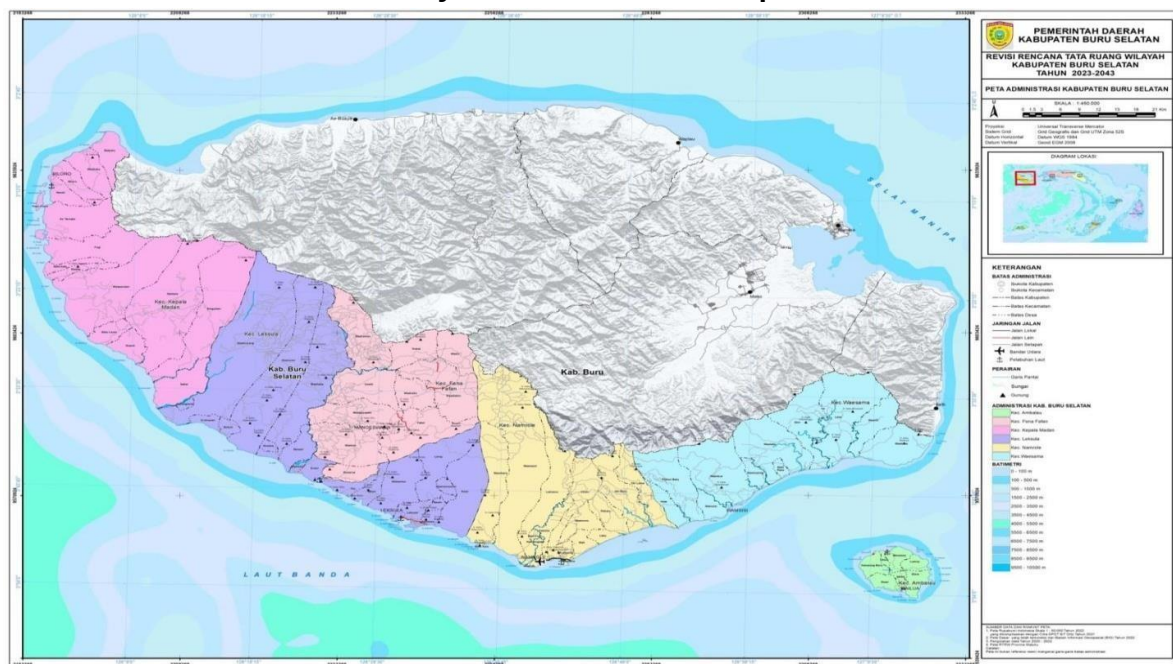
Gambaran umum kondisi daerah sangat penting sebagai dasar dalam pengembangan suatu wilayah. Aspek geografi dan demografi merupakan dasar utama dalam melakukan perencanaan pembangunan yaitu adanya identifikasi potensi awal suatu wilayah, untuk mengetahui aspek geografi dan demografi dalam menyusun perencanaan untuk mencapai hasil pembangunan yang maksimal pada suatu wilayah.

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Aspek Geografi

Secara Astronomis, Kabupaten Buru Selatan terletak antara 2°30' Lintang Selatan dan 5°50' Lintang Selatan dan antara 125°00' Bujur Timur dan 127°00' Bujur Timur (Gambar 2.1) dan terletak di jalur utama lalu lintas Laut (Tol Laut) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia III (ALKI III). seperti terlihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Peta Wilayah Administratif Kabupaten Buru Selatan

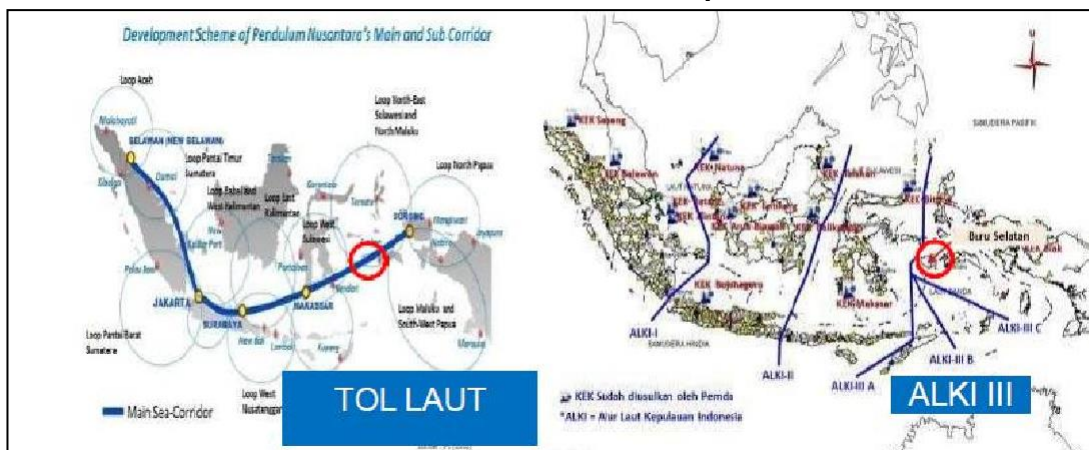


Sumber : Laporan Akhir RTRW Kab. Buru Selatan, 2023-2043

Secara geografis Kabupaten Buru Selatan di sebelah Utara dibatasi oleh Laut Seram, Laut Bandadi sebelah Selatan dan Barat, serta Selat Manipa dan Kabupaten Buru di sebelah Timur.

Kabupaten Buru Selatan memiliki luas sekitar 3.780,56 km² dan wilayahnya meliputi sebagian dari Pulau Buru dan pulau-pulau lain di sekitarnya, baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni. Kondisi Geostrategis dan Geopolitik Kabupaten Buru Selatan dalam peran strategisnya secara Nasional dan Internasional berada pada posisi strategis jalur lintas alur kepulauan Indonesia ALKI III. UNCLOS 1982 ratifikasi Undang-undang 17 tahun 1985 memberikan penguatan peran terhadap posisi jalur ALKI III dimana Kabupaten Buru Selatan berada pada alur lintas kapal Internasional yang bila dikembangkan akan dapat memanfaatkan peluang ini sebagai potensi ekonomi yang akan mendorong pertumbuhan kawasan di Indonesia timur. Untuk mendorong aktifitas arus barang dari pusat produksi di Kabupaten Buru Selatan jalur transportasi Nasional yang dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan dan sistem tata transportasi wilayah yang mengkoneksikan wilayah Buru Selatan dengan pasar di wilayah Sulawesi dan Jawa telah dikembangkan tol laut sebagai stabilisator harga untuk memberikan nilai ekonomi terhadap setiap kebutuhan konsumsi dan hasil produksi masyarakat yang dijual ke pasar. Jalur laut ALKI III dan tol laut dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar. 2.2. Peta Tol Laut dan ALKI III Kabupaten Buru Selatan



Sumber: Dok. Rencana Pengembangan KEK Buru Selatan

2.1.1.1. Luas dan batas wilayah administrasi

Kabupaten Buru Selatan merupakan salah satu wilayah yang strategis di Provinsi Maluku. Luas wilayah Kabupaten Buru Selatan 3.780,56 Km² terbagi menjadi 6 wilayah administrasi kecamatan. Secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Adapun batas Wilayah Administrasi Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Seram
- Sebelah Timur : Kabupaten Buru dan Selat Manipa
- Sebelah Selatan : Laut Banda
- Sebelah Barat : Laut Banda

**Tabel 2.1. Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Buru Selatan
Menurut Kecamatan Tahun 2023**

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Km ²)	Desa
1.	Leksula	Leksula	1.419,29	19
2.	Kepala Madan	Biloro	953,36	16
3.	Waesama	Wamsisi	540,93	11
4.	Namrole	Elfule	243,57	17
5.	Ambalau	Siwar	228,63	7
6.	Fena Fafan	Waekatin	394,78	11
Total			3.780,56	81

Sumber : Bagian Pemerintahan (Setda) Buru Selatan, 2024, Permendagri Nomor 72 Tahun 2019

2.1.1.2. Topografi dan Jenis Tanah

Secara fisiografi (makro relief), bentuk wilayah Kabupaten Buru Selatan dikelompokkan berdasarkan dataran, pantai dan perbukitan termasuk dataran tinggi (plateau/pedmont) dengan bentuk kelerengan variatif. Kabupaten Buru Selatan didominasi oleh kawasan pegunungan dengan elevasi rendah berlereng agak curam dengan kemiringan lereng kurang dari 40 % yang meliputi luas 15,43 % dari keseluruhan luas wilayah daerah ini. Jenis kelerengan lain yang mendominasi adalah elevasi rendah berlereng bergelombang serta agak curam dan elevasi sedang berlereng bergelombang dan agak curam dengan penyebaran lereng di bagian utara dan barat rata-rata berlereng curam. Sedangkan di bagian timur terutama di sekitar Sungai Waeapo merupakan daerah elevasi rendah dengan jenis lereng landai sampai agak curam.

Sedangkan secara geomorfologis, bentang alam di Kabupaten Buru Selatan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu ; bentang alam asal vulkanik yang dicirikan dengan adanya topografi bergunung-gunung dan lereng terjal, bentang alam asal denudasional yang membentuk rangkaian pegunungan dan perbukitan berbentuk kubah, bentang alam asal solusial dan bentang alam asal fluvial yang cenderung membentuk topografi datar pada lembah-lembah sungai. Sebagian besar tanah di Kabupaten Buru Selatan adalah jenis tanah kompleks, dimana persebaran jenis tanah ini meliputi ; alluvial, podsolik merah kuning, organosol, grumasol dan tanah-tanah kompleks.

2.1.1.3. Geomorfologi dan Hidrogeologi

Kondisi Geomorfologi Kabupaten Buru Selatan dan pulau-pulau kecil lainnya yang termasuk ke dalam Kabupaten Buru Selatan dikontrol oleh geologi regional Provinsi Maluku, dimana wilayah ini merupakan ujung Barat Busur Kepulauan Non Magmatik dari Lingkaran Sirkam Pasifik. Oleh karena itu Kepulauan Buru Selatan dapat di kelompokkan kedalam beberapa satuan Geomorfologi seperti berikut :

- 1) Satuan geomorfologi perbukitan/pegunungan lipatan patahan yang menempati wilayah bagian tengah Kabupaten Buru Selatan;

- 2) Satuan geomorfologi punggung homoklin yang meliputi wilayah bagian Utara dan Selatan Kepulauan Buru Selatan;
- 3) Satuan geomorfologi lembah dan bantaran sungai yang mengikuti lembah sungai-sungai besar juga menjadi wilayah permukiman.

Kondisi hidrogeologi Kabupaten Buru Selatan termasuk pulau-pulau kecil lainnya adalah sebagai berikut :

a) Aliran Sungai

Berdasarkan geo hidrologi dari masing-masing Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan memiliki klasifikasi rendah, sedang dan tinggi. Sebagian besar wilayah Kabupaten Buru Selatan memiliki klasifikasi rendah dan sedang. Lebih jelasnya mengenai kondisi geohidrologi Kabupaten Buru Selatan dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 2.2. Peta Akuifer Hidrologi Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023

Daerah Aliran Sungai	Kecamatan					
	Ambalau	Fena Fafan	Kepala Madan	Leksula	Namrole	Waesama
Ambalau	7.017	-	-	-	-	-
Batutulis	-	-	-	768	480	-
Wae Ana	-	-	-	-	-	7.470
Wae Apu	-	-	-	-	6.609	-
Wae Batutulis	-	-	-	1.217	-	-
Wae Bebek	-	-	1.547	2.077	-	-
Wae Biloro	-	-	1.917	-	-	-
Wae Bobo	-	-	-	1.824	-	-
Wae Dalan	-	-	19.453	34.114	-	-
Wae Enbotit	-	-	-	2.468	-	-
Wae Fila	-	-	1.574	-	-	-
Wae Flao	-	-	1.547	-	-	-
Wae Fogi	-	-	7.242	-	-	-
Wae Ha	-	-	-	715	-	-
Wae Hani	-	-	-	-	-	1
Wae Hotong	-	-	3.899	-	-	-
Wae Hunga	-	-	10.303	-	-	-
Wae Jolun	-	-	-	-	742	10.308
Wae Kafiri	-	-	-	3.873	-	-
Wae Kaku	-	-	-	1.734	-	-
Wae Kakun	-	-	1.276	-	-	-
Wae Kasi	-	-	-	891	-	-
Wae Kolo	-	-	-	-	3.733	-
Wae Lala	-	-	-	-	25	5.576
Wae Lata	-	-	-	-	-	20.628
Wae Leko	-	-	1.826	-	-	-
Wae Leksula	-	-	-	2.332	-	-
Wae Limen	-	-	999	-	-	-

Wae Lum	-	-	-	-	-	2.675
Wae Mahu	-	-	3.397	-	-	-
Wae Mala	-	54.497	-	19.353	3.231	-
Wae Masi	-	-	4.740	-	-	-
Wae Mefa	-	-	-	2.383	-	-
Wae Meta	-	258	-	986	-	-
Wae Minaha	-	-	4.258	-	-	-
Wae Moda	-	-	1.434	-	-	-
Wae Moit	-	-	6.087	-	-	-
Wae Mulan	-	-	-	2.221	-	-
Wae Nala	-	-	-	-	-	5.827
Wae Oki	-	-	-	-	9.398	113
Wae Pede	-	2.083	-	12.412	31.769	-
Wae Sam	-	-	-	-	-	1.357
Wae Sameno	-	-	700	-	-	-
Wae Sibpot	-	-	11.699	-	-	-
Wae Sorama	-	-	-	-	-	4.783
Wae Tapan	-	-	-	-	-	1.255
Wae Teko	-	-	3.186	-	-	-
Wae Tifu	-	505	-	712	-	-
Wae Titbari	-	-	-	-	5.018	-
Wae Turen	-	-	-	1.110	-	-
Wae Wagete	-	-	-	6	2.249	-
Wae Watina	-	-	-	-	1.425	-
Wae Wawali	-	-	-	936	-	-
Total	7.017	57.343	87.086	92.132	64.677	59.993

Sumber : Laporan Akhir RTRW 2023-2043

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebesar 7.017 Ha wilayah di Kabupaten Buru Selatan yaitu memiliki klasifikasi geo hidrologi yang kurang lebih rendah. Sedangkan sebesar 361.231 Ha wilayah memiliki klasifikasi geohidrologi Tinggi.

b) Zona Air Tanah

Dari kondisi tersebut di atas dan didukung oleh kontrol batuan dan struktur geologi, maka secara umum neraca air tanah menunjukkan terdapat 2 (dua) zona air tanah, yaitu:

- Zona air tanah rendah, yang pada umumnya menempati punggung pemisah air morfologi (*morphological water divided*) sebagai pemisah daerah tangkapan hujan (*catchment area*) keempat wilayah DAS tersebut diatas serta pada 2 (dua) punggung yang terdapat di selatan daerah studi;
- Zona air tanah sedang – tinggi menempati hampir seluruh wilayah studi, yang mengelilingi Pulau Buru. Kawasan ini dapat tercapai jika sistem vegetasi

tetap terjaga, sehingga tingkat peresapan (*recharged*) dapat dipertahankan dan *surface run off* dapat dicegah dan diperkecil.

c) Hidro Oceanografi

Sesuai dengan kondisi geografinya Kabupaten Buru Selatan dikelilingi oleh Laut Seram di Utara dan Laut Banda di Selatan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan sebagai kabupaten yang berada di dalam Provinsi Maluku. Oleh karena itu, pada bagian utara dan selatan berada pada posisi gapura energi gelombang yang tinggi pada musim barat maupun musim timur, dengan arus laut dari selatan yang sangat kuat pada musim timur yang berlangsung pada bulan Juni sampai September. Berdasarkan kondisi tersebut dan sesuai dengan posisi Kabupaten Buru Selatan yang berada di busur luar kepulauan non magmatik, maka Laut Seram di Utara dan Laut Banda di Selatan merupakan 2 (dua) palung laut dalam (samudera) yang sangat mempengaruhi wilayah ini, dengan kondisi batimetri yang sangat dalam. Disisi lain Kabupaten Buru Selatan memiliki potensi sumber daya perikanan yang tinggi didukung keberadaan di jalur ALKIII menghubungkan Timur, Barat, dan Utara seperti telah dijelaskan sebelumnya.

2.1.1.4. Klimatologi

Iklm di Kabupaten Buru Selatan dipengaruhi oleh iklim tropis dan iklim musim yang disebabkan oleh kondisi Kabupaten Buru Selatan yang lebih dominan daratan, beberapa pulau kecil dan laut Banda.

Berdasarkan data klimatologi di stasiun meteorologi Kabupaten Buru Selatan padatahun 2023 menunjukkan bahwa rata-rata temperatur/suhu udara tertinggi tercatat di Kabupaten Buru Selatan yaitu sebesar 29,9°C pada bulan November, sementara terendah pada bulan Agustus yaitu sebesar 21,9°C. Rata-rata jumlah hari hujan terbanyak pada bulan Januari dan Februari yaitu 19 hari dan yang terendah pada bulan Oktober dan November, yaitu 1 hari. Kondisi curah hujan, tercatat tertinggi pada bulan Juli sebesar 255,7 mm dan terendah pada bulan Oktober dan November. Secara umum tekanan udara di Kabupaten Buru Selatan selama tahun 2023 berkisar antara 1.008,4 mbar sampai dengan 1.012,3 mbar. Sementara kecepatan angin teringgi pada bulan Juli dan September yaitu sebesar 19 knot dan terendah 14 knot pada bulan Februari.

Tabel 2.3. Data Klimatologi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023 Berdasarkan Pengamatan di Stasiun Pengamat Kabupaten Buru

Bulan	Rata-rata (Average)						
	Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Kecepatan Angin (knot)	Tekanan Udara (mbar)	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	27,5	84	15	1.008,4	150,8	19	5,2
Februari	27,3	85	14	1.008,4	146,7	19	3,9
Maret	27,7	82	17	1.009,7	161,4	11	6,9
April	27,8	82	15	1.008,9	139,1	10	7,0
Mei	28,0	80	17	1.010,5	180,9	14	6,7
Juni	27,5	82	16	1.010,3	112,4	9	6,0
Juli	27,0	81	19	1.010,9	255,7	12	5,8
Agustus	21,9	73	18	1.012,3	11,0	5	8,5
September	29,3	71	19	1.011,6	68,7	7	7,9
Oktober	29,3	69	18	1.011,9	-	1	9,1
November	29,9	71	16	1.010,0	-	1	9,4
Desember	28,9	79	15	1.009,5	192,1	16	4,1

Sumber : Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka, 2024

2.1.2. Aspek Demografi Daerah

Perkembangan penduduk Kabupaten Buru Selatan dilihat dari jumlahnya pada tahun 2021-2023 mengalami peningkatan pada tahun 2023 dengan rata-rata laju pertumbuhan 0,81. Secara rinci perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Buru Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan (%)
1.	2021	77.126	0,20
2.	2022	77.688	0,72
3.	2023	79.017	0,81

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buru Selatan, 2024

Bila dilihat dari rata-rata pertumbuhan penduduk per Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan, maka Kecamatan Namrole dan Kepala Madan tercatat sebagai wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi tahun 2021-2023 dengan rata-rata pertumbuhan 3,40 persen dan 3,84 persen dan Kecamatan yang memiliki rata-rata pertumbuhan terendah adalah Kecamatan Waesama sebesar 0,17 persen.

Tabel 2.5. Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023

No.	Kecamatan	2021	2022	2023	Laju Pertumbuhan 2021-2023 (%)
1.	Kepala Madan	12.383	12.549	12.991	3,40
2.	Leksula	14.490	14.243	14.267	0,17
3.	Fena Fafan	4.057	4.171	4.309	3,20
4.	Namrole	21.194	21.513	22.373	3,84
5.	Waesama	15.689	15.641	15.852	1,33
6.	Ambalau	9.313	9.170	9.225	0,60
Buru Selatan		77.126	77.287	79.017	2,19

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buru Selatan, 2024

Kepadatan dan distribusi penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023 terbesar berada di kecamatan Namrole yaitu sebesar 92 jiwa/km² dan 16,44 persen.

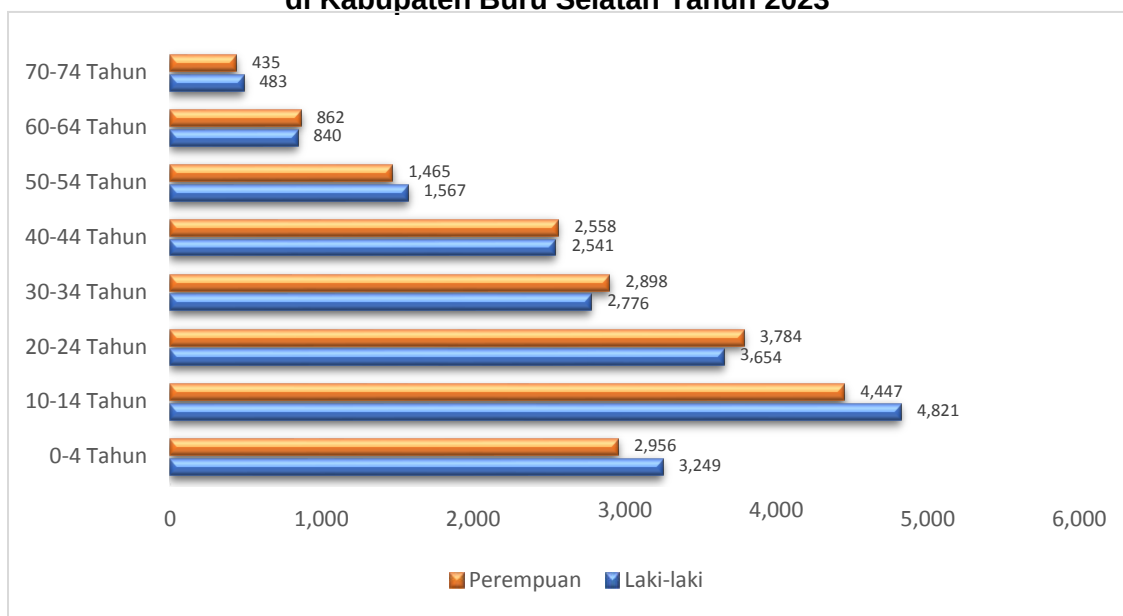
Tabel 2.6. Kepadatan dan Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Distribusi Penduduk (%)
1.	Kepala Madan	14	16,44
2.	Leksula	10	20,06
3.	Fena Fafan	11	5,45
4.	Namrole	92	28,31
5.	Waesama	29	20,06
6.	Ambalau	40	11,67
Total		21	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buru Selatan, 2024

Pengelompokan menurut umur dan jenis kelamin bermanfaat bagi penyusunan perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kelompok umur masing-masing. Penduduk Buru Selatan dengan kelompok umur 10-14 tahun dan 20-24 tahun mempunyai jumlah yang paling tinggi, hal ini berarti penduduk usia muda adalah penduduk yang dominan di Kabupaten Buru Selatan. Komposisi penduduk ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif harus menanggung penduduk tidak produktif. Semakin besar proporsi penduduk usia tidak produktif maka semakin besar beban tanggungan penduduk usia produktif.

Diagram 2.1. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023

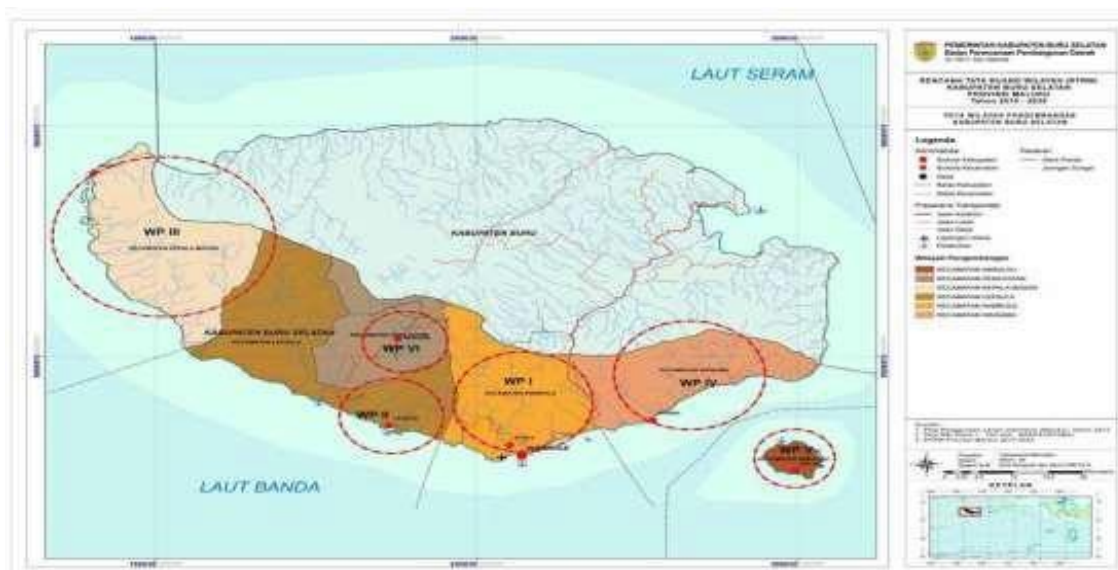


Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buru Selatan, 2024

2.1.3. Wilayah Pengembangan

Pengembangan wilayah Kabupaten Buru Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buru Selatan guna membangun Buru Selatan sebagai Kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada potensi unggulan daerah. Untuk lebih jelas pembagian wilayah pengembangan di Kabupaten Buru Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.3

Gambar 2.3. Peta Wilayah Pengembangan Kabupaten Buru Selatan



Sumber: RTRW Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009-2029

Untuk peningkatan perekonomian masyarakat, potensi pengembangan wilayah dibagi berdasarkan 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), setiap wilayah pengembangan tersebut memiliki wilayah pelayanannya masing-masing, sesuai dengan daya jangkau pusat pelayanan dari wilayah pengembangan tersebut. Keenam Wilayah Pengembangan tersebut sebagai berikut :

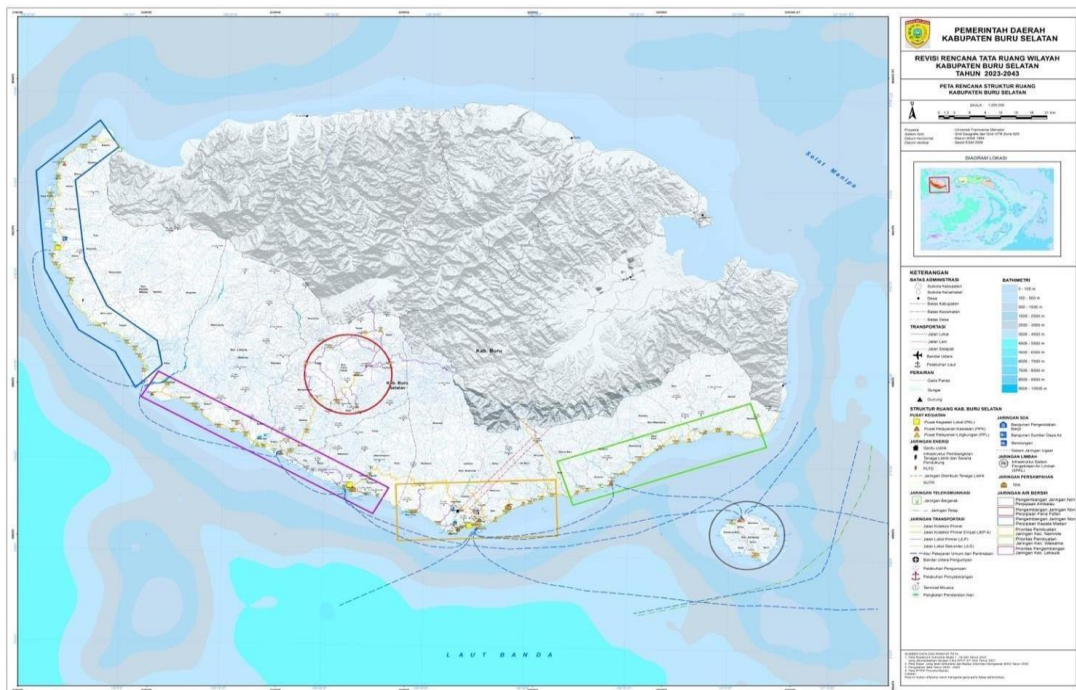
1. Wilayah Pengembangan I yang meliputi Kecamatan Namrole dengan pusat pelayanan di Kota Namrole. Fungsi utama WP sebagai berikut :
 - a) Pusat Pemerintahan dan Pelayanan Jasa
 - b) Pusat Transportasi Regional
 - c) Sentra produksi pertanian tanaman pangan
 - d) Sentra produksi kehutanan
 - e) Sentra produksi perikanan, dan
 - f) Wisata
2. Wilayah Pengembangan II yang meliputi Kecamatan Leksula dengan pusat pelayanan di Desa Leksula. Fungsi utama WP II adalah :
 - a) Pusat Perdagangan
 - b) Pusat Pelayanan Jasa
 - c) Kawasan Ekonomi Khusus
 - d) Sentra produksi kehutanan, dan
 - e) Sentra produksi pertanian (hortikultura)
 - f) Sentra produksi perkebunan
 - g) Sentra produksi perikanan
 - h) Wisata
3. Wilayah Pengembangan III yang meliputi Kecamatan Fena Fafan dengan pusat pelayanan di Desa Waekatin. Fungsi utama WP III adalah :
 - a) Sentra produksi kehutanan
 - b) Sentra produksi pertanian (hortikultura)
 - c) Sentra produksi perkebunan
 - d) Sentra produksi perikanan
 - e) Pendukung utama Kawasan Ekonomi Khusus
4. Wilayah Pengembangan IV yang meliputi Kecamatan Kepala Madan dengan pusat pelayanan di Desa Biloro. Fungsi utama WP IV adalah :
 - a) Sentra produksi pertanian
 - b) Sentra produksi perkebunan
 - c) Sentra Produksi Perikanan
 - d) Pusat pelayanan jasa

- e) Wisata
- 5. Wilayah Pengembangan V yang meliputi Kecamatan Waisama dengan pusat pelayanan di Desa Wamsisi. Fungsi utama WP V adalah :
 - a) Sentra produksi pertanian
 - b) Sentra produksi perkebunan
 - c) Sentra Produksi Perikanan
 - d) Pusat pelayanan jasa
- 6. Wilayah Pengembangan VI yang meliputi Kecamatan Ambalau dengan pusat pelayanan di Desa Waelua. Fungsi utama WP VI adalah :
 - a) Sentra produksi perkebunan
 - b) Sentra produksi perikanan
 - c) Wisata

2.1.4. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Buru Selatan

Sistem pusat-pusat permukiman atau sistem perkotaan di Kabupaten Buru Selatan, yang direncanakan tidak terlepas dari rencana struktur kota di Ibukota Kabupaten maupun Kota Kecamatan, karena Kota merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk struktur ruang. Sistem Perkotaan diarahkan sesuai dengan hierarki jumlah penduduk, potensi dan kegiatan ekonominya. Pengembangan sistem kota-kota diarahkan sedemikian rupa, agar selaras dengan arahan pengembangan wilayah, terutama berkaitan dengan kondisi fisik yang sebagian merupakan pulau-pulau dan kondisi bencana alam. Di pihak lain Kawasan perkotaan memerlukan pengelolaan secara individual yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi dalam rangka mendukung fungsi kotanya di wilayah yang lebih luas, serta mendukung pengembangan wilayah yang berkelanjutan (*Sustainable Development*). Rencana struktur ruang Kabupaten Buru Selatan dapat dilihat pada gambar 2.4. berikut :

Gambar 2.4. Peta Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Selatan



Sumber: Laporan Akhir RTRW Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2043

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi.

Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang terdiri atas:

- a. PKN yang berada di wilayah kabupaten;
- b. PKW yang berada di wilayah kabupaten;
- c. PKL yang berada di wilayah kabupaten;
- d. PKSN yang berada di wilayah kabupaten; dan
- e. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:
 - 1) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan
 - 2) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten meliputi sistem prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang mengintegrasikannya dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
- b. Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi;
- c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; dan
- d. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- a. Mengakomodasi rencana struktur ruang nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi, dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- b. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan.

Sesuai dengan arahan RTRW Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2034 bahwa pengembangan sistem perkotaan ini bertujuan untuk mendukung terbentuknya struktur ruang yang tangguh untuk memfasilitasi upaya pengembangan ekonomi basis pertanian lahan kering. Pengembangan sistem kota-kota juga bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan dan keselarasan pembangunan antar wilayah sesuai dengan potensinya dan daya tampung lingkungannya; baik itu struktur ruang internal pada Kabupaten Buru Selatan maupun struktur ruang eksternal dalam lingkup Provinsi Maluku.

Mengingat sektor ekonomi basis Kabupaten Buru Selatan adalah sektor pertanian, pariwisata, dan perikanan maka konsep ruang yang akan diterapkan adalah pengembangan kabupaten dengan kota-kota atau kawasan perkotaan yang mendukung pengembangan pertanian, pariwisata, dan perikanan. Pengembangan hierarki kota di Kabupaten Buru Selatan berdasarkan pada arahan kebijakan nasional dan propinsi, disamping itu juga berdasarkan hasil kajian tentang tingkat perkembangan masing-masing kawasan perkotaan di Kabupaten Buru Selatan. Hierarkisistem pusat-pusat permukiman bagi Kabupaten Buru Selatan sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Namrole di Kecamatan Namrole Desa Labuang, Desa Masnana, Desa Waeono, Desa Elfule, dan Desa Kamlanglale memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan skala regional, pusat jasa dan pelayanan masyarakat sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten.
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Leksula Kecamatan Leksula di Desa Leksula dan Desa Nalbesi, memiliki fungsi utama sebagai pusat pengembangan industri pengolahan hasil sumber daya alam, pusat koleksi dan distribusi, serta perdagangan dan jasa skala yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kepala Madan di Kecamatan Kepala Madan di Desa Fogi dan Desa Bala-Bala, memiliki fungsi utama sebagai pusat koleksi dan distribusi, pusat pengembangan hasil perkebunan dan pertanian, pengembangan pariwisata alam, pusat jasa pelayanan yang berfungsi untuk melayani kegiatan di beberapa kecamatan.
4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Tifu di Kecamatan Leksula Desa Tifu, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Waemulang di Kecamatan Leksula Desa Waemulang, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Biloro di Kecamatan Kepala Madan Desa Biloro, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Waesama di Desa Wamsisi, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Ambalau di Desa Ulina memiliki fungsi sebagai pusat produksi perkebunan, pertanian, pariwisata serta perdagangan dan jasa, dengan skala pelayanan beberapa desa dan kecamatan.
5. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang berada di seluruh desa di Kabupaten Buru Selatan sebagai pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa.

Penetapan fungsi suatu kota didasari oleh alasan pertimbangan tertentu dimana keberadaan kota tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangan kawasan sekitar dan pengembangan wilayah secara umum. Pertimbangan penetapan fungsi kota antara lain :

1. Fungsi kota yang didasarkan pada kedudukan dan lokasinya dimana berada pada kawasan strategis, dan kawasan tertentu seperti kawasan perbatasan, dan kawasan tumbuh cepat, sehingga kota tersebut perlu berfungsi sebagai pusat kegiatan produksi (kegiatan industri, agroindustri, pertambangan, dll) dan pusat perhubungan guna mendukung usaha pemasaran;
2. Kota yang berfungsi pusat pelayanan sosial ekonomi bagi desa-desa di kawasan belakangnya yang memiliki karakteristik relatif terpencil dan terbelakang atau merupakan pengembangan kawasan ekonomi baru. Fungsi kota tersebut sebagai pusat

pengumpul dan distribusi;

3. Sinkronisasi sistem pusat pemukiman dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 dengan Rencana Tata Ruang Provinsi Maluku untuk Kabupaten Buru Selatan.

Berikut dapat dijelaskan pada tabel 2.6 dibawah ini:

**Tabel 2.7. Hierarki Sistem Pusat – Pusat Permukiman
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023**

REVISI RTRW KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2023	
Rencana Pusat Permukiman	Fungsi
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Namrole di Kecamatan Namrole Desa Labuang, Desa Masnana, Desa Waeono, Desa Elfule, Desa Farmite dan Desa Kamanglale;	Memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan skala regional, pusat jasa dan pelayanan masyarakat sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten;
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Leksula Kecamatan Leksula di Desa Leksula dan Desa Nalbesi;	Memiliki fungsi utama sebagai pusat pengembangan industri pengolahan hasil sumber daya alam, pusat koleksi dan distribusi, serta perdagangan dan jasa skala yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa Kecamatan;
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kepala Madan di Kecamatan Kepala Madan di Desa Fogi dan Desa Bala-Bala;	Memiliki fungsi utama sebagai pusat koleksi dan distribusi, pusat pengembangan hasil perkebunan dan pertanian, pengembangan pariwisata alam, pusat jasa pelayanan yang berfungsi untuk melayani kegiatan di beberapa Kecamatan;
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Biloro di Kecamatan Kepala Madan Desa Biloro;	Memiliki fungsi sebagai pusat produksi perkebunan, pertanian, pariwisata serta perdagangan dan jasa, dengan skala pelayanan beberapa desa dan kecamatan;
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Waesama di Desa Wamsisi;	Memiliki fungsi sebagai pusat produksi perkebunan, pertanian, pariwisata serta perdagangan dan jasa, dengan skala pelayanan beberapa desa dan kecamatan;
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Waemulang di Kecamatan Leksula Desa Waemulang;	Memiliki fungsi sebagai pusat produksi perkebunan, pertanian, pariwisata serta perdagangan dan jasa, dengan skala pelayanan beberapa desa dan kecamatan;
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Tifu di Kecamatan Leksula Desa Tifu;	Memiliki fungsi sebagai pusat produksi perkebunan, pertanian, pariwisata serta perdagangan dan jasa, dengan skala pelayanan beberapa desa dan kecamatan;
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Ambalau di Desa Ulima;	Memiliki fungsi sebagai pusat produksi perkebunan, pertanian, pariwisata serta perdagangan dan jasa, dengan skala pelayanan beberapa desa dan kecamatan.

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) diseluruh Desa;	Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa;

2.1.4.1. Rencana dan Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung

Dalam penyusunan RTRW Kabupaten Buru Selatan, proses identifikasi kawasan yang telah dilakukan berhasil mengidentifikasi kawasan lindung meliputi :

a. Zona Lindung Lokal dan Zona Penyangga Hutan Mangrove

Kawasan yang direncanakan meliputi : Leksula, Kepala Madan, Desa Wamsisi dan Desa Namrole, dengan luasan hutan mangrove adalah $\pm 1.600,24$ Ha (hasil analisa citra, 2005). Perairan pesisir pantai yang dimaksud adalah desa Nalbesy, Teluk Leksula, Mefa, Tifu, Pulau Tomahu, dan Pulau Fogi.

b. Kawasan Lindung Sempadan Pantai, Sempadan Sungai dan Sempadan Danau

Perencanaan kawasan lindung sempadan pantai, sempadan sungai dan sempadan danau diarahkan untuk kawasan-kawasan yang masih mungkin untuk dipertahankan. Sempadan pantai berjarak 100m atau disesuaikan lebar pantai, sempadan sungai utama 100m, sub sungai 50m dan sempadan sungai yang melewati kawasan permukiman atau kota 15m atau disesuaikan dengan jarak sempadan yang tersisa atau topografi sungai dan kawasan lindung untuk sempadan danau 100m.

2.1.4.2. Rencana dan Arahan Pengelolaan Kawasan Budidaya

- a. Kawasan Perikanan Tangkap
- b. Kawasan Pariwisata terdapat di Leksula dan Namrole
- c. Zona Prasarana dan Sarana Perikanan

2.1.5. Kawasan Rawan Bencana

Penentuan zonasi/ wilayah rawan bencana Kabupaten Buru Selatan terbagi menjadi :

2.1.5.1. Penentuan Zonasi Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kawasan rawan banjir meliputi wilayah ekologis adalah wilayah ekologi Buru Selatan Timur, Pulau Ambalau, Desa Waemulang dan Desa Waemala.

2.1.5.2. Penentuan Zonasi Kawasan Rawan Abrasi dan Akresi

Abrasi dan akresi umumnya terjadi di pesisir pantai wilayah ekologi Teluk Leksula– Tanjung Waitepu, Pantai Enbofi, Mefa, Fogi – Air Ternate. Abrasi pantai juga terjadi intensif sepanjang pesisir Kabupaten Buru Selatan. Pada Pulau Ambalau tingkat abrasi cukup tinggi, demikian juga pada pantai Namrole dan Wamsisi.

2.1.5.3. Penentuan Zonasi Kawasan Rawan Erosi dan Sedimentasi

Erosi terjadi pada area perbukitan karst dan denudasional, sementara Sedimentasi terjadi

di muara sungai Waemala, Waihoka dan Waemulang.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

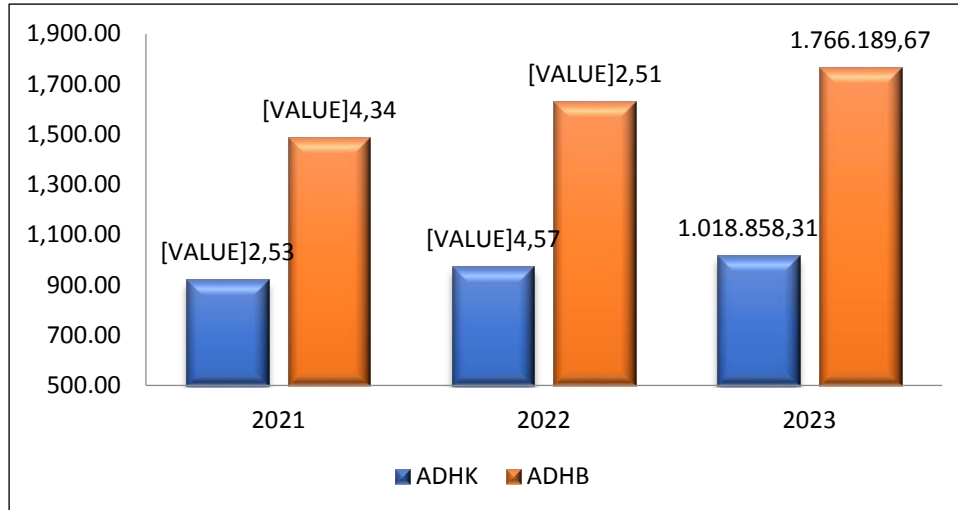
Tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi suatu daerah dapat diukur melalui beberapa indikator ekonomi makro antara lain: Pertumbuhan PDRB dan Kontribusi Ekonomi, Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per kapita, Gini Ratio, Tingkat Kemiskinan, Laju Inflasi dan Pengangguran.

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB dan Kontribusi Ekonomi

Pendapatan domestik regional per kapita merupakan salah satu indikator ekonomi untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara atau daerah. Sesuai dengan konsep dan definisi, pengertian pendapatan per kapita suatu daerah adalah pendapatan regional netto dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahunnya.

Sampai saat ini dalam perhitungan pendapatan regional dari provinsi maupun kabupaten dan kota di Indonesia, umumnya masih hanya sebatas Pendapatan Domestik Regional, sehingga angka Pendapatan Domestik Regional yang disajikan di sini adalah angka Pendapatan Domestik Regional Per kapita. Secara rinci pertumbuhan PDRB per kapita dapat dilihat pada Diagram 2.2.

Diagram 2.2. Perkembangan PDRB Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023



Sumber : PDRB Menurut Pengeluaran 2019-2023 Kabupaten Buru Selatan, 2024

Terlihat bahwa masih minimnya peningkatan hasil-hasil pertanian, kehutanan dan perikanan untuk menjadi kegiatan *home industry*. Kondisi ini harus menjadi perhatian bahwa perlu adanya peningkatan pemberdayaan masyarakat terhadap potensi unggulan Kabupaten Buru Selatan pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan melalui *home industry* agar lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan, karena jika anggaran pemerintah daerah kecil untuk sektor ini maka

kemiskinan akan semakin tinggi.

**Tabel 2.8 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buru Selatan
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2021 – 2023**

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)			Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	527,33	587,16	640,40	349,07	371,54	391,13
Pertambangan dan Penggalian	11,56	12,32	13,56	7,37	7,57	7,94
Industri Pengolahan	55,53	63,73	67,03	33,89	37,71	38,57
Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,17	0,18	0,12	0,12	0,13
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,29	0,30	0,33	0,21	0,22	0,24
Konstruksi	135,54	143,61	155,51	76,68	78,24	81,26
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	115,31	129,16	146,75	79,38	84,09	90,80
Transportasi dan Pergudangan	38,05	45,41	53,80	25,16	26,64	29,20
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,17	7,91	8,77	4,50	4,79	5,11
Informasi dan Komunikasi	8,14	8,95	9,73	6,07	6,48	6,86
Jasa Keuangan dan Asuransi	12,22	12,49	13,14	7,68	7,15	7,40
Real Estat	7,90	8,48	9,01	5,59	5,91	6,20
Jasa Perusahaan	0,36	0,39	0,42	0,25	0,27	0,29
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib	398,36	427,10	445,86	215,03	224,21	226,86
Jasa Pendidikan	77,10	82,09	85,65	49,76	52,36	54,47
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	75,72	83,62	94,70	50,94	54,58	59,43
Jasa Lainnya	17,66	19,41	21,34	11,51	12,30	12,98
Total	1.488,38	1.632,30	1.766,19	923,19	974,20	1.018,86

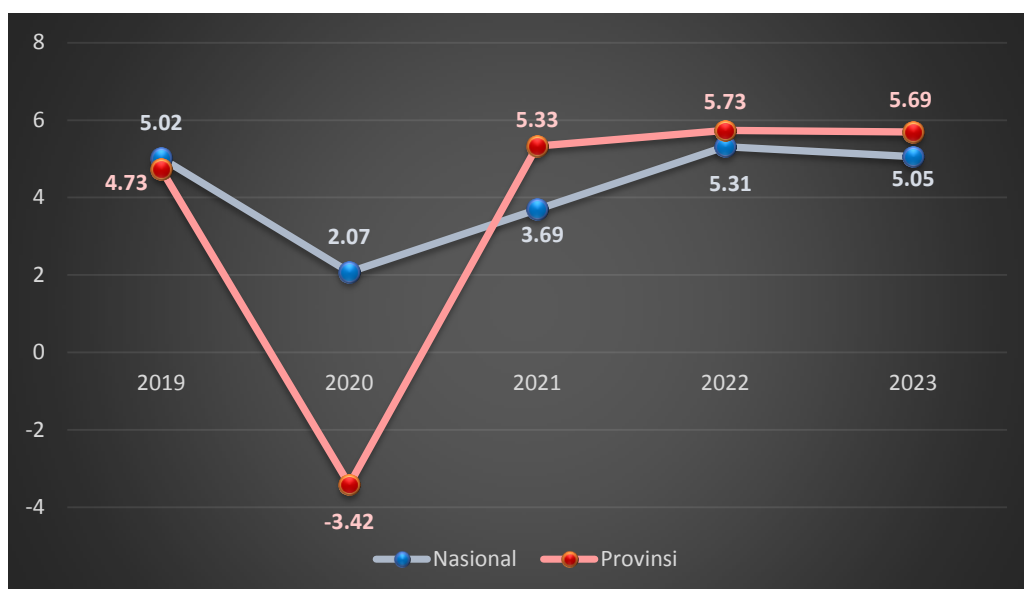
Sumber : Buru Selatan dalam Angka, Tahun 2024

2.2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 5,88 persen adalah perolehan tertinggi dari lima tahun ke depannya. Sejak tahun 2019 - 2023 pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi, dan kontraksi tertinggi terjadi di tahun 2020 sebesar -0,01, kondisi ini baru pertama kali terjadi sejak berdirinya Kabupaten Buru Selatan.

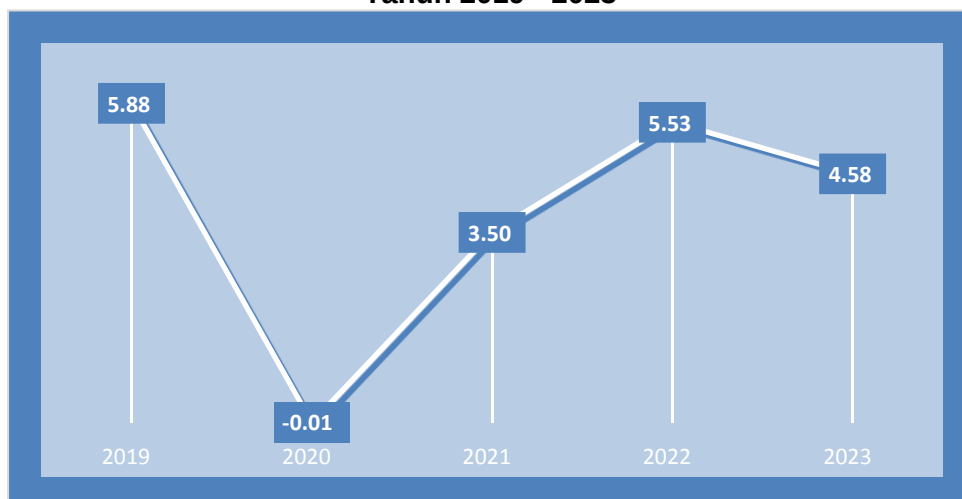
Dengan melihat nilai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan selama 2019-2023 memberikan gambaran bahwa pembangunan sangat baik, walaupun secara trend mengalami pertumbuhan yang menurun sejak tahun 2019-2023, kondisi ini alamiah karena secara regional atau di tingkat Provinsi Maluku maupun secara nasional juga pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi.

Grafik 2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2019 - 2023



Sumber : Sambutan Kemendagri pada Kegiatan Musrenbang RKPD Provinsi Maluku Tahun 2025

Grafik 2.2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019 - 2023



Sumber : BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024

Dengan melihat nilai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan selama 2019-2023 memberikan gambaran bahwa pembangunan sangat baik, walaupun secara trend mengalami

pertumbuhan yang fluktuatif sejak tahun 2019-2023, kondisi ini alamiah karena secara regional atau di tingkat Provinsi Maluku maupun secara nasional juga pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi dimana tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada tahun 2022 mencapai 5,73 persen.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang tumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi secara agregat ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Buru Selatan selama tahun 2020-2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2021 – 2023

No.	Lapangan Usaha/Industry	2021	2022*	2023**
1	2	3	4	5
A	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	0.27	6.64	5.27
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	4.88	2.79	4.90
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	1.08	11.28	2.26
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	5.72	4.07	4.20
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	2.99	2.55	6.71
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	8.10	2.05	3.86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	7.58	5.94	7.98
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	5.35	5.88	9.59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and food Service Activities</i>	3.95	6.59	6.61
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	5.95	6.76	5.91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	7.10	-6.88	3.46
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	3.35	5.77	4.93
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	4.14	6.93	4.74
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	4.44	4.27	1.18
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	3.98	5.23	4.02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	5.91	7.15	8.89
R,S, T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	1.96	6.86	5.51
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Produk		3,50	5,53	4,58

Sumber : BPS Kabupaten Buru Selatan, 2024

Berdasarkan tabel diatas, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,58 persen di tahun 2023, lebih rendah dari tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,53. Kondisi pertumbuhan ekonomi yang melambat di tahun 2023 namun tetap menunjukkan trend positif mengindikasikan bahwa seluruh kegiatan sektor menghasilkan kegiatan produksi dan konsumsi. Kondisi giatnya kegiatan sektor ditahun 2023 terlihat dari sebagian besar atau 16 (Enam belas) sektor pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi pada sektor transportasi dan pergudangan 9,59 persen, diikuti oleh sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,89 persen dan sektor perdagangan besar dan eceran 7,98 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah dialami sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yakni 1,18 persen.

Tabel 2.10. PDRB Kabupaten Buru Selatan atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Jenis Pengeluaran (Juta rupiah), 2021-2023

No.	Komponen Pengeluaran	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010		
		2021	2022*	2023**	2021	2022*	2023**
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Konsumsi Rumah Tangga	1.270,862,50	1.397,698	1.518,049,73	753,696,02	792,953,69	823,887,64
2.	KonsumsiLNPR	51,892,62	55,697,84	61,324,79	30,479,45	31,727,61	33,429,55
3.	Konsumsi Pemerintah	883,451,35	869,817,21	891,326,64	511,708,00	494,930,79	498,910,71
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	792,339,35	823,760,27	837,788,50	467,068,17	473,272,75	475,486,34
5.	Perubahan Inventori	24,040,31	24,853,62	25,231,17	13,661,08	13,725,40	13,793,52
6.	Ekspor Barang dan Jasa	(1.534.210,78)	(1.539.524,82)	(1.567.531,16)	(853.420.,20)	(832.405,66)	(826.694,46)
Total PDRB		1.488.384,34	1.632.302,51	1.766.189,67	923.192,53	974.204,57	1.018.858,31

Sumber : PDRB Menurut Pengeluaran 2019-2023 Kabupaten Buru Selatan, 2024

Pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar dalam 3 tahun (2021-2023) diberikan oleh Konsumsi Rumah Tangga, dan mengalami peningkatan dalam tiga tahun. Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2023 sebesar 1.018.858,31, sedangkan kelompok pengeluaran perubahan inventori merupakan pengeluaran yang paling kecil di tahun 2023, bahkan sejak tahun 2021.

2.2.1.3. PDRB Per kapita

Secara konstan, PDRB Per kapita di Kabupaten Buru Selatan dalam 3 tahun terakhir (2022-2023) mengalami trend peningkatan. Pada tahun 2021 besarnya PDRB per kapita Kabupaten Buru Selatan sebesar 12,05 Ribu Rupiah selanjutnya meningkat menjadi 12,48 Ribu

Rupiah di tahun 2022 dan Tahun 2023 PDRB per kapita Kabupaten Buru Selatan mengalami peningkatan menjadi 12,82 Ribu Rupiah. Laju pertumbuhan PDRB per kapita mengalami peningkatan sebesar 0,34 ditahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Dengan kata lain laju pertumbuhan PDRB Per kapita di tahun 2023 masih lebih tinggi dari tahun 2022. Perkembangan PDRB per kapita tiga tahun terakhir seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11. PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021 – 2023
Nilai PDRB (JutaRupiah)

	2021	2022*	2023**
ADHK	923,192,53	974.204,57	1.018.858,31
PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)			
ADHK	12,05	12,48	12,82
PDRB per KapitaADHK 2010 (%)	1,25	3,53	4,58

Sumber : PDRB Menurut Pengeluaran 2021 - 2023 Kabupaten Buru Selatan, 2024

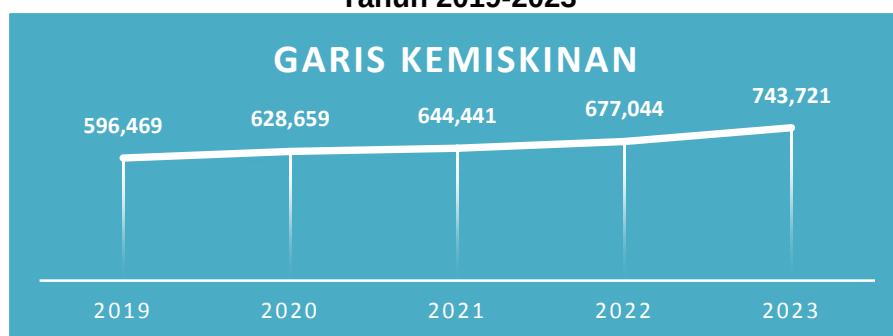
2.2.1.4. Tingkat Kemiskinan

a. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan GK dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita perhari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Perkembangan Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Buru Selatan dari tahun 2019 sampai dengan 2023 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 perkembangan Garis Kemiskinan mencapai Rp.596.469,- meningkat menjadi Rp.743.721,- pada tahun 2023, hal tersebut dapat diartikan pada tahun 2023 pengeluaran per kapita/bulan penduduk miskin Kabupaten Buru Selatan yang berada pada Garis Kemiskinan mencapai Rp.743.721,- untuk lebih jelasnya dapat dilihat Grafik 2.3.

Grafik 2.3. Perkembangan Garis Kemiskinan Kab. Buru Selatan Tahun 2019-2023

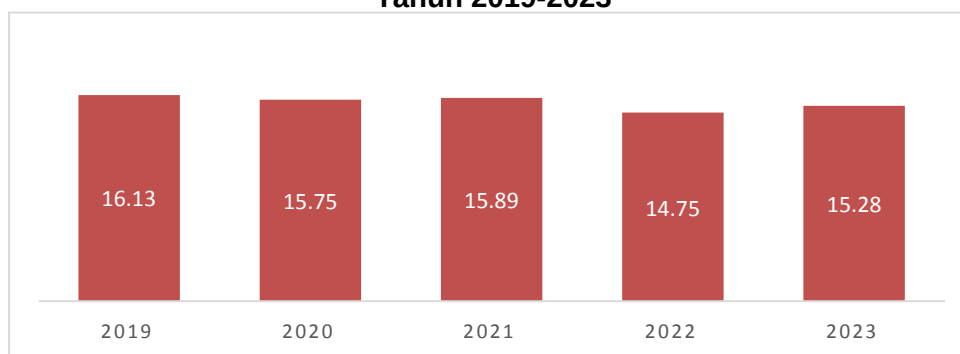


Sumber : BPS Kabupaten Buru Selatan, 2024

Tingkat Kemiskinan merupakan salah satu indikator ekonomi, sebagai acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Kemiskinan merupakan masalah yang masih menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah, tidak terkecuali juga bagi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Berbagai macam program pengentasan kemiskinan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta diharapkan akan dapat terus menekan angka kemiskinan sampai pada tingkat yang serendah-rendahnya.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Persentase kemiskinan di Buru Selatan mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan sebesar 14,75 persen menjadi 15,28 persen di tahun 2023. Peningkatan tingkat penduduk miskin dipengaruhi oleh adanya kebijakan Pemerintah Pusat (kebijakan makro) seperti kenaikan harga komoditi tertentu secara bersamaan menyebabkan kenaikan inflasi dan peningkatan jumlah pertumbuhan penduduk yang tidak diikuti dengan perbaikan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Diagram 2.3 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019-2023

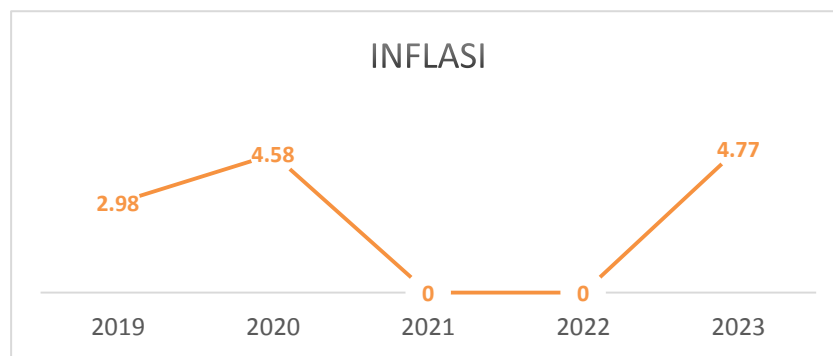


Sumber : Press Release BPS Buru Selatan, 2024

2.2.1.5. Laju Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Laju inflasi di Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2023 sebesar 4,77 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan beberapa indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran.

Grafik 2.4. Laju Inflasi Kabupaten Buru Tahun 2019-2023

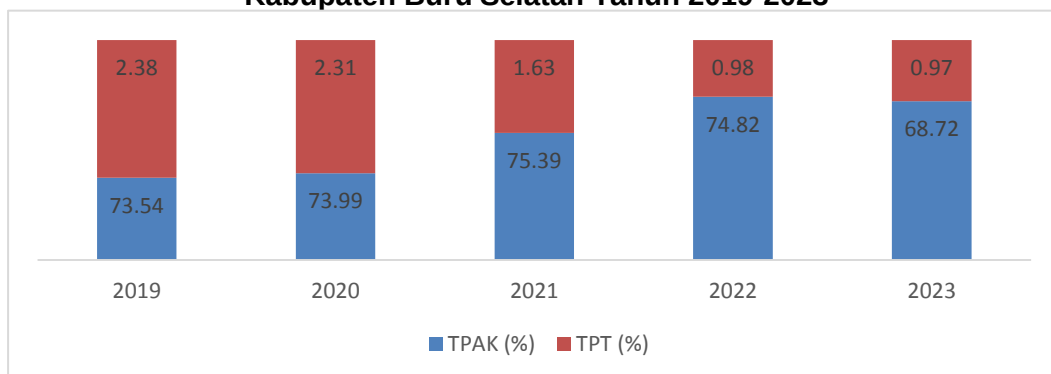


Sumber : BPS Buru Selatan, 2024

2.2.1.6. Pengangguran

Pengangguran merupakan keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan namun belum bisa memperolehnya. Pengangguran pada umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih masuk dalam kategori hasil yang baik, mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir yakni 2019-2023. Tahun 2019 TPT sebesar 2,38 persen, turun menjadi 0,97 pada tahun 2023.

Diagram 2.4. Tingkat TPAK dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : Press Release BPS Buru Selatan, 2024

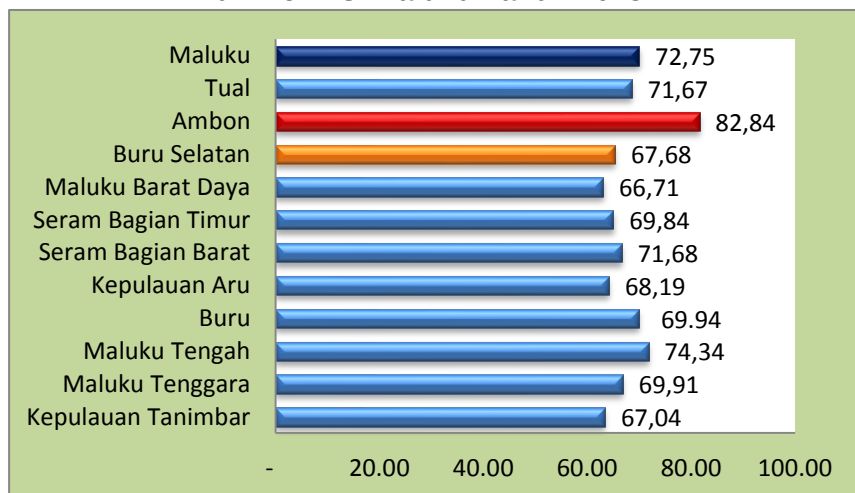
2.2.2. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Sosial

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri atas tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan merupakan suatu gambaran bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Komponen kesehatan diukur dari Umur Harapan Hidup (UHH), sedangkan pendidikan ada dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Sementara komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah).

Nilai IPM tahun 2023 di masing-masing kabupaten/kota hanya Kota Ambon dan Maluku Tengah yang memiliki nilai IPM di atas nilai Provinsi sedangkan Kabupaten Buru Selatan dan 8 Kabupaten lainnya di bawah nilai Provinsi. Kabupaten Buru Selatan mengalami peningkatan IPM setiap tahunnya (2020-2022) dengan rata-rata pertumbuhan IPM sebesar 0,77 yang merupakan urutan ke 9 (sembilan) tertinggi dari 11 (sebelas) Kabupaten Kota di Provinsi Maluku, secara jelas terlihat pada Diagram di bawah ini.

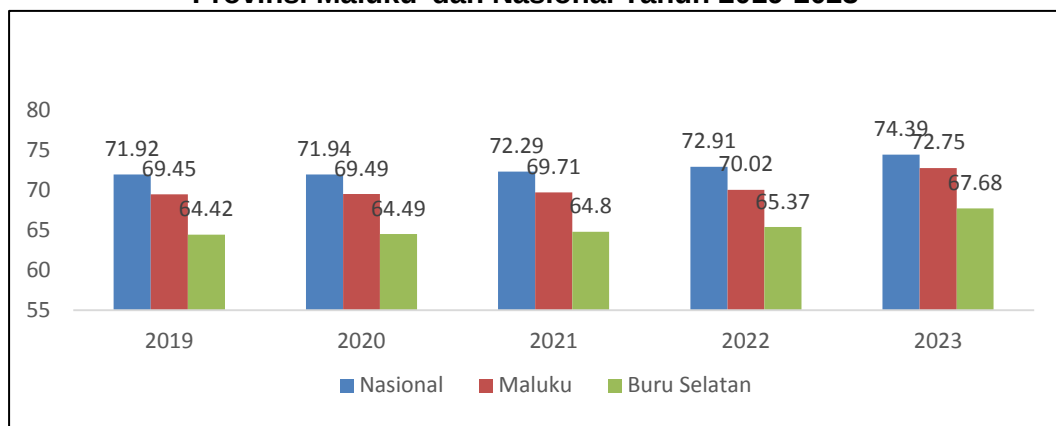
Diagram 2.5 Rata-Rata IPM Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2023



Sumber : Press Release BPS, 2024

Pada diagram di atas Kota Ambon memiliki IPM tertinggi sedangkan Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki IPM paling rendah yaitu 66,71, kondisi ini berkorelasi positif dengan angka kemiskinan yang juga Maluku Barat Daya sebagai kantong kemiskinan tertinggi. Sedangkan posisi IPM Kabupaten Buru Selatan, secara regional dan nasional dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.5 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : Sambutan Kemendagri pada Kegiatan Musrenbang RKPD Provinsi Maluku Tahun 2025, Press Release BPS Buru Selatan, 2024

Pertumbuhan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buru Selatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dipengaruhi oleh meningkatnya Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita. Pada tahun 2023 Pengeluaran per kapita mengalami peningkatan sebesar 392 poin dari tahun sebelumnya. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buru Selatan Berdasarkan Komponen IPM Tahun 2021-2023

No.	Komponen IPM	2021	2022	2023
1.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	66,36	66,69	70,11
2.	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,70	12,83	12,84
3.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,95	8,06	8,23
4.	Pengeluaran Per kapita (Rp.Juta)	7.600	7.716	8.108

Sumber : BPS Buru Selatan, 2024

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

Urusan wajib dasar diarahkan pada urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sosial.

2.3.1.1 Bidang Urusan Pendidikan

Secara umum, pencapaian Kabupaten Buru Selatan pada semua indikator bidang pendidikan dari tahun 2016 sampai 2023 lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.13 Capaian Kinerja Indikator Bidang Pendidikan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023

INDIKATOR	2021	2022	2023
Angka Partisipasi Kasar (APK)			
APK SD/SDLB (%)	116,10	116,10	99,88
APK SMP/SMPLB (%)	86,80	86,80	64,39
Angka Partisipasi Murni (APM)			
APM SD/SDLB (%)	97,83	97,83	96,86
APM SMP/SMPLB (%)	80,13	80,13	76,14
Angka Partisipasi Sekolah (APS)			
APS usia 7 -12 (%) (SD/MI)	-	98,10	98,88
APS usia 13-15 (%) (SMP/MTS)	-	96,33	94,87
Angka Putus Sekolah			
Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	-	0,73	0
Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	-	2,20	0
Angka Kelulusan			
Angka Kelulusan SD/MI (%)	-	100	100
Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	-	100	100
Fasilitas Pendidikan			
Sekolah SD/SDLB Kondisi Bangunan Baik (%)	-	75,7	78,14
Sekolah SMP/SMPLB Kondisi Bangunan Baik (%)	-	87,23	80
Rasio Ketersediaan Sekolah			
Rasio Ketersediaan Sekolah SD sederajat terhadap penduduk usia sekolah	-	95,50	94,33
Rasio Ketersediaan Sekolah SMP sederajat terhadap penduduk usia Sekolah	-	109,25	62,83
Rasio Pendidik dan Peserta Didik per Kelas Rata-Rata			
Rasio Pendidik dan Peserta Didik SD /SDLB per kelas rata-rata	-	46,63	-
Rasio Pendidik dan Peserta Didik SMP/ SMPLB per kelas rata-rata	-	70,70	-
Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah			
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Usia 15 Tahun Ke Atas (Tahun)	7,95	-	8,23
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,70	12,83	12,84

Sumber : BPS Buru Selatan, 2024, Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan, 2024

2.3.1.2. Bidang Urusan Kesehatan

Capaian kinerja sektor kesehatan umumnya mengalami perbaikan hal ini terlihat dari angka yang menunjukkan perbaikan sejak tahun 2019-2023, pada beberapa indikator kesehatan mengalami peningkatan pada tahun 2023 misalnya persalinan ditolong tenaga kesehatan (%) menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 meskipun angkanya bersifat fluktuatif, data ini menunjukan bahwa program pemerintah sangat baik dilakukan. Adapun sejumlah indikator urusan kesehan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14. Capaian Indikator Kesehatan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1.	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	3,83	8,89	2,78
2.	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	9,87	10,8	15,53
3.	Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan (%)	93,12	53,8	63,83
4.	Kunjungan Ibu Hamil (K4) (%)	82,02	42,6	52
5.	Pelayanan kesehatan bayi (%)	82,64	143,05	87,21
6.	Menurunnya Prevalensi Balita Gizi Kurang (%)	9,99	6,0	3,66
7.	Menurunnya Prevalensi Balita Gizi Buruk/kurus (%)	0,22	-	0,53
8.	Menurunnya Prevalensi Balita Stunting (%)	39,1	41,6	3,54
9.	Desa/Kelurahan UCI (%)	43,04	71,4	61,9
10.	Jumlah Kasus HIV/AIDS (Kasus)	5	5	7
11.	Rasio Posyandu per satuan balita	14,21	28	17,34
12.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu, per satuan penduduk	0,66	0,67	0,67
13.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (/1.000)	66,67	0,025	0,025
14.	Rasio Dokter per satuan penduduk (/1.000)	30,43	0,4	0,27
15.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (/1.000)	5,75	0,44	0,35
16.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	2,42	-	100
17.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	80	-	37,84
18.	Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, DBD (%)	73,37	-	59,2
19.	Cakupan pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	0,92	-	-
20.	Cakupan Puskesmas	0,02	-	216,67
21.	Cakupan pembantu Puskesmas	0,49	-	49,38
22.	PHBS (%)	38,26	-	35,5
23.	Rasio akseptor KB (%)	37,19	-	29,78
24.	Cakupan peserta KB aktif (%)	55,26	27,58	29,78

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan, 2024.

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang mampu menjangkau setiap elemen masyarakat hingga ke seluruh penjuru desa di Kabupaten Buru Selatan. Realitanya fasilitas kesehatan di Kabupaten Buru Selatan masih perlu ditingkatkan. Tabel berikut menampilkan data tenaga

kesehatan, fasilitas kesehatan, jumlah persentase KB aktif di Kabupaten Buru Selatan.

Tabel 2.15. Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotik	Posyandu Aktif	Polindes
1.	Kepala Madan	1	3	5	-	19	2
2.	Leksula	-	3	10	-	30	-
3.	Namrole	1	2	9	10	32	-
4.	Waesama	-	2	9	-	34	-
5.	Ambalau	-	2	4	-	8	-
6.	Fena Fafan	-	1	4	-	9	1

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan, 2024

Berikut jumlah kematian ibu maternal dan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Buru Selatan.

Tabel 2.16. Jumlah Kematian Ibu Maternal dan Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1.	Kematian ibu hamil	1	0	0
2.	Kematian ibu bersalin	7	8	2
3.	Kematian ibu nifas	2	1	1
4.	Kematian bayi	11	6	14
5.	Bayi Lahir Mati	26	11	17

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan, 2024

2.3.1.3. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menghambat proses-proses pembangunan menuju tujuan yang ingin dicapai karena sumberdaya pembangunan terserap untuk pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan manusia yang bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya pengendalian jumlah penduduk dan penggiatan program Keluarga Berencana.

a. Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif merupakan Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. Pada tahun 2023 jumlah pasangan usia subur sebanyak 14.812 pasangan, jumlah peserta KB aktif 4.411 orang dengan persentase peserta program KB aktif sebesar 29,8%. Berikut data jumlah persentase KB aktif di Kabupaten Buru Selatan tahun 2021-2023.

Tabel 2.17. Jumlah Persentase KB Aktif di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
1.	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Pasangan	15.435	14.833	14.812
2.	Jumlah Peserta Program KB Aktif	Pasangan	8.530	4.091	4.411
3.	Persentase Peserta Program KB Aktif	%	55,26	27,58	29,78

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan, 2024

2.3.1.4. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Akses Air Bersih

Persentase pengguna air bersih di Kabupaten Buru Selatan tahun 2023 sebesar 65,02 persen pada tahun 2023, dengan tabel sebagai berikut.

Tabel 2.18. Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih Tahun 2021-2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1.	Jumlah penduduk yang mendapat akses air bersih (jiwa)	NA	49.692	NA
2.	Persentase Jumlah penduduk yang mendapat akses air bersih (%)	NA	63,29	65,02

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Buru Selatan, 2024

b. Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase jumlah penduduk yang terakses sanitasi tahun 2023 sebesar 56,91 persen meningkat dari tahun 2022 yakni sebesar 56,68 persen, dengan tabel sebagai berikut.

Tabel 2.19. Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Sanitasi Tahun 2022-2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1.	Jumlah penduduk bersanitasi (jiwa)	NA	44.502	NA
2.	Persentase jumlah penduduk yang mendapat akses sanitasi	NA	56,68	56,91

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Buru Selatan, 2024

c. Kondisi Jalan

Jalan yang merupakan kewenangan Kabupaten di Buru Selatan dengan kondisi jalan Kab. Buru Selatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20. Kondisi Jaringan Jalan Kewenangan Kabupatendi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023

Tahun	Jalan Kabupaten				
	Panjang Jalan Kabupaten (Km)	Panjang jalan dengan kondisi baik (Km)		Panjang jalan dengan kondisi rusak (Km)	
		Km	(%)	Km	(%)
2021	465,95	118,384	25,41	347.566	74,59
2022	465,95	283,198	60,78	182,752	39,22
2023	465,95	53,217	13,85	322.588	83,95

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Buru Selatan, 2024

2.3.1.5. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada urusan perumahan di Buru Selatan beberapa indikator menyentuh capaian 100% bahkan lebih di tahun 2023. Indikator selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21. Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Indikator Kinerja	2021	2022	2023
1.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	100	NA	91,74
2.	Rasio rumah layak huni	NA	NA	0,22
3.	Cakupan layanan rumah layak huni terjangkau	NA	NA	11,11
4.	Persentase permukiman yang tertata	NA	NA	73,5
5.	Persentase lingkungan permukiman kumuh	NA	NA	30
6.	Persentase luas permukiman kumuh di kawasan perkotaan	NA	NA	2,98
7.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	NA	NA	8,25
8.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100	72,36	NA

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Buru Selatan, 2024

2.3.1.6. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Untuk urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tahun 2023 indikator tercapai 100%, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22. Capaian Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	2021	2022	2023
1.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (Orang)	NA	NA	391
2.	Penegakan Perda (%)	NA	NA	100

Sumber : Dinas Satpol-PP Kab. Buru Selatan, 2024

2.3.1.7. Bidang Urusan Sosial

a. Bantuan

Secara umum bantuan sosial di Buru Selatan menunjukkan angka peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Bantuan pangan dengan capaian 32,19% di tahun 2021 menjadi 33,73% di tahun 2022. Indikator bantuan lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.23. Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023

No.	Indikator	2021	2022	2023
1.	Bantuan Pangan (%)	32,19	33,73	NA
2.	Program Indonesia Pintar /PIP (%)	Ada	Ada	NA
3.	Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) (%)	39,30	42,83	NA
4.	Program keluarga harapan (%)	29,15	31,65	NA
5.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan tunai (%)	29,15	31,65	45,21
6.	Persentase PMKS yang tertangani (%)	49,73	50,73	45,21
7.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	17,73	19,19	45,21
8.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	14,91	16,20	NA
9.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial (%)	NA	NA	NA
10.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	NA	100	100
11.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100
12.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	17,89	9,18	100
13.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensi yang telah menerima jaminan sosial (%)	14,90	16,86	79,20

Sumber : Dinas Sosial Kab. Buru Selatan, 2024

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

Urusan wajib non pelayanan dasar meliputi urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, serta perpustakaan dan kearsipan.

2.3.2.1. Bidang Urusan Tenaga Kerja

Pada urusan tenaga kerja terdapat beberapa indikator urusan tenaga kerja, sementara pelatihan untuk tenaga kerja sampai pada tahun 2023 koperasi yang mengikuti pelatihan sebanyak 40 koperasi. Data lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24. Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Tenaga Kerja

No.	Indikator Kinerja	2021	2022	2023
1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	NA	NA	1
2.	Besaran pencari kerja yang di tempatkan (%)	NA	NA	10,19
3.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek (%)	NA	100	100

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab.Buru Selatan, 2024

2.3.2.2. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tidak ada jumlah KDRT yang terjadi di Buru Selatan sehingga capaian target sebesar 100%. Indikator lainnya tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.25. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Indikator Kinerja	2021	2022	2023
1.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	NA	NA	100
2.	Jumlah KDRT (%)	0	0	0

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Buru Selatan, 2024

2.3.2.3. Bidang Urusan Ketahanan Pangan

Ketersediaan pangan pada satu wilayah ditunjukkan dengan rasio ketersediaan pangan utama. Pada rasio ketersediaan pangan utama di Kabupaten Buru Selatan terjadi peningkatan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022, selengkapnya dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.26. Rasio Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1.	Ketersediaan Pangan Utama (%)	NA	0,60	0,94
2.	Pencapaian skor pola pangan harapan (Kkal/Kap/hr)	NA	2.013	2.347
3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	NA	NA	24

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buru Selatan, 2024

2.3.2.4. Bidang Lingkungan Hidup

Urusan bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Adapun capaian terselenggaranya KHLS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten tahun 2022 terlaksana dan 2023 juga terlaksana.

Tabel 2.27. Tersusunnya RPPLH, Terintegrasinya RPPLH dan Terselenggaranya KLHS Tahun 2021-2023

No	Uraian	2021	2022	2023
1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten	Tidak ada	Ada	Tidak ada
2.	Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten	Tidak ada	Ada	Tidak ada
3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten	Tidak ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru Selatan, 2024

Adapun indikator pemberian penghargaan lingkungan hidup terlaksana pada tahun 2023 dan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan Pemerintah Daerah Kab/Kota pada tahun 2022 sebesar 20% dan meningkatn pada tahun 2023 menjadi 30%.

Tabel 2.28. Pemberian Penghargaan dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2021-2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	NA	Ada	Ada
2.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan Pemerintah daerah Kabupaten/kota, likasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota (%)	24,69	20	30

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru Selatan, 2024

Selanjutnya persentase cakupan area pelayanan untuk urusan lingkungan hidup pada tahun 2023 sebesar 33,33%, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29. Cakupan Area Pelayanan Tahun 2021-2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1.	Persentase cakupan area pelayanan (%)	NA	33,3	33,33

Sumber: Dinas Lingkungan Hiidup Kab. Buru Selatan, 2024

Tabel 2.30. Timbunan Sampah, Jumlah sampah dan TPA/TPST/SPATahun 2021-2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1.	Timbunan sampah yang ditangani (%)	NA	67,19	100
2.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	NA	83,72	72
3.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten	NA	65	60

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru Selatan, 2024

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase timbunan sampah yang ditangani sebesar 100% pada tahun 2023, sementara persentase operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten sebesar 60% pada tahun 2023.

2.3.2.5. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Rasio Penduduk ber-KTP

Rasio penduduk ber KTP yang dimaksud adalah jumlah penduduk yang memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP (17 Tahun keatas atau telah menikah). Capaian rasio penduduk ber KTP per 2023 mencapai 91,71%.

Tabel 2.31. Rasio Penduduk ber-KTP

No.	Uraian	2021	2022	2023
1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan Penduduk (%)	97,00	99,43	91,71

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buru Selatan, 2024

b. Presentase Rasio Bayi Berakte ber-Akta Kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran yang dimaksud adalah jumlah bayi lahir yang mempunyai akte kelahiran dibagi jumlah keseluruhan bayi lahir yang dilaporkan. Capaian rasio bayi berakte kelahiran pada Tahun 2023 sebesar 100%.

Tabel 2.32. Rasio Bayi berakte Kelahiran

No.	Uraian	2021	2022	2023
1.	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buru Selatan, 2024

c. Pasangan Berakte Nikah

Capaian rasio pasangan berakte nikah pada tahun 2022 adalah sebesar 75,6 persen dan 35,89 persen pada tahun 2023. Masih rendahnya capaian rasio pasangan berakte nikah ini oleh masih banyaknya masyarakat khususnya pasangan non muslim yang hanya melakukan pernikahan secara agama dan tidak melakukan pencatatan pernikahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan untuk pasangan muslim banyak yang belum memiliki buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.

Tabel 2.33. Rasio Pasangan Berakte Nikah Tahun 2022-2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1.	Rasio pasangan berakte nikah (%)	76	75,6	35,89

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buru Selatan, 2024

d. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten

Dalam era yang serba digital tidak dapat dipungkiri kebutuhan akan database kependudukan menjadi hal yang vital, banyak aplikasi pelayanan maupun data baik yang diperuntukkan untuk internal administrasi kependudukan maupun instansi pengguna lain serta data kependudukan yang akurat dan valid, sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan maupun dalam penyelenggaraan urusan negara lainnya. Akan tetapi, masih banyaknya data anomali penduduk yaitu seperti data ganda, identitas invalid maupun sistem error. Oleh karena itu, administrasi kependudukan dalam berproses validasi database kependudukan secara kontinyu terus melakukan pembenahan. Untuk layanan database kependudukan baik secara online yang bisa diakses oleh instansi pengguna maupun secara statistik data menggunakan konsolidasi data bersih, sehingga data yang diperoleh masyarakat maupun pengguna adalah data valid bukan data anomali. Adapun ketersediaan database kependudukan skala kabupaten telah tersedia dan Instansi Pemerintah maupun swasta dapat melakukan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pemanfaatan data kependudukan. Terhitung pada tanggal 24 April 2021 database kependudukan telah berskala Nasional sehingga database kependudukan tidak tersedia lagi di kabupaten.

Tabel 2.34. Database Skala Kabupaten Tahun 2021-2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1.	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	Ada	Tidak ada (terpusat)	Tidak ada (terpusat)

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buru Selatan, 2024

e. KTP Nasional berbasis NIK

Pada tahun 2022 dan 2023 Disdukcapil Kab. Buru Selatan telah menggunakan KTP Nasional berbasis NIK.

Tabel 2.35. KTP Nasional berbasis NIK Tahun 2022-2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buru Selatan, 2024

2.3.2.6. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian indikator pada urusan pemberdayaan masyarakat desa secara umum mencapai 100%, salah satunya persentase pelaksanaan ADD, DD, BHPR, dan bantuan keuangan yang terlaksanakan dengan baik. Capaian indikator lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.36. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

No.	Indikator Kinerja	2021	2022
1.	Jumlah desa Berkembang	NA	31
2.	Peresentase pelaksanaan ADD, DD, BHPR dan bantuan keuangan yang terlaksanan dengan baik	NA	100
3.	Jumlah desa yang melakukan penetapan RPJMDes, MusrenbangDes, RKPDes, dan APBDDes tepat waktu.	NA	81
4.	Jumlah aparatur desa yang terlatih	NA	0
5.	Persentase penggunaan dana desa untuk infrastruktur dan PKTD	NA	40%
6.	Jumlah desa yang memiliki produk unggul	NA	3 Desa

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Buru Selatan, 2023

2.3.2.7. Bidang Urusan Perhubungan

Pada urusan perhubungan, pencapaian kinerja urusan perhubungan mengalami peningkatan pada tahun 2022 ke tahun 2023. Jumlah arus penumpang angkutan umum darat meningkat dari 23.192 orang di tahun 2022 menjadi 25.550 orang di tahun 2023. Begitupun indikator lain yang juga mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2.37. Indikator Kinerja Daerah PerhubunganKabupaten Buru Selatan
Tahun 2021-2023**

No.	Indikator Kinerja Daerah	2021	2022	2023
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	57.044	23.129	15.330
2.	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis	NA	9	9
3.	Persentase layanan angkutan darat (%)	12,59	4	3
4.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	6,04	20,64	19,64
5.	Jumlah arus penumpang angkutan umum darat (orang)	15.548	23.192	25.550
6.	Jumlah arus penumpang angkutan umum kapal laut dan fery (orang)	38.470	18.172	20.436
7.	Jumlah arus penumpang angkutan umum pesawat udara (orang)	3.089	4.263	5.262

Sumber : Dinas Perhubungan Kab.Buru Selatan , 2024

Dalam hal aksesibilitas, di Buru Selatan terdata rasio panjang jalan mengalami penurunan, namun tidak signifikan yakni dari 20,64 km per jumlah kendaraan menjadi 19,64 kmper jumlah kendaraan di tahun 2023.

Tabel 2.38. Aksesibilitas Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja Daerah	2021	2022	2023
1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	6,04	20,64	19,64

Sumber : Dinas Perhubungan Kab.Buru Selatan , 2024

Demikian juga dengan jumlah orang yang terangkut angkutan umum mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023, tapi jumlah barang yang terangkut angkutan umum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya . Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.39. Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja Daerah	2021	2022	2023
1.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang)	57.044	36.450	30.660
2.	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (Ton)	4.899,37	1.356	1.533

Sumber : Dinas Perhubungan Kab.Buru Selatan , 2024

Jumlah barang yang terangkut pada Kabupaten Buru Selatan tercatat meningkat ditahun 2023, salah satunya jumlah barang yang melalui dermaga per tahun sebanyak 17.205 ton ditahun 2022 menjadi 18.109 ton di tahun 2023. Indikator lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.40. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja Daerah	2021	2022	2023
2.	Jumlah barang melalui dermaga per tahun (Ton)	4.568,50	17.205	18.109
4.	Jumlah barang melalui lapangan terbang per tahun (ton)	NA	18.250	17.750
6.	Jumlah barang melalui terminal per tahun (Kg)	312	436,8	NA

Sumber : Dinas Perhubungan Kab.Buru Selatan, 2024

Begitupun dengan penumpang pesawat yang menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 berjumlah 1.359 orang menjadi 4.338 orang di tahun 2022. Data jumlah penumpang pesawat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41. Perkembangan Jumlah Lalu Lintas Penumpang Pesawat Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2022

No.	Uraian	Tahun	
		2021	2022
1.	Datang	1.359	4.338
2.	Pergi	1.730	4.472
Total		3.089	9.810

Sumber : Dinas Perhubungan Kab.Buru Selatan, 2023

2.3.2.8. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Keterbukaan komunikasi dan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Bidang urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Buru Selatan melakukan berbagai upaya untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Berikut merupakan capaian bidang urusan komunikasi dan informatika tahun 2022-2023:

Tabel 2.42. Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023

No.	Indikator	2021	2022	2023
1.	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	14,63	82,70	92,85

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Buru Selatan, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat cakupan layanan telekomunikasi Kabupeten Buru Selatan mengalami kenaikan yang cukup besar walaupun belum mencapai angka 100% dalam kurun waktu satu tahun, yakni tahun 2022-2023.

Alat komunikasi merupakan semua media atau alat yang saling terhubung yang digunakan untuk pertukaran informasi antar individu ataupun kelompok. Salah satu alat komunikasi yang banyak digunakan oleh penduduk di Kabupaten Buru Selatan adalah telepon genggam. Telepon genggam atau biasa disebut dengan *Handphone* ini merupakan alat komunikasi yag berkembang seiring dengan berkembangnya zaman sehingga banyak dimiliki orang-orang saat ini. Berikut Persentase penduduk Kabupaten Buru Selatan yang menggunakan Handphone/ Telepon Genggam.

Tabel 2.43. Persentase penduduk Kabupaten Buru Selatan yang Menggunakan Handphone/Telepon Genggam dan SPBE Tahun 2021-2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1.	Persentase Penduduk yang Menggunakan Handphone	NA	82,00	79,92
2.	SPBE	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Buru Selatan, 2024

Akses internet adalah jalur masuk suatu individual atau kelompok untuk tersambung ke jaringan internet menggunakan terminal komputer, komputer atau perangkat lainnya.Berikut persentase proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Buru Selatan tahun 2022-2023:

Tabel 2.44. Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023

No.	Indikator	2021	2022	2023
1.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	1,28	6,89	51,85

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Buru Selatan, 2024

2.3.2.9. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Koperasi Aktif

Persentase koperasi aktif di Kabupaten Buru Selatan terus mengalami peningkatan dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 yang lumayan signifikan, seperti yang terlihat padatablel berikut.

Tabel 2.45. Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023

No.	Indikator	2021	2022	2023
1.	Persentase Koperasi Aktif	70,60	72,10	99,30

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Buru Selatan, 2024

b. Usah Mikro dan Kecil

Persentase usaha mikro dan kecil di Kabupaten Buru Selatan sebanyak 117% pada tahun 2023, seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.46. Presentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2022-2023

No.	Indikator	2021	2022	2023
1.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	NA	NA	117

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Buru Selatan, 2024

Jumlah koperasi yang mengikuti pembinaan dan pelatihan di Kabupaten Buru Selatan sebanyak 40 koperasi sampai pada tahun 2023, seperti yang terlihat pada tabelberikut.

Tabel 2.47. Capaian Indikator Kinerja Bidang Koperasi dan UKM

No.	Indikator	2021	2022	2023
1.	Jumlah koperasi yang pernah mengikuti pembinaan dan pelatihan	30	40	40
2.	Jumlah koperasi dan UKM penerima bantuan hibah	1 Koperasi dan 1 UKM	7 Koperasi dan 10 UKM	NA
3.	Jumlah produk UKM yang dipromosikan	10	15	NA

4.	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran SDM serta design dan teknologi	12	15	NA

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab.Buru Selatan, 2024

2.3.2.10. Bidang Urusan Penanaman Modal

Adapun jumlah investor di Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2022 sebanyak 593 di tahun 2022 dan sebanyak 524 di tahun 2022, begitupun jumlah investasi dan diikuti oleh rasio daya serap tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48. Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023

No.	Indikator	2021	2022	2023
1.	Jumlah Investor	271	593	524
2.	Nilai Investasi (Rupiah)	65.017.000.100	198.137.765.000	61.664.350.000
3.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	289	1.887	1.370

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Buru Selatan, 2024

2.3.2.11. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Bidang Urusan Kepemudaan bertanggung jawab untuk pengembangan organisasi pemuda dan wirausaha muda. Kabupaten Buru Selatan memiliki beberapa organisasi pemuda aktif dan wirausaha muda yang telah terealisasi dari beberapa jumlah yang telah ditargetkan, berikut persentase organisasi yang aktif dan wirausaha muda di Kabupaten Buru Selatan tahun 2021-2023.

Tabel 2.49. Organisasi Pemuda Aktif dan Wirausaha Muda di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1.	Organisai Pemuda (%) (Target 100%)	87,5	88,24	100
2.	Wirausaha Muda (%) (Target 41,33%)	35,01	31,61	NA

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab.Buru Selatan, 2024

Kabupaten Buru Selatan tidak hanya memiliki indikator kinerja dalam bidang kepemudaan saja, namun juga memiliki indikator kinerja dalam bidang olahraga. Namun di bidang olahraga ini sedikit berbeda dikarenakan ada telah terealisasi penuh sesuai dengan angka yang ditargetkan dan juga ada yang terealisasi dengan belum ditentukannya target. Berikut persentase target dan realisasi dari indikator kinerja bidang olahraga tahun 2021-2023.

Tabel 2.50. Persentase Bidang Olahraga Tahun 2021-2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1.	Cakupan pembinaan Olahraga (%)	100	100	100
2.	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	100	105	NA
3.	Jumlah atlet berprestasi (%)	31	52	NA
4.	Jumlah prestasi olahraga (%)	31	52	NA

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab.Buru Selatan, 2024

2.3.2.12. Bidang Urusan Perpustakaan

Persentase Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2021 mencapai 93 persen dan tidak mengalami peningkatan ditahun 2023. Sedangkan persentase jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat mengalami peningkatan di tahun 2023 yakni sebesar 8 persen dari tahun 2022 yang hanya sebesar 0 persen. Kedepan dapat direncanakan basis data dengan menyediakan sumber buku-buku yang dapat diinformasikan kepada masyarakat tetapi harus berbasis internet, sehingga masyarakat akan mudah mengaksesnya.

Tabel 2.51. Capaian Indikator Bidang Urusan Perpustakaan Tahun 2021-2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%)	0,59	140	69,60
2.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (%)	30,41	93	75,80
3.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	33,33	33,33	80,00

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Buru Selatan, 2024

2.3.2.13. Bidang Urusan Perpustakaan

Bidang urusan kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah. Pengelolaan arsip dinamis maupun statis kewenangan daerah merupakan salah satu urusan kearsipan di daerah. Tabel berikut merupakan rincian data arsip Kabupaten Buru Selatan tahun 2022 dan 2023 :

Tabel 2.52. Capaian Indikator Bidang Urusan Kearsipan Tahun 2021-2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1.	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (%)	100	100	100

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Kab. Buru Selatan, 2024

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

2.3.3.1. Bidang Layanan Kelautan Dan Perikanan

Produksi perikanan adalah keseluruhan hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan ataupun hewan air lainnya yang diambil dari sumber perikanan alami maupun hasil budidaya. Pada Kabupaten Buru Selatan produksi perikanan dilakukan dengan keduanya yaitu produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Berikut jumlah produksi perikanan Kabupaten Buru Selatan tahun 2021-2023 :

Tabel 2.53. Produksi Perikanan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1.	Produksi perikanan tangkap (ton)	12.086,2	13.103,9	12.956,1
2.	Produksi perikanan budidaya (ton)	3,2	1	1,241

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Buru Selatan, 2024

Mendasar dari produksi perikanan, Kabupaten Buru Selatan juga mengukur nilai tukar nelayan. Nilai tukar nelayan merupakan alat ukur untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil tangkap untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga. Berikut nilai tukar nelayan dan jumlah konsumsi ikan di Kabupaten Buru Selatan tahun 2021-2023.

Tabel 2.54. Nilai Tukar Nelayan dan Jumlah Konsumsi Ikan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1.	Nilai Tukar Nelayan	117	120	122
2.	Jumlah Konsumsi ikan (Ton)	3.171	5.153	NA

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Buru Selatan, 2024

Selain Nilai Tukar Nelayan, juga terdapat cakupan bina kelompok nelayan yang terealisasi sebesar 80% pada tahun 2023. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55. Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1.	Bina Kelompok Nelayan	74	80	80

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Buru Selatan, 2024

2.3.3.2. Urusan Bidang Pertanian

Pada urusan bidang pertanian, Kabupaten Buru Selatan mencapai indikator sebesar 100% di tahun 2023. Indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.56. Capaian Indikator Bidang Pertanian Tahun 2021 -2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1.	Nilai Tukar Petani (NTP) (%)	NA	140,99	104,85
2.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	NA	35,73	36,35
3.	Peta lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	NA	NA	Ada
4.	Cakupan bina kelompok petani (%)	NA	NA	17,78
5.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	NA	3,42	5,56
6.	Luas irigasi dalam kondisi baik (%)	NA	100	100
7.	Tersedianya pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan usaha tani (km)	NA	NA	14,4

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Buru Selatan, 2024

2.3.3.3. Bidang Urusan Pariwisata

Bidang urusan Pariwisata Kabupaten Buru Selatan bertanggungjawab atas 2 sub urusan yaitu urusan kebudayaan dan urusan pariwisata. Pada urusan kebudayaan terdapat 3 indikator yang telah terealisasi di tahun 2021-2023 yaitu:

- Penyelenggaraan festival seni dan budaya,
- Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan,
- Cagar budaya yang dikelola secara terpadu. Berikut tabel capaian keempat indikator kinerja urusan kebudayaan:

Tabel 2.57. Capaian Urusan Kebudayaan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	2021	2022	2023
1.	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya (Event)	1	2	3
2.	Benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	NA	25	25
3.	Jumlah Cagar Budaya yang di Kelola Secara Terpadu (BCB)	5	7	13

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Buru Selatan, 2024

Adapun capaian kinerja urusan pariwisata terdiri dari 5 indikator, yaitu jumlah kunjungan wisatawan (%), lama kunjungan wisatawan, jumlah pengembangan obyek wisata unggulan, PAD sektor pariwisata, dan jumlah SDM profesional bidang pariwisata. Capaian indikator tersebut selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.58. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

No.	Indikator Kinerja	2021	2022	2023
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan (%)	17,334	38	111,07
2.	Lama Kunjungan Wisatawan (hari)	5	5	5
3.	Jumlah pengembangan obyek wisata unggulan (destinasi)	1	2	2
4.	PAD Sektor Pariwisata (%)	NA	3,61	19,94
5.	Jumlah SDM Profesional Bidang Pariwisata (orang)	25	19	5

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Buru Selatan, 2024

2.3.3.4. Bidang Urusan Perdagangan

Untuk urusan perdagangan, terdapat 3 indikator kinerja. Indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.59. Capaian Indikator Bidang Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022 – 2023

No.	Indikator Kinerja	2021	2022	2023
1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	NA	6,57	NA
2.	Ekspor Bersih Perdagangan (Poin)	NA	NA	NA
3.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	NA	21,19	NA

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Buru Selatan, 2024

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional untuk kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dapat diukur dari tingkat produktivitas per kategori lapangan usaha.

Tabel 2.60. Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023

Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berdasarkan jenis pengeluaran	2021	2022	2023
Makanan (Rp)	423.318	NA	455.477
Non Makan (Rp)	329.762	NA	418.551
Total Pengeluaran rata-rata per kapita (Rp)	752.081	NA	874.028
Presentase Makanan (%)	56,29	NA	52,11
Presentase Non Makanan (%)	43,71	NA	47,89

Sumber : Buru Selatan dalam Angka 2024

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah/infrastruktur khususnya pada bidang perhubungan merupakan hal yang penting dalam rangka mempermudah konektivitas antar wilayah, baik antar kecamatan, kecamatan dan kabupaten maupun kabupaten dan provinsi. Berikut indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022-2023.

Tabel 2.61. Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja Daerah	Capaian/Realisasi		
		2021	2022	2023
Perhubungan				
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	57.044	23.129	15.330
2.	Rasio ijin trayek	NA	NA	NA
3.	Jumlah uji kir angkutan umum (%)	86	NA	NA
4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	NA	9	9
5.	Persentase layanan angkutan darat (%)	12,59	4	3
6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	26	NA	NA
7.	Pemasangan Rambu-rambu	NA	NA	90
8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	6,04	20,56	19,64
9.	Jumlah arus penumpang angkutan umum Darat (orang)	15.548	23.192	25.550
10.	Jumlah arus penumpang angkutan umum Kapal Laut dan Very (orang)	38.470	18.172	20.436
11.	Jumlah arus penumpang angkutan umum Pesawat Udara (Orang)	3.089	4.263	5.262
Aksesibilitas Daerah				
1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	6,04	20,56	19,64
Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum				

1.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang)	57.044	45.627	51.248
2.	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (Ton)	4.899,37	1.356	1.533
Jumlah barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun				
1.	Jumlah barang melalui dermaga per tahun (Ton)	4.568,5	17.205	18.109
2.	Jumlah barang melalui lapangan terbang per tahun (ton)	3.089	18.250	17.750
3.	Jumlah barang melalui terminal per tahun (Kg)	312	NA	NA

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Buru Selatan, 2024

a. Ketersediaan Daya Listrik

Kebutuhan akan listrik di Kabupaten Buru Selatan sangatlah penting bagi masyarakat karena sebagai penunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Sampai dengan tahun 2022 pasokan listrik yang ada di wilayah Kabupaten Buru Selatan, pada umumnya dipasok oleh cabang PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ulp Namrole, Kp Wamsisi, Kp. Leksula, Kp Ambalau.

Tabel 2.62. Daya Terpasang dan Distribusi Listrik di Kab. Buru Selatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Daya Terpasang Tahun 2023 (Kw)
1.	Leksula dan Fena Fafan	1.070
2.	Namrole	7.650
3.	Waesama	1.750
4.	Ambalau	637
Jumlah		11.107 kW

Sumber : PLN ULP Namrole, 2024

b. Hotel dan Restoran

Untuk hotel dan restoran di Buru Selatan tergambar dalam tabel 2.66, dimana jumlah penginapan/hotel sebanyak 24 unit di tahun 2023 dan 1 unit hotel berbintang.

Tabel 2.63. Capaian Indikator Fasilitas Hotel dan Restorandi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022-2023

No.	Indikator Kinerja	Capaian/Realisasi	
		2022	2023
1.	Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran (Unit)	16	19
2.	Jenis Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel (Unit)	NA	24
3.	Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Berbintang (Unit)	1	1

4.	Jumlah dan Macam Pajak Daerah (Jenis)	9	23
5.	Jumlah dan Macam Pajak Retribusi	NA	4
6.	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha (Buah)	5	22

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Buru Selatan, 2024

c. Fasilitas Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank

Fasilitas perbankan dan lembaga keuangan non bank di Kabupaten Buru Selatan terdata sebanyak 5 unit, dengan rincian bank cabang sebanyak 4 unit dan perusahaan asuransi sebanyak 1 unit. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64. Capaian Indikator Fasilitas Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	2021	2022	2023
1.	Jenis dan Jumlah Bank Cabang (Unit)	4 Unit	4 Unit	4 Unit
2.	Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang (Unit)	4 Unit	1 Unit	1 Unit

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Buru Selatan, 2024

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1. Lama Proses Perijinan

Pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru Selatan beserta lama pembuatannya sebagai berikut.

Tabel 2.65. Jenis-jenis Perizinan dan Lama Proses Pembuatan di Kabupaten Buru Selatan tahun 2021-2022

No.	Jenis Perizinan	Lama Mengurus	Jumlah Persyaratan	Biaya Resmi	Keterangan
1.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	-	-	-	Sudah tidak berlaku semenjak dikeluarkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
2.	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)	-	-	-	Dikeluarkan lewat sistem OSS
3.	Surat Izin Usaha Perusahaan	-	-	-	Dikeluarkan lewat sistem OSS
4.	Izin Trayek	-	-	-	Dikeluarkan lewat sistem OSS
5.	Izin Operasi Angkutan	-	-	-	Dikeluarkan lewat sistem OSS
6.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	-	-	-	Sudah tidak berlaku semenjak dikeluarkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

7.	Izin Mendirikan Bangunan	5 hari	11		Biaya tergantung perhitungan jenis dan luas bangunan
8.	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (SIUJKN)	-	-	-	Dikeluarkan oleh system OSS tergantung jenis kegiatan dan resiko
9.	Izin Usaha Industri	-	-	-	Dikeluarkan oleh system OSS tergantung jenis kegiatan dan resiko
10.	Tanda Daftar Industri (TDI)	-	-	-	Dikeluarkan oleh system OSS tergantung jenis kegiatan dan resiko
11.	SIUP MB (Minuman Beralkohol)	-	-	-	Dikeluarkan oleh system OSS tergantung jenis kegiatan dan resiko
12.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	-	-	-	Dikeluarkan oleh system OSS tergantung jenis kegiatan dan resiko
13.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	-	-	Sudah tidak berlaku
14.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	-	-	-	Diajukan lewat PB UMKU sistem OSS
15.	Surat Izin Praktek Dokter (SIPD)	5 hari	9	Rp.200.000	-
16.	Izin Apotek	5 hari	5	Rp.600.000	-
17.	Izin Depot Air Isi Ulang			Rp.200.000	Dikeluarkan oleh sistem OSS
18.	Izin Kosmetik		-	Rp.300.000	Dikeluarkan oleh sistem OSS
19.	Izin Praktek Bidan	5 hari	9	Rp.150.000	
20.	Izin Salon Kecantikan	-	-	Rp.300.000	Dikeluarkan oleh sistem OSS tergantung jenis kegiatan dan resiko
21.	Izin took obat	5 hari	5	Rp.300.000	

Sumber : Dinas Penanaman Modal Kab. Buru Selatan, 2023

2.4.3.2. Angka Kriminalitas

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Buru Selatan, jumlah perkara pidana yang dilaporkan di Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2023 sebanyak 119 kasus, perkara pidana yang diselesaikan sebanyak 35 kasus. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.66. Angka Kriminalitas Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Jumlah perkara pidana yang dilaporkan	NA	119 Kasus
2.	Jumlah perkara pidana yang diselesaikan	NA	35 Kasus

Sumber : Polres Kab. Buru Selatan, 2024

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan potensi Sumber Daya Manusia di Kabupaten Buru Selatan. Berikut persentase tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Buru Selatan berumur 15 tahun ke atas.

Tabel 2.67. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2023

Karakteristik	Tidak Punya Ijazah SD	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat/Ke Atas
Jenis Kelamin				
Laki-laki	13,33	7,05	8,72	6,51
Perempuan	8,63	6,40	8,06	5,52
Tingkat Pendidikan				
40 Persen Terbawah	13,81	7,70	9,55	8,20
40 Persen Tengah	12,51	9,28	10,19	7,21
40 Persen Teratas	19,10	11,92	12,22	8,20
Buru Selatan	8,96	5,40	6,09	4,73

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buru Selatan, Tahun 2023

2.5. EVALUASI RKPD KABUPATEN BURU SELATAN

Tabel 2.68. Evaluasi RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2023

No.	Urusan	Anggaran APBD 2023 Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi Anggaran Triwulan I-IV	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
				Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
1	Dinas Pendidikan	173.362.387.900	148.640.337.039	98,96	ST	85,74	T
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	88.751.153.700	70.084.181.677	97,20	ST	78,97	T
3	Rumah Sakit Umum Daerah	21.352.380.000	20.411.724.025	97,54	ST	95,59	ST

4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	56.783.045.153	45.237.331.318	90,00	T	79,67	T
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.819.694.000	6.647.210.024	94,69	ST	97,47	ST
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2.841.681.000	2.804.342.547	97,67	ST	98,69	ST
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.419.698.000	6.921.283.461	100,00	ST	93,28	ST
8	Dinas Sosial	3.822.875.800	3.821.730.259	100,00	ST	99,97	ST
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
9	Dinas Ketahanan Pangan	3.942.397.000	3.929.749.226	100,00	ST	99,68	ST
10	Dinas Lingkungan Hidup	9.958.345.300	9.682.274.846	100,00	ST	97,23	ST
11	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	3.058.364.000	3.050.220.459	100,00	ST	99,73	ST
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.873.042.000	3.864.497.527	100,00	ST	99,78	ST
13	Dinas Perhubungan	32.080.055.377	27.542.818.043	93,27	ST	85,86	T
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.775.392.000	2.769.342.576	98,96	ST	99,78	ST
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	8.092.109.200	8.032.164.254	93,94	ST	99,26	ST
16	Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.926.018.000	3.888.950.378	94,43	ST	99,06	ST
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.553.791.000	3.489.071.354	95,94	ST	98,18	ST
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.246.728.510	2.231.821.429	99,95	ST	99,34	ST
Urusan Pilihan							
19	Dinas Perikanan	4.824.309.515	4.779.091.171	98,99	ST	99,06	ST
20	Dinas Pariwisata	3.435.223.000	3.213.011.863	93,68	ST	93,53	ST
21	Dinas Pertanian	8.221.566.640	8.160.752.263	99,37	ST	99,26	ST
22	Dinas Perdagangan	4.482.878.260	4.469.309.474	99,75	ST	99,70	ST
Urusan Fungsi Penunjang Urusan							
23	Inspektorat Daerah	4.065.099.000	4.000.381.661	97,12	SR	98,41	SR
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.267.255.000	10.167.809.733	90,81	ST	99,03	ST

25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	9.736.251.533	9.689.438.962	100,00	ST	99,52	ST
26	Badan Pendapatan Daerah	3.903.823.000	3.838.867.073	92,68	ST	98,34	ST
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.686.646.000	9.638.689.160	100,00	ST	99,50	ST
Urusan Fungsi Pendukung							
28	Sekretariat Daerah	20.169.074.000	19.974.631.532	96,76	ST	99,04	ST
29	Bagian Pemerintahan	1.992.197.000	1.991.189.900	100,00	ST	99,95	ST
30	Bagian Perekonomian dan SDA	1.003.600.000	1.001.197.000	100,00	ST	99,76	ST
31	Bagian Kesejahteraan Rakyat	11.023.100.000	10.787.290.000	96,76	ST	97,86	ST
32	Bagian Hukum	969.000.000	937.060.140	97,74	ST	96,70	ST
33	Bagian Umum	13.898.800.000	13.841.608.047	99,86	ST	99,59	ST
34	Bagian Organisasi Tata Laksana	983.810.000	959.691.715	97,86	ST	97,55	ST
35	Bagian Humas	1.167.000.000	1.166.424.256	93,75	ST	99,95	ST
36	Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	1.168.400.000	1.166.579.000	100,00	ST	99,84	ST
37	Bagian Administrasi Pembangunan	931.000.000	930.967.250	100,00	ST	100,00	ST
38	Sekretariat DPRD	32.617.173.000	32.505.503.238	97,94	ST	99,66	ST
Urusan Pemerintahan Umum							
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.415.945.200	5.588.810.570	87,89	T	66,41	SR
Urusan Kewilayahan							
40	Kecamatan Namrole	1.692.132.800	1.690.428.317	100,00	ST	99,90	ST
41	Kecamatan Leksula	2.904.379.000	2.889.362.117	100,00	ST	99,48	ST
42	Kecamatan Waesma	1.588.582.000	1.583.064.422	100,00	ST	99,65	ST
43	Kecamatan Ambalau	1.460.681.000	667.438.852	100,00	ST	45,69	ST
44	Kecamatan Kepala Madan	1.816.254.000	1.812.845.403	100,00	ST	99,81	ST
45	Kecamatan Fena Fafan	1.502.234.000	1.500.577.890	97,78	ST	99,89	ST

Sumber : Matriks Evaluasi RKPD Tahun 2023

Keterangan : ST : Sangat Tinggi
T : Tinggi

S : Sedang
R : Rendah

SR : Sangat Rendah

2.6. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan gambaran umum serta evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan harus ditangani Pemerintah Kabupaten Buru Selatan sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.69. Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Buru Selatan

No.	Urusan	Permasalahan
Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1.	Pendidikan	a. Penyebaran guru belum merata pada sebagian besar sekolah di Kabupaten Buru Selatan khususnya di wilayah pedalaman dikarenakan belum adanya media Informasi, akses jalan, dan tidak adanya semangat pengabdian guru; b. Belum terpenuhinya standar sarana prasarana pendidikan dasar (SD dan SMP) yang sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), ruang kelas, Perpustakaan, TIK, lab Komputer; c. Sumber daya tenaga pengajar masih belum semuanya berkualitas; d. Masih rendahnya mutu siswa pada jenjang SD, SMP; e. Belum optimalnya pengembangan Pendidikan anak usia dini (PAUD);
2.	Kesehatan	a. Pengendalian stunting belum optimal b. Masih terdapat kasus kematian ibu melahirkan dan bayi (AKI/AKB) c. Belum optimal pelayanan terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa d. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum optimal e. Belum optimal pelayanan terhadap penyandang disabilitas dan lansia f. Minimnya sarana dan prasarana transfusi darah g. Masih Tingginya Angka Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular yang terjadi di Masyarakat h. Belum Optimal Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas di daerah pesisir i. Belum Optimal Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit j. Belum adanya sarana transportasi umum sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk menjangkau RSUD k. Masih tingginya tenaga medis yang tidak menetap pada lokasi yang ditugaskan l. Belum optimalnya penanganan dan pencegahan stunting karena : • Koordinasi lintas sektor yang masih minim/lemah • Alokasi anggaran untuk stunting masih sangat terbatas • Masih terdapat daerah yang sulit untuk dijangkau, serta kultur masyarakatnya (terkait Adat) j. Kesadaran /pengetahuan masyarakat terkait stunting masih rendah
3.	Pekerjaan Umum	a. Belum Optimalnya Pembangunan Jalan dalam kota, antar kecamatan, wilayah berbasis ekonomi dan wilayah permukiman

		adat terpencil b. Belum optimalnya pelayanan dan pemeliharaan infrastruktur air bersih dan sanitasi bagi masyarakat c. Terbatasnya aksesibilitas transportasi pada wilayah terpencil. Terbatasnya sarana prasarana jalan dan jembatan.
4.	Perumahan	a. Kurangnya sumber daya manusia dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan dinas sarana dan prasarana pendukung Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman b. Minimnya sarana pendukung Dinas sehingga mempengaruhi kinerja aparatur dan aktifitas pelayanan publik c. Dukungan kebijakan bidang perumahan dan kawasan pemukiman belum memadai d. Masih banyak rumah tidak layak huni e. Masih banyak pemukiman kumuh f. Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan masih belum layak atau kurang maksimal g. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara ruang terbuka hijau h. Kurangnya pemahaman masyarakat dan cara penanggulangan bahaya kebakaran sehingga mengakibatkan kerugian material maupun jiwa i. Ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran yang belum memadai
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	a. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Perda dan Perbup b. Kurangnya sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya anggota LINMAS d. Luasnya wilayah kerja dan penduduk yang heterogen e. Rendahnya tingkat pendidikan aparatur
		f. Belum optimalnya Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat
6.	Sosial	a. Belum maksimalnya prosedur Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar bidang sosial kepada Penyandang Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia Terlantar ke dalam penganggaran Dinas
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		
1.	Tenaga Kerja	a. Kurangnya tenaga kerja yang terampil/ kurangnya kompetensi tenaga kerja.
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Kemiskinan b. Tingginya pengaruh sistem sosial dan budaya masyarakat adat c. Rendahnya pendidikan dan pelatihan perempuan di berbagai bidang (politik, pemerintahan dan swasta serta ekonomi) d. Rendahnya Partisipasi Angka Kerja Perempuan e. Kurangnya pemenuhan hak anak termasuk anak yang berkebutuhankhusus
3.	Lingkungan Hidup	a. Kurangnya kebersamaan persepsi terhadap pelaksanaan kewenangan akibat belum memadainya pedoman dan petunjuk pelaksanaan b. Belum optimalnya keterpaduan pelaksanaan tugas c. Keterbatasan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional d. Belum adanya kerjasama antar unit organisasi di Lingkup Kabupaten Buru Selatan

		e. Keterbatasan daya yang akurat f. Kurang tersedianya armada (truck) pengangkutan sampah sehingga mobilitas pengangkutan sampah menjadi terbatas yang g. menyebabkan sering terjadinya penumpukan di beberapa titik TPS (Tempat Pembuangan Sampah) h. Kurangnya Tingkat kesadaran masyarakat dalam membuang sampah terkadang masyarakat melakukan pembuangan sampah pada tempat yang tidak terdapat bak sampah
4.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. Kemampuan sumber daya manusia dan pelaksanaan teknis yang tidak merata b. Upaya kearah terintegrasinya peraturan antara sektor dalam pemanfaatan data dan dokumen kependudukan masih perlu ditingkatkan c. Masih rendahnya tingkat pemahaman keseluruhan masyarakat dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan d. Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya
5.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	a. Desa-desanya masih di jabat oleh pejabat kepala Desa bukan kepala Desa Defenitif b. Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa Masih Kurang c. Kurangnya bimtek terhdap aparaturnya Pemerintahan Desa dan BPD yang disebabkan karena Minimnya Anggaran d. Kualitas Sumber Daya Manusia di tingkat desa yang Minim e. Belum adanya Administrasi Desa tentang tapal batas desa (peta desa) f. Belum adanya Profil yang dimiliki oleh Desa g. Kurangnya Koordinasi antara Desa, Kecamatan dan Pihak Pemerintah Daerah terhadap kelembagaan Masyarakat Desa h. Kurangnya peran aktif Masyarakat Desa dalam lembaga kemasyarakatan
		i. BUMDES yang dibentuk oleh Desa tidak sesuai dengan potensi Desa yang dimiliki. j. Tidak adanya data tentang Potensi Desa k. Keterbatasan SDM dalam mengelolah BUMDES
6.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Kurangnya Advokasi pemanfaatan data pembangunan keluarga di lintas sektor b. Kurangnya edukasi dari instansi terkait lintas sektor tentang program KB c. Terbatasnya sarana penunjang penyuluhan KB d. Belum adanya pelatihan khusus tenaga pelaksana pelayanan KB di lapangan (Bidan dan Dokter) e. Kualitas tenaga PPKBD masih kurang dikarenakan belum dilatih sehingga proses penggerakan program di bidang KB khususnya tidak maksimal f. Terbatasnya sarana penyimpanan Alokasi di Faskes
7.	Perhubungan	a. Masih belum efisiennya pergerakan barang maupun penumpang antar wilayah b. Belum optimalnya konektivitas daerah yang mendukung peningkatan dan pemerataan perekonomian Kabupaten Buru Selatan
8.	Komunikasi dan Informatika	a. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan b. Kebutuhan akan ketersediaan infrastruktur serta keterbatasan SDM yang membidangi pengembangan teknologi informasi dan

		komunikasi di kabupaten Buru Selatan mengingat keterbatasan anggaran yang diterima oleh Dinas c. Kebutuhan akan pengumpulan data (statistik) masih terkendala dengan kebutuhan akan infrastruktur dan SDM serta belum adanya integrasi data antar OPD. d. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan e. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan
9.	Koperasi dan UKM	a. Keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga tidak tercover semua koperasi yang tersebar di 6 kecamatan untuk dilakukan pendataan dan pengawasan b. Penambahan Pos anggaran untuk kegiatan diklat perkoperasian dan kewirausahaan dalam pengembangan SDM bagi aparatur c. Pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi serta usaha mikro dan kecil belum optimal d. Belum meratanya penerapan standar produk koperasi serta usaha mikro dan kecil
10.	Penanaman Modal	a. Kurangnya Sumber Daya Manusia berupa Sarjana IT, Sarjana Bahasa Inggris dan Sarjana Desain Grafis b. Untuk Sarana dan Prasarana berupa belum adanya Mobil Operasional Layanan Perizinan, laptop dan Komputer/PC, Meubeler Meja Eselon IV, Kamera dan Drone serta Tempat Parkir c. Anggaran pengembangan dan Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kab. Buru Selatan
11.	Kepemudaan dan Olahraga	a. Terbatasnya sarana prasarana olahraga yang representatif; b. Kurangnya Pembinaan olahraga berbakat c. Masih belum optimalnya Penguatan kelembagaan kepemudaan
12.	Perpustakaan dan Arsip	a. Kurangnya jumlah pengunjung perpustakaan yang disebabkan penggunaan media sosial (Internet) sebagai bahan pembelajaran. b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) kearsipan
Urusan Pilihan		
1.	Perikanan	a. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian sumber daya dan perikanan, dimana masih banyak ditemukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan bahan yang dilarang; b. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Sektor Perikanan Baik Melalui Kegiatan Bimbingan Teknis Maupun Pelatihan; c. Kurangnya sarana prasana budidaya perikanan; d. Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur perikanan untuk pendapatan daerah. e. Belum optimalnya Pengembangan infrastruktur untuk pasar lelang.
2.	Pertanian	a. Masih rendahnya tingkat produktivitas komoditi pertanian; b. Masih kurangnya regulasi dan sarana prasarana mendukung pelaksanaan pengembangan teknologi pertanian c. Sistem pengolahan ternak belum memenuhi standar pengolahan yang baik d. Belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular (PHMS) serta zoonosis e. Masih rendahnya mutu hasil panen mengakibatkan hasil panen belum mampu bersaing dengan produk pertanian dari luar f. Belum optimalnya fungsi kelompok tani sebagai wahana kerja sama dan unit produksi

3.	Pariwisata	a. Belum optimalnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pariwisata b. Belum lengkapnya ketersediaan SDM sesuai dengan disiplin ilmu terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Buru Selatan c. Belum optimalnya kerjasama kemitraan antar stakeholder di sektor pariwisata d. Belum memadainya basis data (database) yang dimiliki dalam rangka menunjang pengembangan pariwisata dan pelayanan di Kabupaten Buru Selatan e. Belum optimalnya strategi promosi/pemasaran pariwisata serta pemanfaatan media massa (cetak dan elektronik) sebagai sarana promosi pariwisata nasional f. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang pariwisata g. Masih kurangnya kerja sama dalam pengembangan kepariwisataan masyarakat tentang kepariwisataan dalam lingkungan kawasan daerah wisata h. Lokasi/ medan yang sulit
4.	Perindustrian	a. Jumlah bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha tidak seimbang dengan jumlah pelaku usaha sehingga diperlukan adanya bantuan yang maksimal sesuai jumlah pelaku usaha yang ada b. Belum optimalnya pengelolaan produk pasca produksi/peningkatan kualitas mutu produk
5.	Perdagangan	a. Fasilitas jumlah kios/toko yang disiapkan oleh pemerintah belum dapat dimanfaatkan secara maksimal b. Tera dan tera ulang belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Penera dan Sarana Prasarana Tera dan Tera Ulang belum ada
		c. Pelaksanaan pemantauan kebutuhan pokok dan pengawasan barang kadaluarsa dalam rangka perlindungan terhadap konsumen belum dapat dilaksanakan secara maksimal disebabkan adanya keterbatasan anggaran
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		
1.	Pertanahan	a. Terhambatnya proses penerbitan sertifikasi aset tanah pemda akibat dari tidak lengkapnya dokumen pengadaan tanah pemda
2.	Statistik	a. Belum optimalnya sistem satu data b. Rendahnya SDM pengelola statistik sektoral serta pembinaan pengelolaannya c. Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan statistik sektoral sehingga berdampak pada rendahnya data terolah spasial dan aspaspial d. Belum optimalnya layanan data dan informasi statistik sektoral disebabkan belum terbangunnya pemahaman perangkat daerah dan masyarakat sebagai pengguna data terkait tugas pokok, fungsi serta peran wali data sektoral pemerintah Kabupaten Buru Selatan
3.	Pengawasan	a. Terbatasnya jumlah tenaga pemeriksa yang telah mengikuti jenjang pendidikan sebagai auditor b. Terbatasnya jumlah dan kompetensi tenaga administrasi guna mendukung kelancaran tugas pengawasan, sehingga dalam penyelesaian pekerjaan dikerjakan oleh masing-masing Pejabat Pengawasan Pemerintah dan Auditor c. Keterbatasan Sarana dan Prasarana pengawasan

		d. Disiplin dan kinerja dalam pembuatan Laporan Pemeriksaan (LHP) belum optimal, hal ini terlihat dari sering terlambatnya penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai Rencana Penerbitan Laporan (RPL) dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), terlambatnya penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sangat dipengaruhi oleh banyaknya penugasan di luar PKPT terutama menangani Kasus Pengaduan yang harus segera ditindaklanjuti sehingga mengakibatkan terlambatnya Auditor dalam menyusun dan melaporkan hasil pemeriksaan
4.	Perencanaan	a. Belum optimalnya kelengkapan data dan informasi pembangunan daerah b. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan c. Optimalisasi perencanaan terintegrasi masih belum terlaksana secara komprehensif dengan dukungan <i>software</i> serta SDM perencana yang berkualitas
5.	Keuangan	a. Perubahan regulasi dan perkembangan teknologi informasi yang cepat dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah b. Terbatasnya Pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah
6.	Kepegawaian	a. Mekanisme kenaikan pangkat bagi pegawai yang belum tertata dengan baik; b. Pengisian Jabatan masih belum dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip profesionalisme; c. Mekanisme Pengembangan Karir PNS guna mendorong profesionalitas PNS belum berjalan efektif karena kesenjangan kualifikasi, dan kompetensi pegawai sangat besar;
		d. Pola karir bagi PNS belum jelas dan masih belum ada komitmen yang kuat dari para stakeholder untuk melaksanakan pola karir sesuai ketentuan; e. Pengisian Jabatan belum memperhatikan kualifikasi pendidikan, spesialisasi keilmuan dan kompetensi; f. Banyak PNS yang belum memahami kewenangan dalam menegakkan disiplin; g. Belum optimalnya Peningkatan kesejahteraan ASN melalui Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
7.	Penelitian dan Pengembangan	a. Persentase hasil riset dan IPTEK yang diterapkan belum optimal
8.	Penanggulangan Bencana Daerah	a. Belum Optimalnya Pembangunan sarana mitigasi untuk mengurangi resiko terjadinya bencana alam bagi keamanan masyarakat
9.	Fungsi Lainnya	a. Masuknya perilaku sosial dan budaya luar yang negatif mengaburkan nilai budaya lokal dan kearifan lokal b. Belum optimalnya pengendalian intern pemerintahan c. Rentang kendali dan pelayanan publik belum optimal d. Munculnya berbagai ancaman serta gangguan terhadap ketentraman dalam masyarakat sehingga menghambat pembangunan di masyarakat yang berdampak pada potensi kerawanan di masyarakat e. Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah f. Belum optimalnya strukturisasi organisasi pemerintah daerah yang

		tepat fungsi dan tepat ukuran

2.7. REALISASI DAN TARGET PENERAPAN SPM

Realisasi SPM Tahun 2024 dan target penerapan SPM Tahun 2025 yang terdiri dari enam urusan, yaitu urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaam umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan urusan bidang sosial. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.70 Realisasi SPM 2024 dan Target SPM 2025

No.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Realisasi 2023 (Rp.)	Target 2024 (Rp.)	Pagu Indikatif Tahun 2025 (Rp.)
I.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.620.094.060	8.711.577.000	10.398.610.000
A.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.620.094.060	8.711.577.000	6.142.577.000
1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	762.446.000	4.455.544.000	1.886.544.000
1.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	-	2.569.000.000	2.569.000.000
1.2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	250.000.000	300.000.000	300.000.000
1.3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-	234.800.000	234.800.000
1.4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	327.984.000	259.692.000	259.692.000
1.5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	184.482.000	268.318.000	268.318.000
1.6	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	265.860.000	265.860.000
1.7	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	-	230.874.000	230.874.000
1.8	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-	327.000.000	327.000.000
2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	648.504.000	3.919.197.000	3.919.197.000
2.1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	124.988.000	56.925.000	56.925.000
2.2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	162.767.000	162.767.000
2.3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	274.951.000	211.100.000	211.100.000
2.4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	248.565.000	239.050.000	239.050.000
2.5	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	172.532.000	172.532.000
2.6	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	-	209.940.000	209.940.000
2.7	Pembangunan Ruang Kelas Baru	-	2.645.483.000	2.645.483.000
2.8	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-	221.400.000	221.400.000
3.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	209.144.060	336.836.000	336.836.000
3.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	117.657.500	150.000.000	150.000.000
3.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	-	75.000.000	75.000.000

3.3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	91.486.560	111.836.000	111.836.000
II.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	34.400.000	1.029.753.000	1.029.753.000
A.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	34.400.000	1.029.753.000	1.029.753.000
1.	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.400.000	1.029.753.000	1.029.753.000
1.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	34.400.000	789.733.000	789.733.000
1.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	18.500.000	18.500.000
1.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	42.500.000	42.500.000
1.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	-	29.000.000	29.000.000
1.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	-	13.000.000	13.000.000
1.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	81.460.000	81.460.000
1.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	55.560.000	55.560.000
III.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.031.320.500	809.170.000	809.170.000
A.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	350.000.000	204.720.000	204.720.000
1.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000	204.720.000	204.720.000
1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	350.000.000	204.720.000	204.720.000
B.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	681.320.500	604.450.000	604.450.000
1.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	681.320.500	604.450.000	604.450.000
1.2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	681.320.500	604.450.000	604.450.000
IV.	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.338.000	76.206.000	76.206.000
A.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	42.338.000	76.206.000	76.206.000
1.	Kegiatan Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	42.338.000	76.206.000	76.206.000
1.1	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	42.338.000	76.206.000	76.206.000
V.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	538.252.000	469.397.000	584.757.000
A.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	426.400.000	405.000.000	405.000.000
1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	426.400.000	405.000.000	405.000.000
1.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	426.400.000	405.000.000	405.000.000

B.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	15.158.000	15.516.000	15.516.000
1.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.158.000	15.516.000	15.516.000
1.1	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	15.158.000	15.516.000	15.516.000
C.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	96.694.000	48.881.000	164.241.000
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	96.694.000	48.881.000	48.881.000
1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	96.694.000	48.881.000	48.881.000
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	55.504.000	55.665.000	55.665.000
2.6	Penyusunan Rencana Kontijensi	55.504.000	55.665.000	55.665.000
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	95.883.000	59.695.000	59.695.000
3.1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	95.883.000	59.695.000	59.695.000
VI.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	87.990.000	83.140.000	83.140.000
A.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	87.990.000	48.140.000	48.140.000
1.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	87.990.000	48.140.000	48.140.000
1.1	Pemberian Layanan Rujukan	87.990.000	48.140.000	48.140.000
B.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	35.000.000	35.000.000
1.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	35.000.000	35.000.000
1.1	Penyediaan Makanan	-	35.000.000	35.000.000
TOTAL				12.981.636.000

BAB III
KERANGKA
EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN
DAERAH

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi Nasional dan Regional dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi ke depan. Secara lebih rinci, kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran mengenai kondisi dan proyeksi ekonomi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Gambaran dan perkiraan ekonomi beserta indikator-indikatornya menjadi dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi dan selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2025 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, khususnya terkait dengan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara garis besar, bab ini memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang menjelaskan tentang perkembangan ekonomi nasional, kondisi ekonomi Maluku, serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan RKPD tahun 2025. Selanjutnya dijelaskan pula arah kebijakan keuangan daerah yang memuat proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah dari segi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah perlu dilakukan telaah terhadap kondisi perekonomian berdasarkan perkembangan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Maluku yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi Kabupaten Buru Selatan. Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi global dan domestik beberapa tahun serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan, khususnya untuk tahun 2024. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2025 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan dalam RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025.

3.1.1. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan pada 2024 sebesar 5,2 persen, sedangkan angka inflasi 2,8 persen. Sementara nilai tukar rupiah terhadap USD diperkirakan sebesar Rp.15.000/US\$. Hal itu diperoleh dari paparan asumsi dasar makro tahun 2024 yang telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR RI. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh beberapa lembaga

seperti *World Bank* memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,9 persen, ADB dan IMF sebesar 5 persen, dan OECD sebesar 5,2 persen.

Dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,2 persen diperlukan investasi yang diperoleh dari berbagai pelaku ekonomi dengan kisaran 6.900 Triliun. Kebutuhan investasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat diperoleh dari investasi pemerintah, perbankan, pasar modal, *capital expenditure* BUMN, penanaman modal, dan internal pendanaan korporasi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan *outlook* perekonomian global yang diproyeksikan sebesar 2,9 persen turun 0,1 persen dari proyeksi tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan laporan dari *World Economic Outlook* (WEO) yang diterbitkan oleh IMF pada 10 Oktober 2023. Secara garis besar proyeksi perekonomian Indonesia tahun 2024 masih bernilai positif. Namun, kondisi perekonomian global dapat berdampak pada perekonomian Indonesia jika pemerintah, pelaku industri, dan *stakeholder* terkait belum merencanakan langkah antisipatif.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia pada tahun 2024 target inflasi ditetapkan sebesar $2,5 \pm 1$ persen. Target ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 3 ± 1 persen. Tingkat inflasi pada tahun 2023 sebesar 2,61 persen (*yoy*), nilai ini jauh lebih rendah dari tahun 2022 yang tingkat inflasinya mencapai 5,5 persen (*yoy*). Seiring dengan tetap terkendalinya inflasi harga impor (*imported inflation*) dengan nilai tukar Rupiah yang stabil dan respons kebijakan moneter yang *front loaded*, *pre-emptive*, dan *forward looking*. Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) berkontribusi kuat pada terkendalinya inflasi. Sinergi dan inovasi merupakan kunci dari prospek kinerja ekonomi Indonesia pada 2023 dan 2024 yang akan melanjutkan ketahanan dan kebangkitan ekonomi.

Stabilitas eksternal akan tetap terjaga, transaksi berjalan diperkirakan berada pada kisaran surplus 0,4 persen sampai dengan defisit 0,4 persen dari PDB pada 2023 dan surplus 0,2 sampai dengan defisit 0,6 persen dari PDB pada 2024, sementara neraca modal dan finansial surplus didukung PMA dan investasi portofolio. Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga baik dari sisi permodalan, risiko kredit, dan likuiditas. Pertumbuhan kredit akan tumbuh pada kisaran 10-12 persen pada 2023 dan 2024. Ekonomi dan keuangan digital juga akan meningkat pada 2023 dan 2024 dengan nilai transaksi *e-commerce* diperkirakan mencapai Rp.572 triliun dan Rp.689 triliun, uang elektronik Rp.508 triliun dan Rp.640 triliun, dan digital banking lebih dari Rp.67 ribu dan Rp.87 ribu triliun.

Arah bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2024 mencakup kebijakan moneter yang difokuskan pada stabilitas. Khususnya pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah agar gejolak global tidak mengganggu stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Indonesia memaparkan ketidakpastian global yang terus meningkat di tengah siklus

ekonomi dan keuangan nasional yang masih berada di bawah kapasitas perekonomian potensial. Untuk itu, Bank Indonesia pun menentukan bauran kebijakan yang akan terus diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bauran kebijakan tersebut terus disinergikan dengan kebijakan ekonomi nasional sekaligus sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dalam hal ini, kebijakan moneter pro-stability akan ditempuh dengan kebijakan suku bunga Bank Indonesia terus diarahkan secara *forward looking* dan *pre-emptive* untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah, yaitu $2,5 \pm 1$ persen pada tahun 2024 dan 2025. Dengan tingkat inflasi tersebut, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 4,7-5,5 persen pada 2024 dan 4,8-5,6 persen pada 2025.

Di samping itu, arah kebijakan moneter ini juga bertujuan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah agar tetap sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi dan mendukung stabilitas eksternal. Kebijakan tersebut didukung operasi moneter "*pro-market*" untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan Bank Indonesia ke pasar keuangan dan perekonomian. Termasuk daya tarik masuknya aliran portofolio asing, serta pengelolaan lalu lintas devisa sesuai kaidah internasional untuk mendukung stabilitas eksternal dan kecukupan cadangan devisa. Sementara itu, 4 (empat) kebijakan Bank Indonesia lainnya yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau akan terus diarahkan untuk dan sebagai bagian dari upaya bersama dalam akselerasi pemulihan ekonomi nasional (*pro-growth*). Adapun penjelasan masing-masing kebijakan sebagai berikut :

3.1.1.1. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter Bank Indonesia pada tahun 2024 tetap difokuskan pada stabilisasi nilai tukar Rupiah dalam rangka mengendalikan tingkat inflasi agar tetap dalam sasaran. Hal ini merupakan bagian dari langkah mitigasi terhadap dampak rambatan gejolak global, serta dukungan terhadap stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Bank Indonesia akan secara konsisten melanjutkan respons kebijakan suku bunga melalui kalibrasi secara terukur (*well-calibrated*), perencanaan yang matang (*well-planned*), dan dikomunikasikan secara transparan (*well-communicated*) untuk memastikan tercapainya sasaran inflasi inti lebih awal yaitu pada semester I 2024. Besaran dan waktu respons kebijakan suku bunga tersebut didasarkan pada perkembangan ekspektasi inflasi dan inflasi inti, dibandingkan dengan perkiraan awal dan sasaran yang akan dicapai (*data dependent*)

3.1.1.2. Kebijakan Makroprudensial

Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM guna mempercepat pemulihan

ekonomi nasional, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan inklusi ekonomi dan keuangan hijau.

3.1.1.3. Kebijakan Sistem Pembayaran

BSPI 2025 adalah arah kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia untuk menavigasi peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital. Blueprint berisi 5 (lima) Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang dilaksanakan oleh 5 (lima) *working group* yaitu Open banking, Sistem Pembayaran Ritel, Sistem Pembayaran Nilai Besar dan Infrastruktur Pasar Keuangan, Data dan Digitalisasi, dan Reformasi Regulasi, Perizinan, dan Pengawasan. BSPI 2025 akan diwujudkan melalui 23 *key deliverables* yang akan diimplementasikan secara bertahap dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2025

3.1.1.4. Kebijakan Pendalaman Pasar Uang

Akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas operasi dan transmisi kebijakan, pembangunan pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan.

3.1.1.5. Kebijakan Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Hijau

Program-program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi keuangan syariah juga terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor.

Lima arah kebijakan Bank Indonesia tersebut akan diperkuat dengan koordinasi erat bersama Pemerintah Pusat dan Daerah serta mitra strategis melalui TPIP dan TPID, serta GNPIP di berbagai daerah untuk mendukung pengendalian inflasi. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal Pemerintah dan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga terus diperkuat dalam menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan. Bank Indonesia juga terus memperkuat kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya di bidang keuangan serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Sinergi erat dengan Pemerintah juga ditempuh untuk menyukseskan keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023, khususnya pada jalur integrasi keuangan.

Secara umum perbaikan ekonomi domestik akan didorong oleh perbaikan pada lapangan usaha yang berkaitan dengan ekspor sebagai respon terhadap perbaikan pertumbuhan ekonomi di negara maju sehingga mendorong permintaan ekspor. Sejalan dengan aktivitas dan mobilitas

masyarakat yang diperkirakan meningkat, konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh positif. Demikian halnya konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat untuk mencapai target pembangunan yang tertahan pada awal masa pandemi. Sementara itu perbaikan pada lapangan usaha pariwisata, perdagangan, perhotelan dan hiburan diperkirakan akan berangsur pulih setelah pemerintah memutuskan untuk membuka jalur *travel bubble* bagi wisatawan asing yang ingin berkunjung.

Tabel 3.1. Kondisi dan Target Indikator Makro Ekonomi Nasional

No.	Indikator	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05	5,30-5,70	5,30 – 5,60
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32 ^{a)}	5,00-5,70	4,50 – 5,00
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	9,36 ^{b)}	6,50-7,50	7,00 - 8,00
4.	Rasio Gini (Nilai)	0,388 ^{b)}	0,374-0,377	0,379 – 0,382
5.	Indeks Modal Manusia (Nilai)	0,53	-	0,56
6.	Penurunan Emisi GRK (%)	34,09 ^{c)}	27,27	38,60

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2025

Ket : a) Agustus

b) Maret

c) Angka sementara per Oktober

Beberapa lembaga internasional merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi global. Aktivitas perkonomian dunia mengalami perlambatan di tahun 2023, seiring dengan menurunnya aktivitas perdagangan dan manufaktur, harga komoditas serta upaya bank sentral berbagai negara untuk menurunkan inflasi. Inflasi melanda negara-negara maju. Amerika yang biasanya di bawah 1 persen saat ini inflasi sudah mencapai 8,5 persen, dan inflasi paling tinggi di Turki sudah melompat ke angka 61,1 persen. Inflasi negara berkembang diperkirakan juga akan meningkat, namun dalam batas yang moderat. Kondisi ini berdampak pada skenario perdagangan. Namun, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2025, diperkirakan lebih baik dibandingkan capaian tahun 2023 dan *outlook* 2024. Pertumbuhan ekonomi global lebih banyak didorong oleh negara-negara *Emerging Markets* atau negara-negara berkembang.

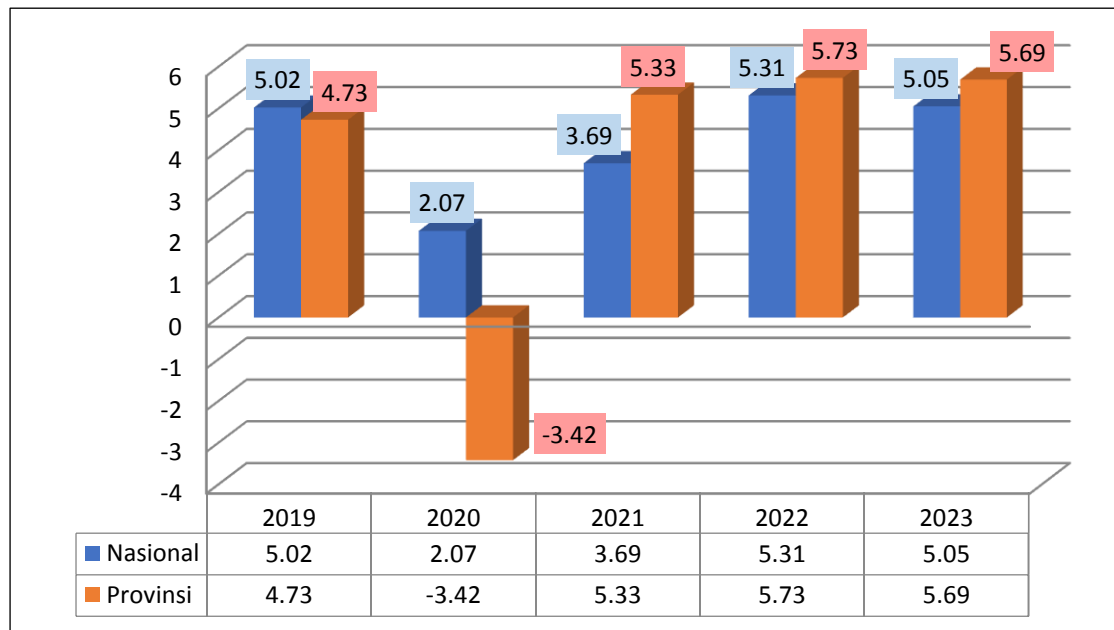
3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Maluku

Pada Tahun 2025 pembangunan di Provinsi Maluku akan diarahkan dengan tema “penguatan fondasi transformasi melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”, searah dengan kebijakan Pemerintah Pusat, karena transformasi merupakan hal mutlak dalam mewujudkan visi kedepan dalam aspek sosial ekonomi maupun tata kelola pemerintahan, maka perlu dibangun berbagai landasan transformasi yakni keamanan, demokrasi, stabilitas, ketahanan sosial budaya dan ekonomi, serta dibutuhkan pula kerangka implementasi yang meliputi pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan sarana dan prasarana yang berkualitas, ramah lingkungan serta pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

3.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Selama periode 2019-2023, Provinsi Maluku menunjukkan variasi dalam pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku sedikit di bawah rata-rata nasional. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan tajam, berbeda dengan tren nasional yang masih positif. Di tahun-tahun berikutnya, Provinsi Maluku berhasil pulih, mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Meskipun fluktuatif, Provinsi Maluku berhasil menunjukkan kinerja ekonomi yang relatif positif dan konsisten selama periode tersebut.

Diagram 3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Maluku Tahun 2019-2023

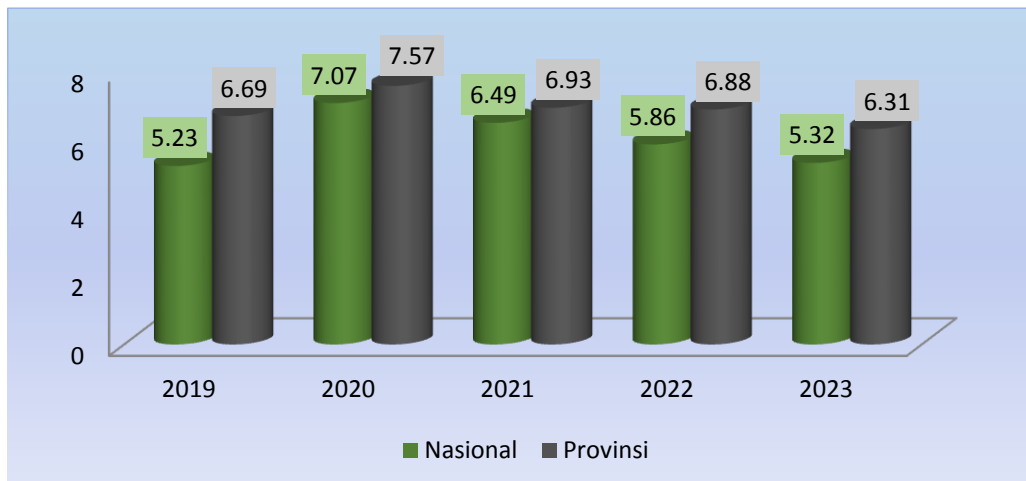


Sumber : Sambutan Kemendagri pada Kegiatan Musrenbang RKPD Provinsi Maluku Tahun 2025

3.1.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Maluku cenderung lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Pada tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka di Maluku mencapai 6,69 persen, sedangkan rata-rata nasional hanya 5,23 persen. Meskipun mengalami kenaikan pada tahun 2020, Provinsi Maluku mencatat penurunan tajam pada tahun 2021 hingga 2023, walaupun tetap di atas rata-rata nasional. Sementara itu, rata-rata nasional menunjukkan tren yang relatif stabil selama periode yang sama. Meskipun demikian, tingkat pengangguran terbuka tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi di Provinsi Maluku.

Diagram 3.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional dan Provinsi Maluku Tahun 2019-2023

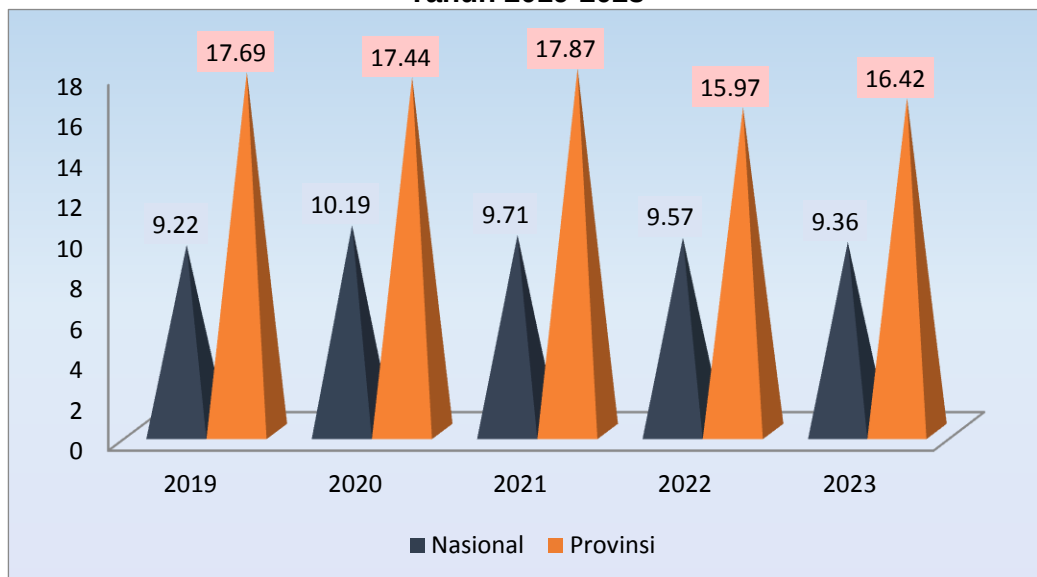


Sumber : Sambutan Kemendagri pada Kegiatan Musrenbang RKPD Provinsi Maluku Tahun 2025

3.1.2.3 Tingkat Kemiskinan (PO)

Tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku cenderung lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan di Maluku mencapai 17,69 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 9,22 persen. Dan tahun berikutnya tingkat kemiskinan masih tetap tinggi oleh karena itu, perlu upaya lebih lanjut untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku agar mendekati atau bahkan di bawah rata-rata nasional.

Diagram 3.3. Tingkat Kemiskinan Nasional dan Provinsi Maluku Tahun 2019-2023

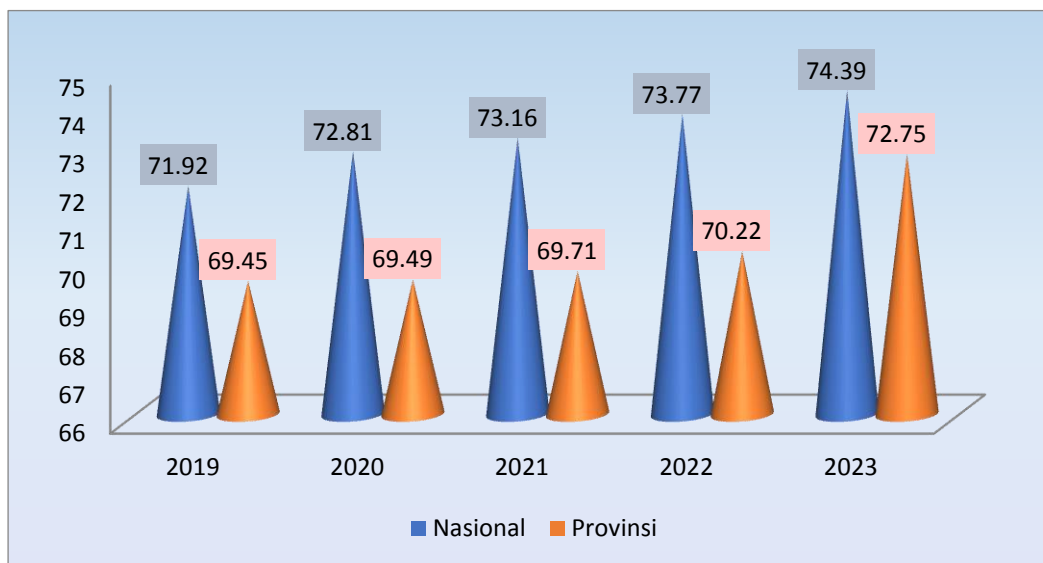


Sumber : Sambutan Kemendagri pada Kegiatan Musrenbang RKPD Provinsi Maluku Tahun 2025

3.1.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku relatif lebih rendah daripada rata-rata nasional, meskipun menunjukkan tren peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, IPM Maluku mencapai 69,45 persen, sedangkan rata-rata nasional adalah 71,92 persen. Meskipun fluktuatif, IPM Maluku tetap berada di bawah rata-rata nasional pada tahun-tahun berikutnya. Namun, terdapat peningkatan yang konsisten dalam IPM Maluku dari tahun 2020 hingga 2023, mencapai angka 72,75 persen pada tahun terakhir. Meskipun demikian, gap antara IPM Maluku dan rata-rata nasional masih terjadi, menekankan pentingnya upaya lanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan manusia di Provinsi Maluku.

Diagram 3.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional dan Provinsi Maluku Tahun 2019-2023

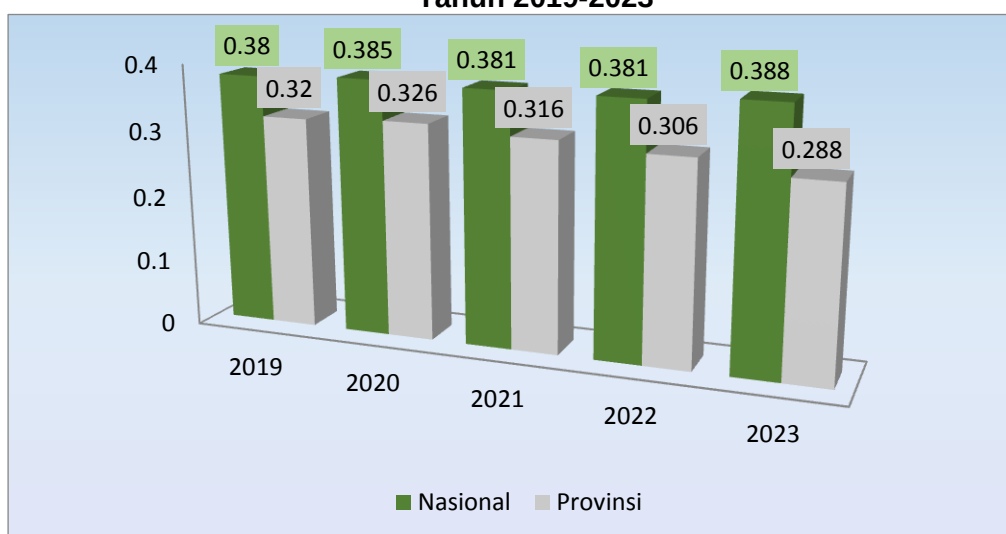


Sumber : Sambutan Kemendagri pada Kegiatan Musrenbang RKPD Provinsi Maluku Tahun 2025

3.1.2.5 Indeks Gini

Rasio Gini di Provinsi Maluku menunjukkan tingkat ketidaksetaraan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Pada tahun 2019, rasio gini di Maluku adalah 0,32, lebih rendah daripada rata-rata nasional sebesar 0,38. Di tahun selanjutnya, rasio gini di Maluku cenderung menurun secara konsisten, mencapai 0,288 pada tahun 2023, sementara rata-rata nasional tetap relatif stabil. Penurunan ini menandakan adanya upaya yang berhasil dalam mengurangi ketidaksetaraan pendapatan di Provinsi Maluku, meskipun masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mencapai tingkat kesetaraan yang lebih baik.

Diagram 3.5. Indeks Gini Nasional dan Provinsi Maluku Tahun 2019-2023



Sumber : Sambutan Kemendagri pada Kegiatan Musrenbang RKPD Provinsi Maluku Tahun 2025

Struktur ekonomi Provinsi Maluku didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial yang memiliki kontribusi signifikan dalam perekonomian daerah. Potensi yang besar pada sektor-sektor unggulan menawarkan peluang untuk mengoptimalkan pembangunan ekonomi wilayah ke depan. Diperlukan kebijakan yang relevan dan khusus untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan serta mengatasi tantangan yang dihadapi, sehingga mampu memaksimalkan potensi ekonomi Provinsi Maluku dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 3.2. Kondisi dan Target Indikator Makro Provinsi Maluku

No .	Indikator	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,69	6,10 – 6,71	5,26 – 5,51
2	Inflasi (% , yoy)	-	2,09-2,99	-
3	Tingkat Kemiskinan (%)	16,42	15,73	13,01 – 13,51
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,31	6,05	5,55 – 6,03
5	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	72,75	70,69	-
6	Indeks Modal Manusia	-	-	0,49
7	Indeks Rasio Gini (poin)	0,288	0,295	0,282 - 0.287
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	-	-	42,88

Sumber : - Provinsi Maluku Dalam Angka (BPS), 2024
 - RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024
 - Rancangan Awal RKPD Provinsi Maluku Tahun 2025
 - Indikator Makro Provinsi Maluku Hasil Rakortengrenbang 2024

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Buru Selatan

3.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2023 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha mengalami penurunan sebesar 0,95 persen menjadi 4,58 persen dari tahun sebelumnya yakni 5,53 persen. Jumlah PDRB ADHK Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2023 sebesar Rp.1.018,86 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp.44,66 miliar dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp.974,20 milyar. sektor industri pengolahan sebesar 32,72 persen atau sebesar Rp 2.955. 354,06 (dalam juta Rupiah). Seluruh lapangan usaha tumbuh positif pada 2023. Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi Buru Selatan, yakni pertanian, administrasi pemerintahan, konstruksi dan perdagangan.

Pertumbuhan tertinggi PDRB ADHK menurut lapangan usaha pada tahun 2023 yaitu Sektor Transportasi dan Pergudangan yang mengalami pertumbuhan sebesar 9,59 persen, ini didorong oleh kenaikan pengguna jasa angkutan, peningkatan volume pengiriman barang dan mobilitas kampanye dan persiapan pemilu. Sektor berikut yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah jasa kesehatan yakni sebesar 8,89 persen. Diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 7,98 persen, hal ini ditopang dari meningkatnya hasil pertanian, peningkatan hasil penjualan dari UMK dan UMB pada bahan makanan dan non makanan (bahan bakar minyak, kendaraan bermotor roda 2, dsb). Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada sector administrasi pemerintahan yakni sebesar 1,18 persen.

Ekonomi Buru Selatan mengalami pertumbuhan pada sebagian komponen pengeluaran jika dibandingkan dengan tahun 2022. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2023 yaitu dari sektor konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) sebesar 5,36 persen dan dari sektor konsumsi rumah tangga yakni sebesar 3,90 persen. Distribusi terbesar terhadap total PDRB tahun 2023 yaitu dari sektor konsumsi rumah tangga sebesar 89,95 persen, sektor konsumsi pemerintah sebesar 50,47 persen dan sektor Pembentukan Tetap Modal Bruto (PMTB) sebesar 47,43 persen.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional, kebijakan ekonomi Kabupaten Buru Selatan juga difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi kerakyatan terutama UMKM, koperasi, industri kecil dan menengah serta penataan pasar, pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kabupaten Buru Selatan. Selain itu, upaya untuk mendorong perluasan kesempatan kerja daerah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, menciptakan kepastian hukum dan kualitas pelayanan serta penyediaan tenaga kerja

sesuai kebutuhan pasar juga menjadi salah satu fokus kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Fokus kebijakan perekonomian tersebut sebagai upaya mendorong laju pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan dan industri kreativitas yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan.

Dengan melihat kondisi perekonomian tahun 2023, dan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan tahun 2024, maka perekonomian Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh melemahnya ekonomi global. Tantangan yang akan dihadapi :

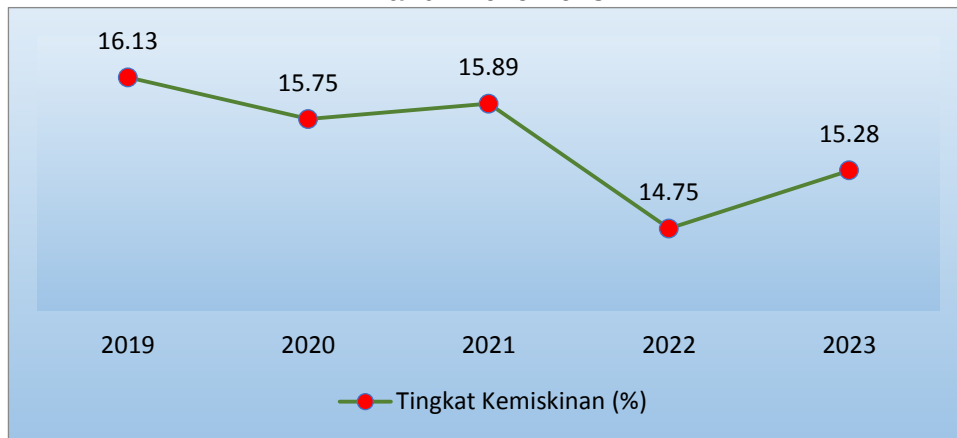
1. Angka pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan daerah-daerah di Maluku;
2. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buru Selatan yang relatif masih tinggi;
3. Jumlah stunting di Kabupaten Buru Selatan yang masih relatif tinggi;
4. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur wilayah di kawasan strategis dan infrastruktur dasar untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
5. Penerimaan daerah dari sumber dana perimbangan pemerintah pusat yang relatif tetap dibandingkan dengan tahun lalu;
6. Mendorong tumbuhnya pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk mendorong sektor ekonomi masyarakat;
7. Tuntutan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif.

3.1.3.2 Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Seiring kenaikan harga komoditas makanan dan non makanan, garis kemiskinan Kabupaten Buru Selatan selama dua dekade terakhir juga terus mengalami kenaikan. Persentase penduduk miskin (PO) pada tahun 2023 sebesar 15,28 persen, naik 0,53 persen poin terhadap tahun 2022.

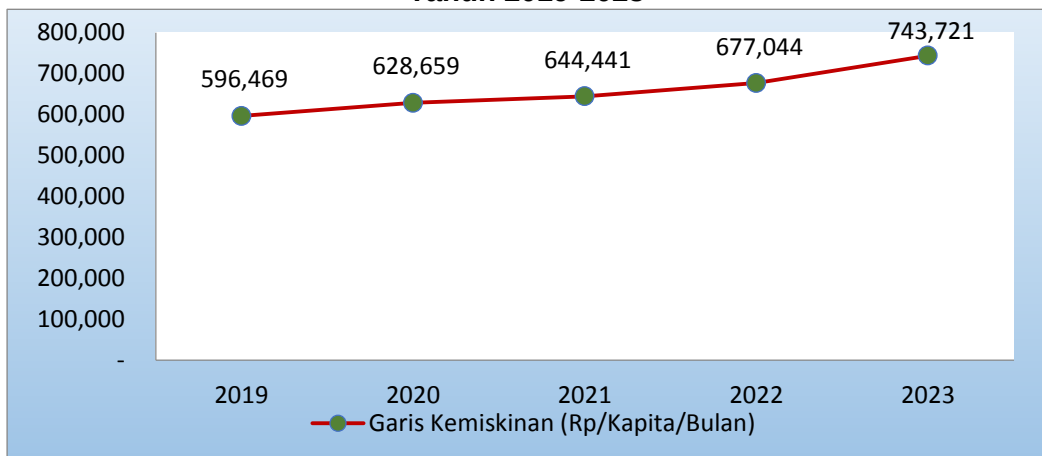
Grafik 3.1. Perkembangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru Selatan, 2024

Garis kemiskinan Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2023 sebesar Rp.743.721,- per kapita per bulan. Angka ini naik 9,8 persen, lebih tinggi dari garis kemiskinan tahun 2022 yang mencapai Rp.677.044,- per kapita per bulan.

Grafik 3.2. Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019-2023

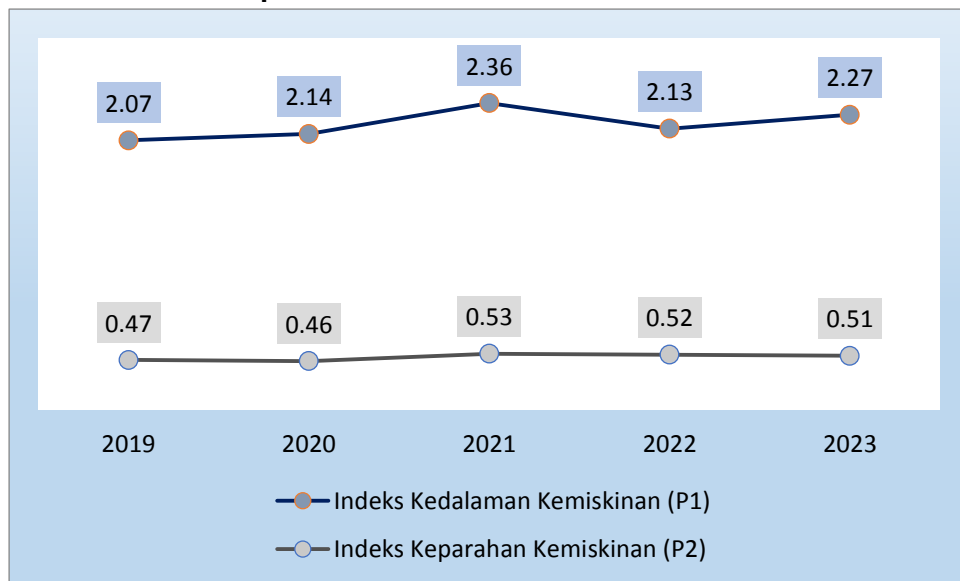


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru Selatan, 2024

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja, tetapi perlu diperhatikan dimensi lain yaitu tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan. Jadi selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sementara indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Grafik 3.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019-2023



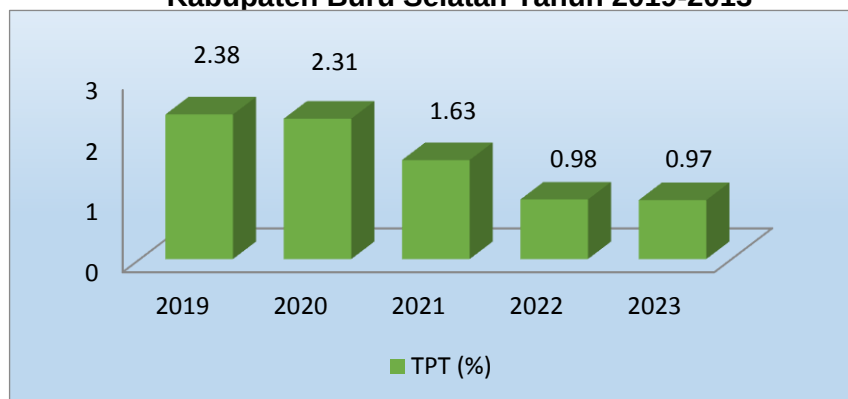
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru Selatan, 2024

3.1.3.3 Ketenagakerjaan

Berdasarkan data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus tahun 2023 terlihat bahwa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Buru Selatan sebesar 38.331 jiwa. Sementara untuk jumlah penduduk yang bekerja sebesar 37.960 jiwa atau 99 persen dari penduduk angkatan kerja.

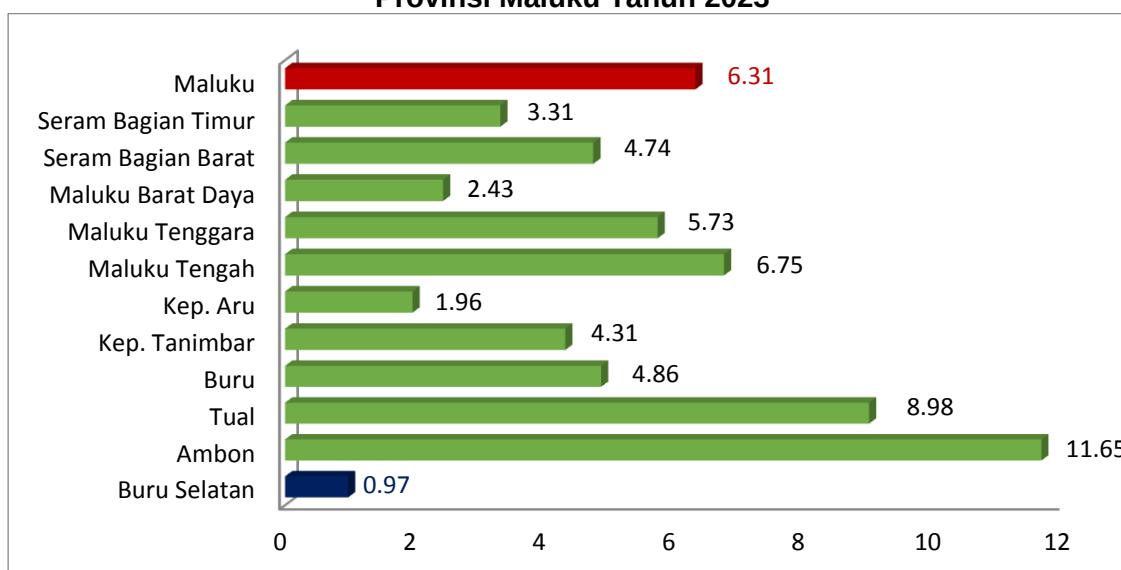
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Dari tahun 2019-2023, TPT di Kabupaten Buru Selatan mengalami tren yang positif yakni dari 2,38 persen pada tahun 2019 dan terus mengalami penurunan hingga mencapai angka 0,97 persen pada tahun 2023 dan merupakan angka TPT terendah se-Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

Diagram 3.6. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru Selatan, 2024

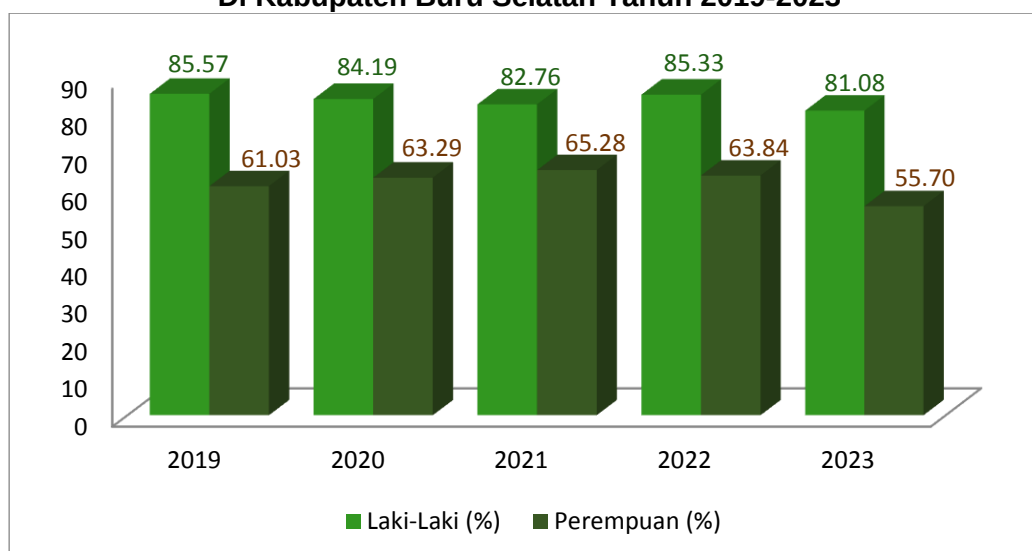
Diagram 3.7. Perbandingan TPT Kabupaten Buru Selatan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Maluku Tahun 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru Selatan, 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Selama dua tahun terakhir (2022-2023), TPAK Kabupaten Buru Selatan mengalami penurunan.

Diagram 3.8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru Selatan, 2024

3.1.3.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

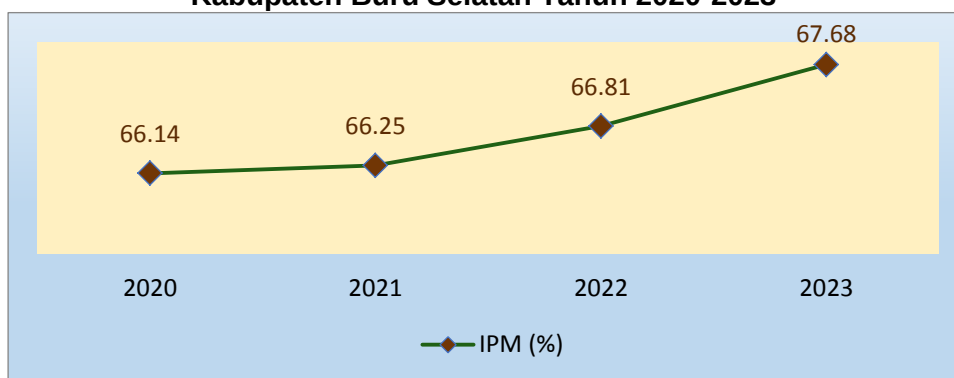
Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu indeks yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam

pembangunan kualitas hidup manusia dan juga merupakan indikator target pembangunan dalam pembahasan asumsi makro antara pemerintah dan DPR. IPM juga menjadi salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID).

Status IPM menggambarkan level pencapaian pembangunan manusia dalam suatu periode. Semakin tinggi status IPM menunjukkan capaian pembangunan manusia yang lebih baik. Sedangkan kecepatan IPM menggambarkan perubahan capaian pembangunan manusia dibandingkan waktu sebelumnya.

Pertumbuhan IPM pada tahun 2023 sebesar 67,68 persen lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2022 sebesar 66,81 besar atau dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 0,77 persen.

Grafik 3.4. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru Selatan, 2024

Peningkatan IPM 2023 didorong oleh peningkatan pada semua indikator pembentuk yang terdiri dari:

1. Umur Harapan Hidup/UHH (tahun) saat lahir meningkat 0,26 tahun atau 0,37 persen dibandingkan tahun 2022, lebih tinggi rata-rata pertumbuhan 2020-2022 yakni sebesar 0,32 persen.
2. Harapan Lama Sekolah/HLS (tahun) meingkat 0,01 tahun atau 0,08 persen dibandingkan tahun 2022, melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 yakni sebesar 0,39 persen
3. Rata-rata Lama Sekolah/RLS (tahun) meningkat 0,17 tahun atau 0,11 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahun 2020-2022 sebesar 1,21 persen.
4. Pengeluaran rill per kapita per tahun yang disesuaikan (ribu rupiah) meningkat 392 ribu rupiah atau sebesar 5,08 persen dibandingkan tahun 2022, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 sebesar 2,35 persen.

3.1.3.5 Laju Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator Inflasi di Indonesia. IHK mencakup 7 (tujuh) kelompok yaitu: (1) bahan makanan (2) makanan jadi, minuman dan tembakau; (3) perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; (4) sandang; (5) kesehatan; (6) pendidikan, rekreasi dan olahraga; (7) transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. IHK di Namrole pada Desember 2023 sebesar 110,35 dengan inflasi sebesar 0,73 persen. Sedangkan IHK di Namrole pada Januari 2024 sebesar 109,94 dengan inflasi sebesar 0,34 persen.

Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini, serta memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, maka perekonomian Kabupaten Buru Selatan dapat dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.3. Capaian Perkembangan Ekonomi Tahun 2023 dan Target Tahun 2024 serta Proyeksi tahun 2025 di Kabupaten Buru Selatan

No.	Indikator	Capaian 2023	Target 2024	Proyeksi 2025
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	4,58	5,03	5,04
2	Inflasi (%)	1,44	3,5	3,5
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	0,97	2,26	2,25
4	Tingkat Kemiskinan (%)	15,28	15,00	14,75
5	IPM (%)	67,68	-	-
6	Rasio Gini	-	-	0,27

Sumber : - RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026

- Badan Pusat Statistik Kab. Buru Selatan, 2024

Menjawab sejumlah tantangan dan prospek perekonomian di masa mendatang, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 harus tetap bertumpu pada pengembangan ekonomi lokal yang sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Arah pembangunan perekonomian Kabupaten Buru Selatan tahun 2025 diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB, juga pada sektor-sektor pertumbuhan baru yang memiliki prospek ke depan serta tahan terhadap gejolak ekonomi. Kebijakan perekonomian daerah diprioritaskan pada program dan kegiatan yang mampu mendayagunakan sumberdaya lokal berbasis potensi unggulan daerah, dengan dukungan inovasi teknologi serta berorientasi pada pemerataan pembangunan, sehingga diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengetahui target indikator makro Nasional, Provinsi Maluku dan Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2025 berikut disajikan data sandingan target indikator makro tahun tersebut pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Sandingan Target Indikator Ekonomi Makro Nasional, Provinsi Maluku dan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025

No.	Indikator	Target Tahun 2025		
		Nasional	Maluku	Buru Selatan
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,70 – 6,00	5,26 – 5,51	5,03
2.	Inflasi (%)	2,70+1%	3,45 - 4,25	3,50
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,60 – 4,30	5,55 – 6,03	2,26
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 0– 7,00	13,01- 13,51	14,75
5.	IPM (Poin)	75,54	69,91	-
6.	IMM	0,56	0,49	-
7.	Rasio Gini	0,360 – 0,374	0,282 – 0,287	0,28
8.	Penurunan Intensitas Emisi GRK	38,60	42,88	-

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat asas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan perundangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang. Arah kebijakan keuangan daerah meliputi arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Secara umum kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan

pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besarnya pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan masih sangat tergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai pembangunannya, sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan penerapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Upaya-upaya yang rencana dilakukan Pemerintah Daerah dalam mencapai target pendapatan daerah Tahun 2024 diarahkan pada :

1. Optimalisasi pendapatan asli daerah melalui pajak daerah lainnya ataupun retribusi daerah yang ada dan integrasi data dari wajib pajak yang sudah ada;
2. Peningkatan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi, dan peningkatan kualitas SDM pengelola;
3. Sinergi database dengan Perangkat Daerah lainnya yang terkait, misalnya dalam hal persyaratan perijinan sebagai bagian dari upaya pendataan dan pengawasan kepatuhan pajak Kabupaten Buru Selatan;
4. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah serta regulasi terkait kebijakan APBN untuk Pemerintah Daerah;
5. Penyusunan Regulasi Baru yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak serta kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara Peningkatan pelayanan pajak dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan pajak dengan menyediakan nomor Whatsapp pelayanan terkait pajak daerah, selain itu juga pengembangan sistem pembayaran retribusi daerah dan PAD lainnya;

7. Melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran.

Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme di antaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan melalui beberapa strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Upaya peningkatan kualitas pelayanan diarahkan pada tujuan untuk semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan yang wujud nyatanya adalah percepatan waktu dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan serta Pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan.
2. Memanfaatkan Potensi Pendapatan Daerah
Pemanfaatan potensi pendapatan daerah yang ada di Kabupaten Buru Selatan melalui sinergi database dengan Perangkat Daerah lainnya yang terkait dan peningkatan hubungan/kerjasama antar Kabupaten/Kota.
3. Meningkatkan kinerja pelaporan dan evaluasi atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023 dan target Tahun 2024 serta proyeksi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.5. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023,
Target Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025**

No.	URAIAN	APBD 2023				TARGET 2024*	PROYEKSI 2025*	PROYEKSI N+1
		TARGET	REALISASI	SELISIH	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PENDAPATAN DAERAH	690.785.135.171	663.623.295.313	27.161.839.858	96,07	788.547.705.800	828.391.505.000	858.565.622.000
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	42.150.264.171	21.866.283.741	20.283.980.430	51,88	70.838.586.800	40.741.475.000	44.815.622.000
1.1.1	Pajak Daerah	6.700.096.800	4.788.569.430	1.911.527.370	71,47	6.700.096.800	7.370.107.000	8.107.118.000
1.1.2	Retribusi Daerah	5.331.250.000	4.149.761.083	1.181.488.917	77,84	5.331.250.000	5.864.375.000	6.450.812.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.400.517.371	5.400.517.371	0,00	100,00	4.279.380.000	4.707.318.000	5.178.050.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	24.718.400.000	7.527.435.857	17.190.964.143	30,45	54.527.860.000	22.799.675.000	25.079.642.000
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	648.634.871.000	641.757.013.572	6.877.857.428	98,94	714.409.119.000	784.350.030.000	810.450.000.000
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	631.280.871.000	627.690.845.238	3.590.025.762	99,43	699.409.119.000	769.350.030.000	795.450.000.000
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	17.354.000.000	14.066.168.000	3.287.832.000	81,05	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-	3.300.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000
1.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	3.300.000.000	3.300.000.000
TOTAL PENDAPATAN		690.785.135.171	663.623.295.313	27.161.839.858	96,07	788.547.705.800	828.391.505.000	858.565.622.000

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru Selatan, 2024

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Tahun 2025 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun Kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib untuk bidang kesehatan dan pendidikan, penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah dan penggunaan dana fungsi kesehatan sebesar minimal 10% dari total belanja daerah, serta pemenuhan terhadap fungsi infrastruktur sebesar minimal 40% dari total belanja daerah dalam;
2. Belanja daerah untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
3. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan dan infrastruktur;
4. Belanja daerah memenuhi program dan kegiatan yang diarahkan penggunaannya berdasarkan sumber dana (Specific Grant, DAK, DBHCHT, Pajak Rokok, belanja untuk SKPD yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah PPK-BLUD) serta untuk pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; dan
5. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah Tahun 2025 peruntukannya harus fokus pada program-program prioritas yang akan dicapai.

**Tabel 3.6. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023,
Target Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025**

No.	URAIAN	APBD 2023				TARGET 2024*	PROYEKSI 2025*	PROYEKSI N+1
		TARGET	REALISASI*	SELISIH	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	BELANJA DAERAH	707.287.659.628	639.050.674.079	68.236.985.549	90,35	808.829.663.800	844.391.505.000	872.065.622.000
2.1	BELANJA OPERASI	506.764.831.886	454.087.302.728	52.677.529.158	89,61	555.691.838.279	570.387.167.000	586.225.852.000
2.1.1	Belanja Pegawai	226.303.588.000	189.477.981.150	36.825.606.850	83,73	270.522.043.218	298.035.154.000	308.922.635.000
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	227.776.361.982	218.297.058.753	9.479.303.229	95,84	215.049.010.849	226.553.912.000	228.209.303.000
2.1.3	Belanja Subsidi	1.490.000.000	1.490.000.000	0,00	100,00	2.840.000.000	2.840.000.000	2.840.000.000
2.1.4	Belanja Hibah	38.633.473.200	32.332.117.200	6.301.356.000	83,69	54.701.447.300	27.737.104.000	29.510.814.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	12.561.408.704	12.490.145.625	71.263.079	99,43	12.579.336.912	15.220.997.000	16.743.100.000
2.2	BELANJA MODAL	90.661.448.002	77.658.778.723	13.002.669.279	85,66	120.798.420.075	134.430.992.000	140.149.090.000
2.2.1	Belanja Modal Tanah	3.239.005.500	3.239.005.500	0,00	100,00	1.772.518.000	2.500.000.000	1.500.000.000
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.374.443.961	12.534.699.901	839.744.060	93,72	34.087.129.096	38.495.842.000	39.845.426.000
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.042.125.493	32.236.769.546	3.805.355.947	89,44	38.602.357.108	42.462.593.000	45.708.852.000
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	37.848.373.048	29.490.826.576	8.357.546.472	77,92	46.111.415.871	50.722.557.000	52.794.812.000
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	157.500.000	157.477.200	22.800	99,99	225.000.000	250.000.000	300.000.000
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	1.991.837.000	8.163.000	99,59	4.000.000.000	4.400.000.000	5.000.000.000
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	1.991.837.000	8.163.000		4.000.000.000	4.400.000.000	5.000.000.000
2.4	BELANJA TRANSFER	107.861.379.740	105.312.755.628	2.548.624.112	97,64	128.339.405.446	135.173.346.000	140.690.680.000
2.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	107.861.379.740	105.312.755.628	2.548.624.112	97,64	128.339.405.446	135.173.346.000	140.690.680.000
	TOTAL BELANJA	707.287.659.628	639.050.674.079	68.236.985.549	90,35	808.829.663.800	844.391.505.000	872.065.622.000

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru Selatan, 2024

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan berasal dari pencairan dana cadangan dan SiLPA. Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2025 di Kabupaten Buru Selatan antara lain diarahkan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian, dan pembentukan dana cadangan.

**Tabel 3.7. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023,
Target Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025**

No.	URAIAN	APBD 2023				TARGET 2024*	PROYEKSI 2025*	PROYEKSI N+1
		TARGET	REALISASI*	SELISIH	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	PEMBIAYAAN DAERAH	16.502.524.457	18.502.524.457	(2.000.000.000)	(112,12)	20.281.958.000	16.000.000.000	13.500.000.000
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	19.002.524.457	19.002.524.457	0,00	100,00	21.781.958.000	18.000.000.000	15.000.000.000
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	19.002.524.457	19.002.524.457	0,00	100,00	21.781.958.000	18.000.000.000	15.000.000.000
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	19.002.524.457	19.002.524.457	0,00	100,00	21.781.958.000	18.000.000.000	15.000.000.000
3.2	PENGELUARAAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000	500.000.000	2.000.000.000	20,00	1.500.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	2.500.000.000	500.000.000	2.000.000.000	20,00	1.500.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000	500.000.000	2.000.000.000	20,00	1.500.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	16.502.524.457	18.502.524.457	(2.000.000.000)	(112,12)	20.281.958.000	16.000.000.000	13.500.000.000

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru Selatan, 2024

BAB IV
SASARAN DAN
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
DAERAH

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan daerah adalah agenda daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah, pada dasarnya prioritas pembangunan daerah meliputi program-program unggulan SKPD yang paling tinggi realisasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Berbagai sektor strategis yang akan didorong antara lain; sektor perdagangan, industri, jasa, pariwisata dan sektor lain yang menunjukkan perkembangan potensial.

Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Buru Selatan juga mempertimbangkan kebijakan Nasional dan Provinsi Maluku demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional. Berbagai pendekatan perencanaan sebagaimana arahan nasional dimaksudkan agar pembangunan yang dilaksanakan antara level pemerintahan (Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku dan Nasional) dapat saling mendukung untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Berkaitan dengan dukungan daerah dalam mencapai sasaran dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah. Prioritas daerah dan arah pembangunan daerah tahun 2025 merupakan upaya untuk mencapai target sasaran indikator makro pembangunan agar menjamin keselarasan antara pusat, provinsi dan daerah, maka target pembangunan yang ingin dicapai dan keselarasannya terhadap target Nasional maupun Provinsi. Isu strategis merupakan salah satu komponen yang menjadi pertimbangan perumusan prioritas RKPD 2025 yang disusun berdasar: (1) isu strategis daerah 2021-2026; (2) evaluasi pencapaian kinerja RKPD 2021; (3) tantangan global, nasional dan regional seperti isu pandemi COVID-19, SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) termasuk juga standar pelayanan minimal serta isu sektoral yang dirumuskan dalam RKP 2024 dan RKPD Kabupaten Buru Selatan tahun 2025.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan program pembangunan tahun 2025 merupakan kesinambungan dari agenda program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Dengan

memperhatikan potensi, tantangan dan permasalahan yang dihadapi serta sumber daya yang dimiliki, maka prioritas pembangunan Kabupaten Buru Selatan tahun 2025 diarahkan pada upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

RKPD Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, berpedoman pada RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026, Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025-2029, RKPD Provinsi Maluku Tahun 2025, dan program strategis nasional.

Sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen RPJMD periode 2021-2026, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Buru Selatan tahun 2025 mengacu pada Peraturan RPJMD Provinsi Maluku dan RPJN Nasional.

4.1.1. Visi

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 dituangkan dalam RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026. Visi Pembangunan Kabupaten Buru Selatan adalah sesuai dengan visi Bupati dan Wakil bupati terpilih adalah:

“Meningkatkan Kemandirian Buru Selatan Secara Berkelanjutan Sebagai Kabupaten Yang Rukun, Adil Dan Sejahtera Berbasis Agro-Marine”

Berdasarkan visi tersebut, diharapkan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Buru Selatan (termasuk didalamnya unsur pemerintah daerah) mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan masyarakat Buru Selatan yang mandiri, rukun berbasis agro marine. Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut:



Kemandirian : Mendayagunakan segenap asset, potensi dan kemampuan yang dimiliki secara optimal untuk meningkatkan derajat dan kualitas masyarakat;

Suatu keadaan dimana masyarakat Bursel dapat mendayagunakan segenap aset, potensi, dan kemampuan yang dimiliki secara optimal untuk meningkatkan derajat dan kualitas hidup mereka secara bebas dan mandiri, melalui dorongan, insentif, dan peranan aktif pemerintah selaku motivator, fasilitator dan dinamisator. Target dari kemandirian tersebut tentu saja adalah

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Buru Selatan, dimana segenap kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara memadai, baik kebutuhan yang sifatnya fisik dasar (lahiriah) seperti sandang, pangan, dan perumahan, maupun kebutuhan non-fisik (bathiniah) dan lainnya, seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, keamanan, rasa keadilan, kebebasan berpendapat, kebebasan menjalankan ibadah, dan sebagainya yang mencerminkan terpenuhinya hak-hak dasar sebagai manusia dan warga Negara;

 Berkelanjutan : Pengembangan sektor unggulan potensial dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Buru Selatan;

Suatu upaya untuk melanjutkan dan mengembangkan segala hasil pembangunan yang belum atau telah dicapai selama periode kepemimpinan yang lalu dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Buru Selatan. Me-reaktualisasi program yang lebih konkrit dan riil menjadi solusi terdepan dalam kebijakan pembangunan kabupaten Buru Selatan yang merata dan berkesinambungan. Berkelanjutan juga dimaksudkan untuk mengkristalisasi seluruh simpul-simpul aktivitas masyarakat dan pengembangan sektor unggulan potensial dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Buru Selatan, dengan jalan memaksimalkan akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah;

 Kabupaten yang Rukun : Peningkatan hubungan dan toleransi antar umat beragama dalam perspektif Kai Wait Ina Ama;

Terciptanya ketenangan dan ketenteraman dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, peningkatan tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dapat hidup bersama dalam perbedaan. Dalam perspektif *Kai Wait Ina Ama* yang selama ini melembaga di dalam pola hidup masyarakat Kabupaten Buru Selatan, peningkatan hubungan dan toleransi antar umat beragama, penghargaan dan penghormatan terhadap kearifan budaya lokal (*Lolik Lalen Fedak Fena*) yang merupakan perwujudan keseriusan pemerintah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Kabupaten Buru Selatan sebagai kabupaten yang berkarakter;

 Agro-Marine : Mengoptimalkan potensi sumberdaya di darat maupun di laut yang dimiliki serta perluasan kesempatan kerja;

Suatu upaya mendinamisasi aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Buru Selatan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya potensial di darat maupun di laut yang dimiliki, meliputi sektor perikanan, perhubungan, pariwisata, pertanian (pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan), yang mengarah pada peningkatan kualitas dan kuantitas produksi,

pengembangan multiproduk olahan, peningkatan nilai tambah dan nilai jual hasil pertanian dan perikanan, serta perluasan kesempatan kerja, melalui pengembangan produk-produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi.

4.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditempuh melalui 7 Misi Pembangunan yang merupakan kesinambungan sekaligus upaya pemantapan kualitas pembangunan dari misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dari 7 misi tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

a. *Memperkuat sektor perhubungan untuk peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat;*

Membangun dan memaksimalkan sarana dan prasarana transportasi laut maupun darat yang memadai dan terkoneksi di seluruh wilayah Buru Selatan, membangun infrastruktur perekonomian di pedesaan untuk mendorong kelancaran proses produksi, konsumsi dan distribusi secara integratif, peningkatan produktivitas usaha perikanan rakyat serta pemberdayaan masyarakat pesisir/pulau kecil, peningkatan kualitas dan keterampilan petani dan nelayan, baik pada aspek pengetahuan teknis, penguasaan teknologi maupun manajemen usaha, pengembangan wisata bahari, wisata budaya dan wisata sejarah yang berbasis di pedesaan.

b. *Pembentukan Pusat Pengembangan Produk Perikanan dan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Wilayah;*

Perancangan *master plan cluster* pengembangan produk perikanan dan pertanian, membentuk sentra produk perikanan dan pertanian pada kluster-kluster pengembangan ekonomi kerakyatan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah, membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran aktivitas pada kluster-kluster pengembangan sesuai dengan skala prioritas produk unggulan di setiap wilayah, penciptaan lapangan kerja dengan jalan meningkatkan keterampilan masyarakat dengan mendorong usaha-usaha kreatif sesuai dengan potensi yang dimiliki di setiap desa, menjamin sistem pemasaran dan *quality control* bagi produk yang dikembangkan demi terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat dan tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Buru Selatan secara profesional dan berkeadilan.

c. *Penguatan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan pusat pengembangan ekonomi kecamatan dengan mempertimbangkan geostrategis, geopolitik, dan potensi sumberdaya wilayah;*

Membentuk kluster-kluster pengembangan ekonomi berdasarkan potensi dan

karakteristik wilayah yang berbasis pada pengembangan bisnis agro-marine, membangun mental dan kemampuan wirausaha di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, memfasilitasi tersedianya akses modal yang memadai bagi berkembangnya UMKM terutama di sektor produktif, menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi berkembangnya UMKM, meliputi penyediaan infrastruktur, informasi pasar, kemudahan birokrasi serta keringanan fiskal. Mengkonsolidasi perencanaan tata ruang wilayah secara terpadu, sinergis dan komprehensif dalam menjamin keseimbangan ekosistem dan ekologis lingkungan hidup untuk menjamin penyelenggaraan pembangunan secara berkelanjutan, melalui pengusulan dokumen-dokumen perencanaan tata ruang meliputi: RTRW, RDTR, RTBL dan Master Plan sektor lainnya. Pengadaan tanah untuk sarana prasarana pembangunan, peningkatan pembangunan perumahan layak huni bagi masyarakat, melalui program perumahan swadaya dan perumahan khusus.

d. Pengembangan sektor pendidikan berbasis potensi unggulan daerah;

Pendidikan gratis dengan pola yang adil, profesional berorientasi output, mengembangkan pendidikan anak usia dini (PAUD) untuk mencetak landasan yang kokoh bagi penguatan SDM Buru Selatan dimasa depan, penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai, termasuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan pengembangan teknologi informasi di bidang pendidikan, membangun sekolah-sekolah kejuruan dari level sekolah lanjutan pertama sampai sekolah lanjutan atas, yang berbasis pada potensi wilayah Buru Selatan, membangun sistem pendidikan tinggi secara fokus dan profesional yang berorientasi pada potensi unggulan daerah melalui pengembangan konsep kemitraan segitiga antara pemerintah, pengusaha dan perguruan tinggi.

e. Perluasan akses kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat;

Pelayanan kesehatan gratis, disertai upaya penyediaan infrastruktur dan SDM kesehatan yang memadai hingga ke tingkat desa untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, optimalisasi riset dan development di bidang kesehatan untuk mengantisipasi isu-isu kesehatan dan perkembangan penyakit menular yang dihadapi masyarakat, meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan di seluruh wilayah Buru Selatan.

f. Penguatan adat, budaya dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal sosial untuk mendorong akselerasi pembangunan pariwisata daerah;

Pengembangan potensi pariwisata daerah secara profesional yang bersinergi dengan adat, budaya dan kearifan lokal masyarakat Buru Selatan, mengupayakan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengembangan budaya lokal guna terjaminnya eksistensi budaya Buru Selatan yang kaya dan beragam, mendorong aktivitas keagamaan

yang bersinergi dengan budaya lokal guna terbentuknya jati diri dan kearifan masyarakat, memperkuat sistem kelembagaan adat, menggerakkan aktivitas kepemudaan di tingkat desa sesuai bakat dan kebutuhannya, baik pada bidang keagamaan, olahraga, sosial, maupun seni dan budaya. Peningkatan harkat dan martabat serta kualitas hidup bagi penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam membangun kesejahteraan sosial sebagai investasi modal sosial. Memperkuat ketahanan sosial dalam upaya memperkecil kesenjangan sosial, dengan memberikan perhatian kepada warga masyarakat dalam pembinaan semangat kesetiakawanan sosial dan kemitraan semangat kepahlawanan serta wawasan kebangsaan.

g. Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, professional, dan bersih dari KKN;

Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsinya secara efektif dan profesional, mengoptimalkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur serta kualitas layanan yang prima bagi masyarakat, menyederhanakan alur birokrasi dengan sistem satu atap guna meningkatkan pelayanan publik yang efisien dan efektif, optimalisasi peran putra daerah yang berkualitas secara adil dan berimbang, untuk mengisi posisi-posisi strategis di birokrasi, khususnya posisi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, melakukan praktek pengelolaan keuangan daerah yang adil, transparan dan berpihak pada masyarakat.

Penetapan tujuan dan sasaran pembangunan didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Sesuai dengan misi RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026, Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026

Meningkatkan Kemandirian Buru Selatan secara Berkelanjutan sebagai Kabupaten Yang Rukun, Adil, Sejahtera Berbasis Agro-marine				
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
<i>Memperkuat sektor perhubungan untuk peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat (MISI 1)</i>	Terkoneksinya sistim perhubungan sampai pada pusat aktifitas ekonomi masyarakat	Terkoneksinya sistim perhubungan	1. Membangun dan memaksimalkan sarana dan prasarana transportasi laut maupun darat yang memadai dan terkoneksi di seluruh wilayah Buru Selatan	Terbangunnya Jumlah pelabuhan laut (unit)
				Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (km)
			2. Membangun infrastruktur perekonomian di pedesaan untuk mendorong kelancaran proses produksi, konsumsi dan distribusi secara integratif	Peningkatan usaha mikro
			3. Peningkatan produktivitas usaha perikanan rakyat serta pemberdayaan masyarakat pesisir/ pulau kecil.	Peningkatan Produksi Perikanan
			4. Peningkatan kualitas dan keterampilan petani dan nelayan, baik pada aspek pengetahuan teknis, penguasaan teknologi maupun manajemen usaha.	Peningkatan Kegiatan pelatihan Perikanan
			5. Pengembangan wisata bahari, wisata budaya dan wisata sejarah yang berbasis di pedesaan	Meningkatnya Jumlah Kunjungan wisatawan

Pembentukan Pusat Pengembangan Produk Perikanan dan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Wilayah (MISI 2)	Terciptanya kluster produk unggulan daerah berbasis agro marine	Adanya pusat unggulan pertanian dan perikanan	1. Perancangan master plan cluster pengembangan produk perikanan dan pertanian	Tersedianya master plan pengembangan produk perikanan dan pertanian
			2. Membentuk sentra produk perikanan dan pertanian pada kluster-kluster pengembangan ekonomi kerakyatan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah	Terbentuknya sentra produksi berbasis potensi sumber daya alam wilayah
			3. Membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran aktivitas pada kluster- kluster pengembangan sesuai dengan skala prioritas produk unggulan di setiap wilayah	Terbangunnya sarana prasarana penunjang potensi unggulan daerah
			4. Penciptaan lapangan kerja dengan jalan meningkatkan keterampilan masyarakat dengan mendorong usaha-usaha kreatif sesuai dengan potensi yang dimiliki di setiap desa	Terciptanya SDM berbasis potensi unggulan daerah
			5. Menjamin sistem pemasaran dan <i>quality control</i> bagi produk yang dikembangkan demi terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat dan tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Buru Selatan secara profesional dan berkeadilan	Terciptanya sistem dan quality control dalam pengembangan produk unggulan daerah

<i>Penguatan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan pusat pengembangan ekonomi kecamatan dengan mempertimbangkan geostrategic, geopolitik, dan potensi sumberdaya wilayah (MISI 3)</i>	Tumbuhnya pusat usaha kecil mikro dan menengah sesuai potensi wilayah	Terbentuknya kelompok usaha mikro kecil dan menengah	1. Membentuk kluster-kluster pengembangan ekonomi berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah yang berbasis pada pengembangan bisnis agro-marine.	Terbentuknya kluster usaha berbasis potensi wilayah
			2. Membangun mental dan kemampuan wirausaha di kalangan masyarakat, terutama generasi muda.	Terwujudnya jiwa kewirausahaan generasi muda
			3. Memfasilitasi tersedianya akses modal yang memadai bagi berkembangnya UMKM terutama di sektor produktif.	Terbentuknya sistem dan standarisasi akses permodalan
			4. Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi berkembangnya UMKM, meliputi penyediaan infrastruktur, informasi pasar, kemudahan birokrasi serta keringanan fiskal.	
			5. Mengkonsolidasi perencanaan tata ruang wilayah secara terpadu, sinergis dan komprehensif dalam menjamin keseimbangan ekosistem dan ekologis lingkungan hidup untuk menjamin penyelenggaraan pembangunan secara berkelanjutan, melalui pengusulan dokumen-dokumen perencanaan tata ruang meliputi: RTRW, RDTR, RTBL dan Master Plan sektor lainnya.	Tersedianya dokumen perencanaan spasial
			6. Pengadaan tanah untuk sarana prasarana pembangunan, Peningkatan pembangunan perumahan layak huni bagi masyarakat, melalui program perumahan swadaya dan perumahan khusus	Tersedianya lahan untuk perumahan

<i>Pengembangan sektor pendidikan mendorong peningkatan daya saing daerah (MISI 4)</i>	Terciptanya SDM berbasis potensi unggulan daerah	Terkelolanya potensi unggulan daerah	1. Pendidikan gratis dengan pola yang adil, profesional berorientasi output	Tingginya angka partisipasi sekolah
			2. Mengembangkan pendidikan anak usia dini (PAUD) untuk mencetak landasan yang kokoh bagi penguatan SDM Buru Selatan di masa depan.	Tersedianya lembaga PAUD
			3. Penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai, termasuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan pengembangan teknologi informasi di bidang pendidikan	Tersedianya infrastruktur, SDM, dan pemanfaatan IT bidang Pendidikan
			4. Membangun sekolah-sekolah kejuruan dari level sekolah lanjutan pertama sampai sekolah lanjutan atas, yang berbasis pada potensi wilayah Buru Selatan	Terbangunnya sekolah kejuruan berbasis potensi wilayah
			5. Membangun sistem pendidikan tinggi secara fokus dan professional yang berorientasi pada potensi unggulan daerah melalui pengembangan konsep kemitraan segitiga antara pemerintah, pengusaha dan perguruan tinggi.	Terselenggaranya sistem pendidikan tinggi di Buru Selatan
<i>Perluasan akses Kesehatan berkualitas terjangkau masyarakat (MISI 5)</i>	Tersedianya akses kesehatan bagi masyarakat	Terlayannya kebutuhan Kesehatan masyarakat	1. Pelayanan kesehatan gratis, disertai upaya penyediaan infrastruktur dan SDM kesehatan yang memadai hingga ke tingkat desa untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.	Tersedianya infrastruktur, SDM dan pelayanan kesehatan memadai sampai ketingkat desa
			2. Optimalisasi riset dan development di bidang kesehatan untuk mengantisipasi isu-isu kesehatan dan perkembangan penyakit menular yang dihadapi masyarakat	Terciptanya mekanisme riset dan development di bidang Kesehatan

			3. Meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan di seluruh wilayah Buru Selatan	Terciptanya Lingkungan bersih
<i>Penguatan adat, budaya dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal sosial untuk mendorong akselerasi pembangunan pariwisata daerah (MISI 6)</i>	Majunya pariwisata daerah berbasis kearifan lokal	Terciptanya destinasi wisata berbasis kearifan lokal	1. Pengembangan potensi pariwisata daerah secara profesional yang bersinergi dengan adat, budaya dan kearifan lokal masyarakat Buru Selatan	Terkelolanya potensi wisata lokal secara profesional
			2. Memperkuat sistem kelembagaan adat	
			3. Mendorong aktivitas keagamaan yang bersinergi dengan budaya lokal guna terbentuknya jati diri dan kearifan masyarakat	
			4. Mengupayakan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengembangan budaya lokal guna terjaminnya eksistensi budaya Buru Selatan yang kaya dan beragam	Adanya peraturan daerah tentang kearifan lokal dan aktifitas keagamaan
			5. Menggerakkan aktivitas kepemudaan di tingkat desa sesuai bakat dan kebutuhannya, baik pada bidang keagamaan, olahraga, sosial, maupun seni dan budaya.	Meningkatnya minat pemuda di bidang olahrag, sosial seni, dan budaya
			6. Peningkatan harkat dan martabat serta kualitas hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Terpenuhinya sarana prasarana PMKS
			7. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam membangun kesejahteraan sosial sebagai investasi modal sosial	Terciptanya kepedulian masyarakat dalam investasi modal sosial

			8. Memperkuat ketahanan sosial dalam upaya memperkecil kesenjangan sosial, dengan memberikan perhatian kepada warga masyarakat dalam pembinaan semangat kesetiakawanan sosial dan kemitraan semangat kepahlawanan serta wawasan kebangsaan	
<i>Reformasi birokrasi dan penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional dan bersih dari KKN (MISI 7)</i>	Terwujudnya tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas KKN	Adanya ASN Kabupaten Selatan yang profesional	1. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsinya secara efektif dan profesional	Tersedianya SDM ASN yang profesional
			2. Mengoptimalkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur serta kualitas layanan yang prima bagi masyarakat	Terciptanya sistem akuntabilitas pemerintah yang berkualitas
			3. Menyederhanakan alur birokrasi dengan sistem satu atap guna meningkatkan pelayanan publik yang efisien dan efektif	Terciptanya sistem pelayanan satu atap
			4. Optimalisasi peran putra daerah yang berkualitas secara adil dan berimbang, untuk mengisi posisi-posisi strategis di birokrasi, khususnya posisi yang berhubungan langsung dengan masyarakat	Tersedianya SDM ASN berbasis kearifan lokal
			5. Melakukan praktek pengelolaan keuangan daerah yang adil, transparan dan berpihak pada masyarakat	Terciptanya sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel

4.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2025

4.2.1. Identifikasi Isu Global dan Isu Nasional



Isu Global

- ✚ Stabilitas politik global (perang Ukraina-Rusia)
- ✚ Konflik Israel-Palestina
- ✚ Peran Dagang China dan Amerika
- ✚ Penurunan Inflasi Lambat
- ✚ Tren Suku Bunga yang Masih Tinggi dalam Jangka waktu yang lama
- ✚ Dollar AS masih kuat yang mengakibatkan pelemahan atau depresiasi nilai tukar di seluruh dunia, termasuk rupiah
- ✚ Cash is the king, dimana pelarian modal dalam jumlah besar dari emerging ke Negara maju sebagian besar ke Amerika

4.2.2. Prioritas Pembangunan Nasional

Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah RKP Nasional Tahun 2025 “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” sebagai awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 sangat strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Mengapa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, ada kata-kata akselerasi, mengingat bahwa tahun 2025 adalah awal dari RPJMN Tahun 2025-2029, dan sangat strategis sehingga menjadi bagian dari awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 Indonesia Emas. Pada tahun 2025 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,3-5,6 persen. Selain itu pemerintah juga menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6-7 persen serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,5-5 persen. Sementara itu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan selain akselerasi pertumbuhan ekonomi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 juga difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat atau *well-being* serta konvergensi atau pertumbuhan yang makin merata antar daerah.

RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025 ini disusun dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) untuk mengoptimalkan peran *non state actors* dalam pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan investasi swasta, merangkul dan memberdayakan masyarakat, serta mendorong inovasi dan solusi baru untuk percepatan capaian pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas mengundang pemerintah daerah, swasta, akademisi, partai politik, serta organisasi masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasinya bagi RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025. “Tujuan

FKP antara lain untuk mengoptimalkan peran dan partisipasi *stakeholders* dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antara perencanaan pusat dan daerah.

Membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045. Sasaran (Agenda), Arah (Tujuan) dan Indikator Pembangunan yang terdiri dari 5 Sasaran, 8 Misi (agenda), 17 arah (tujuan) dan 45 indikator utama. Dengan kerangka pikir ini, Indonesia mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita luhur, mewujudkan Visi Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan pada perayaan seratus (100) tahun sebagai bangsa Indonesia yang merdeka di tahun 2045 (Visi Indonesia Emas 2025).

Gambar 4.1. Visi Indonesia 2045



Penyusunan RKPD Kabupaten Buru Selatan mengacu pada tema dan prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Tema RKP Nasional 2025 yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**

Arah Kebijakan Prioritas RKP Tahun 2025 :

- 1) SDM berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa
- 2) Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga informasi pengelolaan sampah
- 3) Ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2025 antara lain :

- 1) Pertumbuhan Ekonomi 5,30-5,60%
- 2) Tingkat Kemiskinan 7,00%-8,00%
- 3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,50%-5,00%
- 4) Rasio Gini 0,379-0,382
- 5) Indeks Modal Manusia ditargetkan sebesar 0,56
- 6) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 38,60%
- 7) Nilai Tukar Nelayan (NTN) 104-105
- 8) Nilai Tukar Petani (NTP) 113-115

Terlebih RPJMN 2025-2029 merupakan tahap pertama pembangunan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, serta RKP 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025-2029. RKP 2025 dan RPJMN 2025-2029 ini menjadi fondasi penting dalam mencapai sasaran dan target RPJPN 2025-2045, menuju Visi Indonesia Emas 2045. “RPJMN ini merupakan fondasi penting. RPJMN 2025-2029 itu sudah kita letakkan sebagai pedoman kinerja semua daerah dan kementerian/lembaga dalam membangun negara ini. Di dalamnya pun ada berbagai macam proyek besar arah pembangunan kewilayahan dan penugasan di setiap Kementerian/Lembaga, serta pendanaannya baik pemerintah dan non pemerintah.

4.2.3 Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Provinsi Maluku Tahun 2025 sejalan dengan Prioritas Nasional serta isu-isu Strategis Pembangunan Provinsi Maluku tahun 2025 maka Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 yaitu: ***“Penguatan Fondasi Transformasi melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***.

Tabel 4.2. Tabel Keterkaitan Strategi, Arah Kebijakan dan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
Peningkatan akses dan mutu pendidikan	Peningkatan perluasan akses dan mutu jenjang pendidikan khusus	1. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pariwisata 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja 3. Peningkatan produktivitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan 4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta peran pemuda dan perempuan dalam pengembangan 5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan 6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan 7. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif
	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta distribusi yang menjangkau seluruh	
	Peningkatan budaya baca dan literasi masyarakat	
Peningkatan akses dan mutu kesehatan	Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat	
	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan paramedik serta distribusi yang menjangkau seluruh wilayah	
	Peningkatan dan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	
	Peningkatan dan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang sesuai dengan standar	
Pengembangan partisipasi generasi muda dan peningkatan prestasi olahraga	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang olahraga dan fasilitas aktivitas kepemudaan	
Mengembangkan memanfaatkan serta membina pemajuan kebudayaan ditengah kemajemukan masyarakat	Penguatan tata kelola kebudayaan dengan fokus pada empat aspek yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan	
Mengoptimalkan pengarusutamaan gender	Peningkatan kualitas hidup dan pelibatan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dalam pembangunan	
Peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah melalui penerapan teknologi tepat guna dan hilirisasi potensi unggulan berbasis sumber daya alam	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, kehutanan, dan perikanan	
	Hilirisasi produk unggulan daerah untuk pengembangan industri strategis	
Meningkatkan daya saing usaha	Peningkatan dan pengembangan usaha dari sisi permodalan, produksi	

	dan pemasaran serta jaringan usahanya	
Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi investasi	Memberikan kemudahan berinvestasi melalui penyederhanaan layanan perizinan	
Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas yang merata dan berkualitas	Akselerasi pengembangan peningkatan desa yang mandiri	
	Penguatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	
Peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah	Pengembangan potensi wisata unggulan daerah	
Pengembangan usaha ekonomi kreatif	Penguatan daya saing produk sub sektor ekonomi kreatif	
Peningkatan kapasitas pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	Peningkatan pengawasan dan pengendalian pembangunan yang berwawasan lingkungan	
	Penguatan mitigasi resiko bencana daerah	
Peningkatan kapasitas produksi, keterjangkauan dan kecukupan pangan yang beragam berkualitas, bergizi dan aman	Peningkatan ketahanan pangan melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan berkelanjutan	
Mengurangi beban pengeluaran dan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan	Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin	
	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin	
Menciptakan iklim usaha yang kondusif	Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin	
Meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan kerja dan kesempatan kerja	Meningkatkan keterampilan kompetensi SDM tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja	
Peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat dan daya saing pariwisata	Penguatan kerukunan antar umat beragama dan suku bangsa serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	

Peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan persebaran penduduk yang optimal yang didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pengumpulan dan pengolahan data kuantitas, dan persebaran mobilitas penduduk serta kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan baik tingkat pusat ataupun daerah	
Pemantapan reformasi birokrasi dan penerapan inovasi daerah	Melakukan penataan dan penguatan organisasi yang efektif dan efisien	
	Peningkatan kematangan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	
	Peningkatan pelayanan dukungan pelaksanaan fungsi DPRD	
	Meningkatkan efektivitas koordinasi dan implementasi kebijakan daerah	
	Meningkatkan kualitas pelayanan penghubung	
	Peningkatan nilai hasil pengawasan kearsipan	
	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan implementasi kelitbangan serta inovasi daerah dalam pembangunan	
	Konsisten dokumen perencanaan dan penganggaran peningkatan kualitas kompetensi Sumber Daya Aparatur	
	Peningkatan penerapan manajemen ASN	
	Peningkatan kualitas pelayanan publik	

Penjabaran Prioritas daerah Provinsi Maluku tahun 2025 ke dalam fokus, program prioritas dan kegiatan prioritas dalam menjawab pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial, maka keterkaitan antara Prioritas dan Arah Kebijakan Nasional dengan Isu Strategis maupun Prioritas Provinsi Maluku Tahun 2025 perlu disinkronisasikan sehingga dapat mensinergikan arah kebijakan Pemerintah Pusat yang telah tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), secara garis besar penjabaran keterkaitan Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah tahun 2025.

4.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025

4.3.1. Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2025

Penentuan isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Dalam menentukan isu strategis, harus disesuaikan dengan jenis dokumen yang akan disusun, apakah itu jangka panjang (20 tahun) jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 260 pasal 1 menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka program-program pembangunan daerah hendaknya diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional.

Tema RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025, menyelaraskan dengan tema nasional dan provinsi serta memperhatikan isu strategis daerah. Dengan demikian, diharapkan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Buru Selatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta turut mendukung pembangunan nasional maupun Provinsi Maluku. Dengan mempertimbangkan prioritas nasional dan Provinsi Maluku serta RPJMD Kabupaten Buru Selatan, maka tema RKPD Kabupaten Buru Selatan tahun 2025 adalah **“Penguatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”**. Adapun arti tema yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 ini adalah pelayanan dasar berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, kependudukan dan infrastruktur dasar (kawasan permukiman, air bersih dan sanitasi masyarakat) dan infrastruktur daerah terpencil sebagai fokus daerah yang masih terisolasi, tertinggal dan merupakan kantong kemiskinan, daerah stunting, serta menekankan pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi termasuk pertanian, agropolitan, pariwisata, UMKM dan ketenagakerjaan.

4.3.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

Sejalan dengan Program Prioritas yang menjadi fokus utama Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Prioritas Pembangunan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025, meliputi :

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BURU SELATAN	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BURU SELATAN
Reformasi Birokrasi	Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsinya secara efektif dan profesional
penanggulangan kemiskinan	Meningkatnya sektor unggulan pertumbuhan daerah dan meningkatnya peran investasi terhadap ekonomi daerah
Pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Pengadaan tanah untuk sarana prasarana pembangunan, Peningkatan pembangunan perumahan layak huni bagi masyarakat, melalui program perumahan swadaya dan perumahan khusus
Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM	Pelayanan kesehatan gratis, disertai upaya penyediaan infrastruktur dan SDM kesehatan yang memadai hingga ke tingkat desa untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Peningkatan kualitas pendidikan.
Pembangunan sarana dan prasarana wilayah	Membangun dan memaksimalkan sarana dan prasarana transportasi laut maupun darat yang memadai dan terkoneksi di seluruh wilayah Buru Selatan

4.3.2.1. Reformasi Birokrasi

Keberhasilan proses pembangunan daerah sangat berkorelasi dengan reformasi birokrasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu membangun aparatur yang berkualitas, kompeten, dan berkinerja baik menjadi syarat mutlak agar mampu mengimplementasikan semua bentuk cita-cita pembangunan daerah. Penting juga untuk membangun sistem pelayanan publik yang prima, kelembagaan yang efektif dan efisien, serta manajemen pemerintahan yang akuntabel dan bersih.

Dalam rangka mendukung proses pembangunan daerah Kabupaten Buru Selatan kedepan maka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) harus diimplementasikan, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Sasarannya adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat;
2. Meningkatnya manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dengan indikator opini BPK, nilai SAKIP, dan indeks persepsi korupsi;
3. Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan profesionalitas ASN, dengan indikator indeks profesionalitas ASN dan rasio kelembagaan PD yang efektif dan efisien (persen).

Arah kebijakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran tersebut adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta terbuka yang didukung dengan profesionalitas aparatur dan kelembagaan yang efektif serta efisien. Strategi yang dilakukan meliputi:

1. Membangun *open government* melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik, termasuk partisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Mendorong pengembangan ASN yang inovatif, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi;
3. Membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
4. Meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP dan perkuatan SPIP;
5. Meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakkan perda;
6. Meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;
7. Memperbaiki tata laksana organisasi;
8. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja;
9. Menuju “keperantaraan dan *enterpreuneur*” dalam tata kelola pemerintahan.

4.3.2.2. Penanggulangan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan dan pengangguran merupakan persoalan yang kompleks, yang tidak bisa ditangani secara instan tanpa kerjasama dari berbagai pihak. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan setiap unsur pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat, serta unsur swasta dan masyarakat. Dalam agenda kebijakan pembangunan Kabupaten Buru Selatan kedepan. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi agenda utama yang harus dilakukan, yang bertujuan untuk menurunkan penduduk miskin di Buru Selatan. Sasaran utamanya adalah menurunnya penduduk miskin perdesaan (yang lebih dominan) dan penduduk miskin perkotaan secara proporsional.

Upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dalam lima tahun kedepan akan difokuskan pada dua hal utama yaitu penyediaan *basic life access* dan penguatan *sustainable livelihood*. Kebijakan penyediaan *basic life access* mengarah pada penyediaan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi hak setiap masyarakat terutama masyarakat miskin. Kebijakan ini sifatnya “wajib” dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buru Selatan, sebagai bentuk kewajiban negara untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat.

Kebijakan kedua yaitu penguatan *sustainable livelihood* yang mengarah pada penguatan mata pencaharian masyarakat miskin agar berkelanjutan. Bahkan diharapkan kebijakan ini mengarah pada konsep “menaikkan kelas” masyarakat miskin dalam konteks kehidupan ekonomi masyarakat. Sehingga kebijakan ini fokus pada penguatan ekonomi masyarakat melalui upaya-upaya pemberdayaan dan pendampingan, serta perbaikan mental masyarakat agar mau “membangun” dirinya menuju pada kehidupan yang lebih baik.

Strategi yang dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dijabarkan sebagai berikut.

1. Penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan meliputi:
 - a. akses rumah layak termasuk air bersih, sanitasi, listrik, komunikasi
 - b. penanganan kawasan permukiman kumuh,
 - c. akses pendidikan, kesehatan, dan pangan,
 - d. perlindungan sosial bagi masyarakat,
 - e. kepemilikan administrasi kependudukan,
 - f. fasilitasi kepemilikan sertifikat lahan;
2. Penguatan *sustainable livelihood* meliputi:
 - a. fasilitasi akses terhadap aset, modal, manajemen, dan pasar,
 - b. penciptaan *start up* wirausaha baru,
 - c. peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja,
 - d. pemberdayaan ekonomi kelompok dan PMKS.
3. Dukungan implementasi strategi tersebut dengan perkuatan basis data, basis spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang kontinyu, serta pelibatan pihak lain (non pemerintah).

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Buru Selatan dalam lima tahun kedepan adalah persentase penduduk miskin secara total maupun dilihat dari persentase penduduk miskin perdesaan dan perkotaan.

4.3.2.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan selama ini ditopang oleh tiga sektor unggulan yaitu sektor administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib, konstruksi, perdagangan dan jasa, serta pertanian, kehutanan dan perikanan. Dalam lima tahun kedepan, diproyeksikan sektor ini akan tetap memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi Kabupaten Buru

Selatan, serta didukung dengan sektor pariwisata dan investasi yang semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung daya saing ekonomi Kabupaten Buru Selatan yang berbasis pada sektor-sektor unggulan, kebijakan perekonomian daerah Buru Selatan dalam lima tahun ke depan ditujukan untuk menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berdaya saing, berbasis potensi unggulan lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan, dan berkelanjutan yang diindikasikan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Sasaran yang dituju fokus pada dua hal yaitu:

1. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah (pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata), dengan indikator laju pertumbuhan sektor pertanian, perikanan industri pengolah, perdagangan, dan kontribusi sektor pariwisata pada PAD;
2. Meningkatnya peran investasi terhadap ekonomi daerah, yang diindikasikan dengan indikator kinerja dalam laju pertumbuhan investasi.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Buru Selatan kedepan diarahkan pada penguatan kontribusi sektor unggulan yang terintegrasi (produksi dan distribusi) dan mengarah pada digital ekonomi dan ekonomi kreatif berbasis sumber daya lokal. Sedangkan strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

1. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan melalui:
 - a. Peningkatan keterampilan petani dalam pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah (*on farm* menuju *off farm*),
 - b. penyediaan bibit, benih yang berkualitas, dan pupuk,
 - c. penyediaan dan pemerataan alsintan,
 - d. peningkatan prasarana irigasi ;
 - e. pengembangan teknologi tepat guna di bidang pertanian dan perkebunan;
 - f. pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok (*corporate farming*),
 - g. peningkatan mutu dan hasil ternak,
 - h. peningkatan peran pemerintah dalam keperantaraan melalui revitalisasi peran pertanian (penyeimbang, penelitian pengembangan, pendapatan dan pengurangan kemiskinan);
2. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil pengolahan perikanan melalui:
 - a. peningkatan keterampilan nelayan,
 - b. penyediaan prasarana dan sarana perikanan tangkap (alat tangkap ramah lingkungan, armada dan alat pancing tonda Keramba Jaring Apung, dll),

- c. peningkatan kualitas dan kapasitas unit pengolah ikan untuk ekspor;
- 3. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil hutan melalui:
 - a. peningkatan kualitas tata kelola kehutanan,
 - b. penerapan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) dan SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu),
 - c. peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai mitra usaha kehutanan (hutan tanaman rakyat, HKm, hutan rakyat),
 - d. penyediaan bibit tanaman hutan;
 - e. peningkatan keterampilan masyarakat dalam pengolahan hasil hutan;
- 4. Meningkatkan produksi dan produktivitas industri kecil, mikro, dan menengah melalui:
 - a. peningkatan nilai tambah diversifikasi produk, dan hilirisasi industri,
 - b. mengembangkan inovasi teknologi produksi,
 - c. fasilitasi akses permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan non perbankan,
 - d. meningkatkan akses pasar dengan mengembangkan digital ekonomi,
 - e. pengembangan kawasan industri sesuai rencana tata ruang;
- 5. Mendorong pertumbuhan UMKM melalui:
 - a. peningkatan kualitas tenaga kerja (tingkat pendidikan dan kualitas manajerial),
 - b. memberikan kemudahan berusaha bagi UMKM (perijinan, pajak),
 - c. fasilitasi akses permodalan dari perbankan,
 - d. meningkatkan akses pasar dengan mengembangkan ekonomi digital
 - e. peningkatan infrastruktur produksi, distribusi, promosi, dan jejaring pemasaran,
 - f. pengembangan inovasi dan teknologi,
 - g. fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk UMKM;
- 6. Mendorong pariwisata berbasis masyarakat melalui:
 - a. peningkatan kualitas prasarana dan sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas pelaku pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi wisata;
 - c. meningkatkan kerjasama dengan pelaku wisata;
 - d. meningkatkan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata;
- 7. Perbaiki iklim investasi yang semakin kondusif melalui:
 - a. pemberian kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan, dan prosedur perijinan);

- b. memperbaiki sistem dan layanan perijinan;
- c. mengembangkan kebijakan investasi padat karya;
- d. mengembangkan *digital investment promotion*;
- e. mengembangkan investasi yang mengakomodasi produk-produk unggulan;

4.3.2.4. Peningkatan Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM

Salah satu pondasi dasar pembangunan yang menggerakkan setiap prosesnya adalah sumberdaya manusia. Oleh karena itu pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing menjadi penting untuk dilakukan dalam setiap proses pembangunan daerah. Dengan kondisi sumberdaya manusia Kabupaten Buru Selatan saat ini, maka dalam lima tahun kedepan pembangunan Kabupaten Buru Selatan akan meletakkan sumberdaya manusia sebagai subyek dan obyek utama dalam pembangunan. Pembangunan sumberdaya manusia ditujukan untuk membangun sumberdaya manusia Buru Selatan yang berkualitas dan berdaya saing, yang diukur dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Sasarannya adalah:

1. Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat, dengan ukuran rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah (tahun);
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator, dengan indikator angka harapan hidup (tahun);
3. Meningkatnya serapan dan produktivitas tenaga kerja, dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (persen) dan produktivitas tenaga kerja (rupiah per kapita).

Guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sumberdaya manusia Kabupaten Buru Selatan maka kebijakannya mengarah pada:

1. Penguatan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan;
2. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
3. Peningkatan kualitas tenaga kerja berbasis kompetensi.

Strategi yang akan diimplementasikan meliputi:

1. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui:
 - a. Peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan dengan programsekolah gratis.;
 - b. Pengembangan kurikulum berbasis *skill, knowledge, attitude*;
 - c. Peningkatan distribusi prasarana dan sarana pendidikan di setiap kecamatan;
 - d. Meningkatkan kualitas, dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik;
 - e. Meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan;

- f. Mengoptimasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan;
 - g. Mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun strategi peningkatan kualitas pendidikan;
 - h. Pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan;
 - i. Peningkatan literasi (minat membaca dan menulis) masyarakat terutama anak usia sekolah;
 - j. Pengembangan nilai-nilai budaya terutama pada anak usia sekolah;
2. Perbaiki kualitas dan akses pelayanan kesehatan melalui upaya:
 - a. Peningkatan akses pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat,
 - b. Peningkatan dan pemerataan prasarana dan sarana kesehatan,
 - c. Peningkatan upaya penerapan paradigma sehat,
 - d. Peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan,
 3. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan keluarga, dengan membangun gerakan perubahan cara pandang masyarakat tentang hak perempuan, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak.
 4. Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi melalui:
 - a. Penguatan program pendidikan *kompetensi sesuai kebutuhan* daerah;
 - b. Mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi (standar, pelatihan, sertifikasi);
 - c. Memperluas lapangan kerja dengan pengembangan industri padat karya;
 - d. Memperluas akses informasi pendidikan kejuruan dan vokasi dalam mendukung *demand* tenaga kerja ke depan;
 - e. Mendorong pengembangan wirausaha, termasuk wirausaha pemuda;
 - f. Mendorong kebijakan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru;
 - g. Mengembangkan budaya inovatif;
 - h. Mendorong kebijakan afirmatif untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal.

4.3.2.5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah

Pembangunan esensinya adalah dalam rangka mengurangi kesenjangan dan ketimpangan wilayah menuju pada masyarakat yang sejahtera. Kondisi di Kabupaten Buru Selatan saat ini berdasarkan pada Indeks Williamson dapat digambarkan bahwa tingkat kesenjangan

wilayah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Buru Selatan masih cukup tinggi.

Oleh karena itu, pembangunan yang berorientasi pada pemerataan menjadi hal yang penting untuk dilakukan dalam lima tahun kedepan. Upaya pemerataan dapat dilakukan dengan mendistribusikan berbagai aktivitas ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal, yang didukung dengan kemudahan aksesibilitas sebagai prasarana distribusi barang dan jasa. Untuk itu, lima tahun kedepan salah satu tujuannya adalah meningkatkan pemerataan pembangunan daerah, sasarannya :

1. Meningkatnya pemerataan aksesibilitas wilayah, dengan indikator rasio jalan dalam kondisi baik dan Indeks Pelayanan Transportasi (dalam persen);
2. Meningkatnya pemerataan fasilitas dasar untuk masyarakat, dengan indikator berupa laju penurunan backlog rumah, cakupan pemenuhan air minum layak, cakupan pemenuhan sanitasi perkotaan, dan cakupan pemenuhan sanitasi perdesaan (dalam persen);
3. Meningkatnya pemerataan prasarana dan sarana ekonomi, dengan indikator indeks sarana ekonomi wilayah.

Kebijakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut diarahkan untuk penguatan konektivitas antar wilayah, didukung pemerataan prasarana dan sarana dasar dan ekonomi kecamatan dan pedesaan. Sedangkan strateginya meliputi :

1. Pembangunan sarana dan prasarana dalam wilayah ibukota kabupaten Buru Selatan;
2. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan yang menghubungkan Kota Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
3. Mengembangkan angkutan umum lintas regional, perkotaan, Kecamatan dan perdesaan;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana simpul dan pemanduan moda transportasi diantaranya terminal, pelabuhan dan bandara;
5. Meningkatkan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
6. Meningkatkan jaringan air minum layak berbasis kawasan dan masyarakat;
7. Meningkatkan sanitasi layak melalui pengelolaan limbah komunal dan pengelolaan persampahan berbasis kawasan dan masyarakat;
8. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pasar, pusat perdagangan, dan pusat jasa lainnya melalui penataan kawasan.

Upaya mewujudkan pencapaian pembangunan daerah sesuai visi, misi pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan diperlukan arah kebijakan pembangunan pada periodisasi pemerintahan sebagai pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan tahun 2024 guna mencapai tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan tersebut. Sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih terdapat fokus utama program prioritas desa unggul, yaitu :

a. 5000 LAPANGAN KERJA BARU

-  Penciptaan wirausaha baru desa
-  Bantuan modal usaha
-  Pelatihan tenaga kerja berbasis desa
-  Pembentukan Kelompok Usaha Desa

b. DESA PINTAR, DESA SEHAT

-  Satu Desa Satu Puskesmas
-  Pelayanan Kesehatan Reproduksi Gratis
-  Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
-  Uang Sekolah , buku dan seragam Gratis SD dan SMP
-  1000 Beasiswa Prestasi Pelajar dan Mahasiswa
-  Pendidikan Orang Basudara pertukaran pelajar
-  Sarana olahraga Desa

c. 1000 PEREMPUAN DESA MANDIRI

-  Bantuan modal usaha perempuan mandiri
-  Pelatihan usaha perempuan mandiri

d. DESA PRODUKTIF

-  Satu desa satu Produk Unggulan
-  Satu Desa Satu Badan Usaha
-  Smart Desa

e. NELAYAN DAN PETANI UNGGUL

-  Bantuan Kapal & Alat Tangkap
-  Bantuan pupuk , Bibit dan Alat pertanian
-  Bantuan Modal kerja Tani & Nelayan
-  Membangun coldstorage pada zona tangkap
-  Menyediakan akses pasar hasil tangkap.

Seiring dengan pemenuhan atau dukungan terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Maluku dan Prioritas Kabupaten Buru Selatan, terdapat Program, kegiatan dan sub kegiatan penunjang prioritas pembangunan Kabupaten Buru Selatan di tahun 2025, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3. Program dan Kegiatan Penunjang Prioritas Pembangunan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025

Prioritas Pembangunan	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
Prioritas 1 : Reformasi Birokrasi	1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Fasilitas Kerja Sama Daerah	Setda
		2. Administrasi Tata Pemerintahan	B. Pemerintahan
		3. Fasilitas dan Koordinasi Hukum	B. Hukum
		4. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	B. Kesra
	2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Penataan Organisasi	B. Organisasi
		2. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	B. Protokoler
	3. Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	B. Pengadaan Barang dan Jasa
		2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	B. Administrasi Pembangunan
		1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	B. Perekonomian dan SDA
	4. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bappelitbang
		2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
		3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
		4. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
	5. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappelitbang
		2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
		3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
	6. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Bappelitbang

		2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
	4. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
	5. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD
	6. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan
	7. Program Kepegawaian Daerah	1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 2. Mutasi dan Promosi ASN 3. Pengembangan Kompetensi ASN	BKPSDM
	8. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pengembangan Kompetensi Teknis 2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BKPSDM
	9. Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah
	10. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1. Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Daerah
Prioritas 2 : Penanggulangan Kemiskinan	1. Program Pengelolaan Pendidikan	2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 4. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 5. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan

	2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Salim Alkatiri
	3. Program Kawasan Permukiman	1. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Perumahan
	4. Program Penanggulangan Bencana	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
	5. Program Rehabilitasi Sosial	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
	6. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
	7. Program Penanganan Bencana	1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
	8. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
	9. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
	10. Program Penanganan Kerawanan Pangan	1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan
	11. Program Pencatatan Sipil	1. Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Dukcapil
	12. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas Dukcapil

	13. Program Pengelolaan Pelayaran	1. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dinas Perhubungan
	14. Program Administrasi Pemerintahan Desa	1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan
	15. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan
	16. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan UKM
	17. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1. Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan
	18. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dinas Perikanan
	19. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Dinas Perikanan
	20. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
	21. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1. Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
Prioritas 3 : Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Dinas LH
	2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	1. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Dinas LH

	3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinas Koperasi dan UKM
	4. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
	5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan
	6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan
	7. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PTSP
	8. Program Pelayanan Penanaman Modal	1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas PTSP
	9. Program Promosi Penanaman Modal	1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PTSP
	10. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata
	11. Program Pemasaran Pariwisata	1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri DayaTarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata
	12. Program Pengembangan Kebudayaan	1. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata
	13. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata

	14. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
	15. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
	16. Program Penyuluhan Pertanian	1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
	17. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Dinas Perdagangan
	18. Program Pengembangan Ekspor	1. Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan
	19. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Dinas Perdagangan
	20. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan
	21. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan
Prioritas 4 : Peningkatan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	1. Program Pengelolaan Pendidikan	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
	2. Program Pengembangan Kurikulum	1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan
	3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Salim Alkatiri
		2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Dinas Kesehatan

		3. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
		2. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 3. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	5. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 3. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 4. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dinas Kesehatan
	6. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan

	7. Program Pengendalian Penduduk	1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dinas Kesehatan
	9. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Kesehatan
	10. Program Perlindungan Perempuan	1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan
	11. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,	1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat	Dinas Pemberdayaan

	Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	12. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	1. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Dinas LH
	13. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas LH
	14. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas LH
Prioritas 5 : Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
	2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
	3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
	4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
	5. Program Penataan Bangunan Gedung	1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Dinas PUPR

	6. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
	7. Program Penyelenggaraan Jalan	1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
	8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
	9. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1. Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rpplh) Kabupaten/Kota 2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Klhs) Kabupaten/Kota	Dinas LH
	10. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas LH
	11. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1. Penyimpanan Sementara Limbah B3	Dinas LH
	12. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1. Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin Pplh Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas LH
	13. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) Kabupaten/Kota	Dinas LH

	14. Program Pengelolaan Persampahan	1. Pengelolaan Sampah	Dinas LH
	15. Program Pengembangan Perumahan	1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan
		2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan
		3. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan
	16. Program Kawasan Permukiman	1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Perumahan
	17. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Dinas Perumahan
	18. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan
	19. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan
	20. Program Pengelolaan Tanah Kosong	1. Penyelesaian Masalah Tanah Kosong 2. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Dinas Perumahan
	21. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
	22. Program Pengelolaan Pelayaran	1. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah	Dinas Perhubungan

		Kabupaten/Kota 3. Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	
	23. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kominfo
	24. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Kominfo
	25. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kominfo

Sumber : Renja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 dari Aplikasi SIPD-RI, 2024

1.4. PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Pokok Pikiran DPRD RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunannya memperhatikan saran dan pendapat DPRD berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD tersebut disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

Hasil penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2024 dari 20 anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut :

**Tabel 4.4. Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025**

No.	OPD Pengampu	Jumlah		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Bagian Kesra (Setda)	1	1	1
2.	Dinas Pendidikan	2	4	7
3.	Dinas Kesehatan	2	2	2
4.	Dinas PUPR	3	3	5
5.	Dinas Lingkungan Hidup	1	1	1
6.	Dinas Pertanian	2	3	5
7.	Dinas Perikanan	1	1	1
8.	Dinas Koperasi dan UKM	1	1	1

9.	Dinas Perdagangan	1	1	1
10.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1	1	1
11.	Dinas Ketahanan Pangan	1	1	1
12.	Dinas Sosial	1	1	1
13.	BKPSDM	2	2	2
14.	RSUD	2	2	2
Total		21	21	31

Sumber : Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI) Kab. Buru Selatan, 2024

BAB V
RENCANA KERJA
DAN PENDANAAN
DAERAH

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan daerah Kabupaten Buru Selatan berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dengan berpedoman pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Buru Selatan tahun 2025, serta mempertimbangkan RPJMN dan RPJMD Provinsi Maluku serta RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026 untuk mendukung pembangunan secara menyeluruh.

5.1. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025

Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab sebelumnya, maka rancangan kerangka pendanaan dan pagu indikatif Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan untuk tahun 2025 disajikan pada tabel 5.1. berikut :

**Tabel 5.1. Rancangan Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025**

Uraian	Realisasi APBD 2023	Target APBD 2024	Proyeksi APBD 2025
A. PENDAPATAN DAERAH			
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	21.866.283.741	70.838.586.800	40.741.475.000
- Pajak Daerah	4.788.569.430	6.700.096.800	7.370.107.000
- Retribusi Daerah	4.149.761.083	5.331.250.000	5.864.375.000
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.400.517.371	4.279.380.000	4.707.318.000
- Lain-lain PAD Yang Sah	7.527.435.857	54.527.860.000	22.799.675.000
2. Pendapatan Transfer/ Perimbangan	641.757.013.572	714.409.119.000	784.350.030.000
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	627.690.845.238	699.409.119.000	769.350.030.000
- Pendapatan Transfer Antar Daerah	14.066.168.000	15.000.000.000	15.000.000.000
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	3.300.000.000	3.300.000.000
- Pendapatan Hibah	-	-	-
- Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	3.300.000.000	3.300.000.000
JUMLAH PENDAPATAN	663.623.295.313	788.547.705.800	828.391.505.000
B. BELANJA			
1. Belanja Operasi	454.087.302.728	555.691.838.279	570.387.167.000
- Belanja Pegawai	189.477.981.150	270.522.043.218	298.035.154.000
- Belanja Barang dan Jasa	218.297.058.753	215.049.010.849	226.553.912.000
- Belanja Subsidi	1.490.000.000	2.840.000.000	2.840.000.000
- Belanja Hibah	32.332.117.200	54.701.447.300	27.737.104.000
- Belanja Bantuan Sosial	12.490.145.625	12.579.336.912	15.220.997.000
2. Belanja Modal	77.658.778.723	120.798.420.075	134.430.992.000
- Belanja Modal Tanah	3.239.005.500	1.772.518.000	2.500.000.000

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.534.699.901	34.087.129.096	38.495.842.000
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.236.769.546	38.602.357.108	42.462.593.000
- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	29.490.826.576	46.111.415.871	50.722.557.000
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	157.477.200	225.000.000	250.000.000
3. Belanja Tidak Terduga	1.991.837.000	4.000.000.000	4.400.000.000
- Belanja Tidak Terduga	1.991.837.000	4.000.000.000	4.400.000.000
4. Belanja Transfer	105.312.755.628	128.339.405.446	135.173.346.000
- Belanja Bagi Hasil	-	-	-
- Belanja Bantuan Keuangan	105.312.755.628	128.339.405.446	135.173.346.000
JUMLAH BELANJA	639.050.674.079	808.829.663.800	844.391.505.000
C. PEMBIAYAAN			
1. Penerimaan Pembiayaan	19.002.524.457	21.781.958.000	18.000.000.000
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	19.002.524.457	21.781.958.000	18.000.000.000
2. Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000
- Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	500.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000
PEMBIAYAAN NETTO	18.502.524.457	20.281.958.000	16.000.000.000
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	43.075.147.691	-	-

Sumber : BPKAD Kab. Buru Selatan, 2024

5.2. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2025

Indikasi rencana program tahun 2025 disusun berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025, yang mempertimbangkan RPJMN dan RPJMD Provinsi Maluku serta RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026 untuk mendukung pembangunan secara menyeluruh.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025. Musrenbang Tahun 2025 adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RKPD Tahun 2025, dimana pemangku kepentingan merupakan segenap pihak yang terkait dengan pembangunan yaitu pihak akademis, dunia usaha, komunitas pemerintah dan masyarakat Buru Selatan. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah, wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta merupakan kegiatan prioritas yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat diuraikan dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahun 2025 disusun berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Buru Selatan yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas

pokok dan fungsinya. Program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel lampiran 5.1 (Renja OPD Tahun 2025).

Tabel 5.2. Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan per masing-masing Urusan Pemerintahan pada RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025

No.	Bidang Urusan	Jumlah			Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
I	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
1.1	Bidang Pendidikan	4	14	105	225.384.888.725	Dinas Pendidikan
1.2	Bidang Kesehatan	5	20	106	97.315.925.805	Dinas Kesehatan dan RSUD
1.3	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	9	14	43	57.379.431.000	Dinas PUPR
1.4	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	14	36	4.564.138.000	Dinas Perumahan
1.5	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	5	23	54	6.752.487.968	Satpol-PP dan BPBD
1.6	Bidang Sosial	5	11	29	4.500.000.000	Dinas Sosial
II	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
2.1	Bidang Tenaga Kerja	1	1	1	500.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
2.2	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	2	2	125.000.000	Dinas Pemberdayaan
2.3	Bidang Pangan	4	13	25	3.892.894.860	Dinas Ketahanan Pangan
2.4	Bidang Pertanahan	2	3	3	405.300.000	Dinas Perumahan
2.5	Bidang Lingkungan Hidup	11	19	37	5.959.130.000	Dinas LH
2.6	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	8	23	2.863.479.000	Dinas Capil
2.7	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	8	20	4.171.618.000	Dinas Pemberdayaan
2.8	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga	3	8	26	3.404.032.500	Dinas Kesehatan

	Berencana					
2.9	Bidang Perhubungan	3	14	27	5.290.340.000	Dinas Perhubungan
2.10	Bidang Komunikasi dan Informatika	3	9	21	2.626.354.000	Dinas Kominfo
2.11	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	4	9	16	1.946.421.000	Dinas Koperasi dan UKM
2.12	Bidang Penanaman Modal	3	10	22	2.731.349.000	Dinas PTSP
2.13	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3	15	30	3.834.624.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.14	Bidang Perpustakaan	2	6	19	2.332.350.000	Dinas Perpustakaan
2.15	Bidang Kearsipan	2	5	9	421.650.000	Dinas Perpustakaan
2.16	Bidang Persandian	1	1	1	50.000.000	Dinas Kominfo
III Urusan Pemerintahan Pilihan						
3.1	Bidang Kelautan dan Perikanan	4	14	28	8.101.700.000	Dinas Perikanan
3.2	Bidang Pariwisata	3	8	26	3.067.661.000	Dinas Pariwisata
3.3	Bidang Kebudayaan	2	2	2	530.920.000	Dinas Pariwisata
3.4	Bidang Pertanian	4	8	18	10.026.921.000	Dinas Pertanian
3.5	Bidang Kehutanan	1	1	2	60.000.000	Dinas LH
3.6	Bidang Perdagangan	5	13	25	3.475.988.000	Dinas Perdagangan
3.7	Bidang Perindustrian	2	2	2	320.000.000	Dinas Perdagangan
IV Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan						
4.1	Sekretariat Daerah	3	19	162	42.740.994.642	Sekretariat Daerah dan 9 Bagian
4.2	Sekretariat DPRD	2	14	38	27.475.866.000	Sekretariat DPRD
V Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan						
5.1	Perencanaan	3	13	51	8.724.137.100	Bappelitbang
5.2	Keuangan	5	19	74	17.823.801.000	BPKAD dan Badan Pendapatan Daerah
5.3	Kepegawaian	1	8	13	5.594.971.000	BKPSDM
5.4	Pendidikan dan Pelatihan	1	2	3	2.666.763.000	BKPSDM
5.5	Penelitian dan Pengembangan	1	3	5	396.410.900	Bappelitbang
VI Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan						
6.1	Inspektorat Daerah	3	9	28	5.200.000.000	Inspektorat Daerah

VII	Unsur Kewilayahan					
7.1	Kecamatan	20	48	95	12.606.748.000	6 Kecamatan
VIII	Unsur Pemerintahan Umum					
8.1	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	9	22	40.733.681.200	Kesbangpol
Total						

Sumber : Renja OPD Tahun 2025 pada SIPD-RI, 2024

5.3. RENCANA PENDANAAN DAN TARGET KINERJA PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Tabel 5.3. Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025

No.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Realisasi 2023 (Rp.)	Target 2024 (Rp.)	Pagu Indikatif Tahun 2025 (Rp.)
I.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.620.094.060	8.711.577.000	10.398.610.000
A.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.620.094.060	8.711.577.000	6.142.577.000
1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	762.446.000	4.455.544.000	1.886.544.000
1.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	-	2.569.000.000	2.569.000.000
1.2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	250.000.000	300.000.000	300.000.000
1.3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-	234.800.000	234.800.000
1.4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	327.984.000	259.692.000	259.692.000
1.5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	184.482.000	268.318.000	268.318.000
1.6	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	265.860.000	265.860.000
1.7	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	-	230.874.000	230.874.000
1.8	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-	327.000.000	327.000.000
2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	648.504.000	3.919.197.000	3.919.197.000
2.1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	124.988.000	56.925.000	56.925.000
2.2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	162.767.000	162.767.000
2.3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	274.951.000	211.100.000	211.100.000
2.4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	248.565.000	239.050.000	239.050.000
2.5	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	172.532.000	172.532.000
2.6	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	-	209.940.000	209.940.000
2.7	Pembangunan Ruang Kelas Baru	-	2.645.483.000	2.645.483.000
2.8	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-	221.400.000	221.400.000
3.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	209.144.060	336.836.000	336.836.000
3.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	117.657.500	150.000.000	150.000.000
3.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	-	75.000.000	75.000.000
3.3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	91.486.560	111.836.000	111.836.000
II.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	34.400.000	1.029.753.000	1.029.753.000

A.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	34.400.000	1.029.753.000	1.029.753.000
1.	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.400.000	1.029.753.000	1.029.753.000
1.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	34.400.000	789.733.000	789.733.000
1.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	18.500.000	18.500.000
1.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	42.500.000	42.500.000
1.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	-	29.000.000	29.000.000
1.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	-	13.000.000	13.000.000
1.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	81.460.000	81.460.000
1.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	55.560.000	55.560.000
III.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.031.320.500	809.170.000	809.170.000
A.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	350.000.000	204.720.000	204.720.000
1.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000	204.720.000	204.720.000
1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	350.000.000	204.720.000	204.720.000
B.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	681.320.500	604.450.000	604.450.000
1.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	681.320.500	604.450.000	604.450.000
1.2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	681.320.500	604.450.000	604.450.000
IV.	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.338.000	76.206.000	76.206.000
A.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	42.338.000	76.206.000	76.206.000
1.	Kegiatan Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	42.338.000	76.206.000	76.206.000
1.1	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	42.338.000	76.206.000	76.206.000
V.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	538.252.000	469.397.000	584.757.000
A.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	426.400.000	405.000.000	405.000.000
1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	426.400.000	405.000.000	405.000.000
1.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	426.400.000	405.000.000	405.000.000
B.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	15.158.000	15.516.000	15.516.000

1.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.158.000	15.516.000	15.516.000
1.1	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	15.158.000	15.516.000	15.516.000
C.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	96.694.000	48.881.000	164.241.000
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	96.694.000	48.881.000	48.881.000
1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	96.694.000	48.881.000	48.881.000
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	55.504.000	55.665.000	55.665.000
2.6	Penyusunan Rencana Kontijensi	55.504.000	55.665.000	55.665.000
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	95.883.000	59.695.000	59.695.000
3.1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	95.883.000	59.695.000	59.695.000
VI.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	87.990.000	83.140.000	83.140.000
A.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	87.990.000	48.140.000	48.140.000
1.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	87.990.000	48.140.000	48.140.000
1.1	Pemberian Layanan Rujukan	87.990.000	48.140.000	48.140.000
B.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	35.000.000	35.000.000
1.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	35.000.000	35.000.000
1.1	Penyediaan Makanan	-	35.000.000	35.000.000
TOTAL				12.981.636.000

5.4. RENCANA ALTERNATIF PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025

Rencana program/kegiatan yang bersumber dari APBN/APBD I tahun 2025 yang merupakan rencana alternatif pendanaan pembangunan tahun 2025 dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4 Rencana Program/Kegiatan yang Bersumber dari APBN/APBD I Tahun 2025

No.	OPD	Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	Sumber Dana
1.	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	4.000.000.000	APBN/APBD I
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.580.000.000	APBN/APBD I
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	49.500.000.000	APBN
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.650.000.000	APBD I
			20.000.000.000	APBN/APBD I

		Program Penyelenggaraan Jalan	160.000.000.000	APBN/APBD I
3.	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	90.360.000.000	APBN/APBD I
		Program Pengelolaan Penerbangan	500.000.000	APBN/APBD I
4.	Dinas Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	1.825.000.000	APBN/APBD I
5.	BPBD	Program Penanggulangan Bencana	3.982.200.000	APBN/APBD I
4.	Dinas Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Menyesuaikan	APBN/APBD I
5.	Dinas Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	7.925.000.000	APBN/APBD I
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.000.000.000	APBN/APBD I
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	4.000.000.000	APBN/APBD I
6.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PP dan PA	Program Penataan Desa	2.450.000.000	APBN/APBD I
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	648.000.000	APBN/APBD I
Total			350.770.200.000	

BAB VI
KINERJA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DAERAH

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan pada akhir tahun perencanaan. Indikator kinerja daerah diperlukan dalam penyusunan dokumen perencanaan karena bisa memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan terhadap kemajuan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan juga pencapaian keberhasilan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Penetapan indikator kinerja tahunan juga menunjukkan ketepatan arah kebijakan yang digariskan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan juga memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan sehingga kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir tahun 2025 dapat tercapai

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026 indikator kinerja daerah diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci yang dilihat dari setiap aspek dan fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan. Sejumlah indikator target yang merupakan panduan dalam pencapaian Visi-Misi Bupati Periode 2021-2026.

6.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan indikator kinerja utama selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel. 6.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Buru Selatan Tahun Target 2025

No.	Indikator	Kondisi Awal 2020	Tahun Target 2025	Kondisi Akhir 2026
1	2	3	4	5
1	Terkoneksinya sistim perhubungan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (245,48 km)	276,17	282,30
		Panjang jalan dilalui roda 4 (385,76 Km)	403,43	407,07
2	Terbangunnya pelabuhan laut (unit)	Fasilitas sisi darat pelabuhan laut (8 Unit)	8	8
3	Adanya pusat unggulan pertanian dan perikanan	NTN(115,00 %)	121,00	122,00
		NTP (139,59 %)	143,11	143,83
		Kontribusi sektor Pertanian Terhadap PDRB (36,60 %)	37,52	37,71

5	Tersedianya master plan pengembangan produk perikanan dan pertanian	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (ada/tidak ada)	ada	ada
6	Peningkatan Kegiatan Pelatihan Pertanian dan Perikanan	Cakupan bina kelompok nelayan (55,00 %)	85,00	90,00
		Cakupan bina kelompok petani (38,54 %)	80,06	88,40
7	Terbentuknya sentra produksi berbasis potensi sumberdaya alam wilayah	Produksi perikanan tangkap (14,933 ton)	15.310	15.387
		Produksi perikanan budidaya (3,050 ton)	3.127	3.143
		Kontribusi sector pertanian(palawija) terhadap PDRB (3,34 %)	3,54	3,58
8	Terbangunnya sarana prasarana penunjang potensi unggulan daerah	Luas irigasi dalam kondisi baik (100,00 %)	100,00	100,00
		Tersedianya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian (unit)	100,00	100,00
		Tersedianya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (5,6 Km)	10	10
		Jumlah Bantuan Armada Tangkap dan Alat Penangkapan Ikan (24 Paket)	45	50
		Jumlah Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan (paket)	5	5
9	Terciptanya SDM berbasis potensi unggulan Daerah	Menurunnya tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (2,31%)	2,25	2,24
10	Terciptanya Tatakelola pemasaran produk unggulan daerah	Sistem Informasi Geografis Produk Unggulan Daerah (Ada, Tdk ada)	Ada	ada
		Jumlah Pemasaran Produk Unggulan Berbasis Digital (.Jumlah Produk)	2	2
11	Terbentuknya kelompok usaha mikro kecil dan menengah	Jumlah UMKM (480 unit)	647	677

12	Terbentuknya UMKM berbasis pengembangan bisnis agro- marine	Terwujudnya usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produk unggulan (paket)	1	1
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMDA) (Rp 20,59 M)	33,50	36,85
13	Daya serap tenaga kerja	Rasio daya serap tenaga kerja (Rasio: 239)	307	322
14	Tersedianya lahan untuk perumahan swadaya dan perumahan khusus	Rasio permukiman layak huni (Rasio: 0,86)	1,10	1,15
15	Tersedianya SDM berbasis potensi Unggulan Daerah	Tingkat partisipasi angkatan kerja (73,99 %)	77,76	78,54
16	Tingginya angka partisipasi sekolah	APM SD/MI (97,86 %)	98,35	98,45
		APM SMP/MTs(80,19 %)	80,59	80,67
17	Tersedianya lembaga PAUD	Jumlah siswa pada jenjang TK/RA (3.415 siswa)	3.501	3.519
18	Tersedianya infrastruktur, SDM, dan pemanfaatan IT bidang pendidikan	Sekolah kondisi bangunan baik SD/MI (83,18 %)	85,28	85,71
		Sekolah kondisi bangunan baik SMP/MTs (85,11 %)	87,26	87,70
19	Terlayannya kebutuhan kesehatan masyarakat	Rasio Posyandu per satuan balita /1.000 (16,14%)	16,55	16,63
		Rasio Puskesmas, poliklinik, pusku per satuan penduduk /1.000 (0,66 %)	0,84	0,88
		Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk /1.000 (0,03 %)	0,03	0,03
		Rasio dokter per satuan penduduk /1000 (0,20 %)	0,26	0,27
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (63,60 %)	81,17	85,23
20	Terciptanya mekanisme riset dan development di bidang kesehatan	Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, DBD (50,00 %)	63,81	67,00

21	Terciptanya Lingkungan bersih	Jumlah rumah tangga bersanitasi (76,10 %)	79,59	80,30
22	Terciptanya destinasi wisata berbasis kearifan lokal	Kunjungan wisata (75,24 %)	77,15	77,53
23	Adanya peraturan daerah tentang Budaya Lokal	Perda Adat (ada/tidak ada)	ada	ada
24	Peningkatan jumlah Kunjungan Wisatawan	Pengembangan objek wisata unggulan (jumlah)	1	1
25	Terkelolanya potensi wisata lokal secara profesional	Tersedianya SDM profesional dibidang pariwisata (orang)	7	7
26	Jumlah kegiatan keagamaan yang bersinergi dengan budaya lokal	Rasio tempat ibadah per 1000 penduduk (Rasio: 1,95)	2,00	2,01
27	Meningkatnya minat pemuda di bidang olahrag, social seni, dan budaya	Persentase organisasi pemuda yang aktif (100 %)	100,00	100,00
28	Terpenuhinya sarana prasarana dan kebutuhan PMKS	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)	1	1
29	Terciptanya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (Skor)	100,00	100,00
30	Tersedianya SDM ASN yang profesional	Pesentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (PIM IV, III, II) (%)	29,16	29,74
31	Terciptanya sistim akuntabilitas pemerintah yang berkualitas	Pesentase disiplin ASN (%)	100,00	100,00
32	Terciptanya sistim pelayanan satu atap	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah (ada/tidak ada)	Ada	ada
33	Terciptanya sistim pengelolaan keuangan yang akuntabel	Opini BPK terhadap laporan keuangan (WTP/WDP)	WTP	WTP

Sumber : RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026

6.2. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KUNCI KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025

Penetapan indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6.2.
Indikator Kinerja Kunci Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2025	2026
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi			
1.01	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,01	5,04	5,05
1.02	Laju inflasi (%)	2,70	3,5	3,5
1.03	PDRB per kapita (Rp.)	22.100.000	23.807.976	24.165.096
1.04	Indeks Gini	0,32	0,27	0,26
1.05	Rasio Penduduk miskin (%)	15,75	14,98	14,83
1.06	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	73,99	77,76	78,54
1.07	Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,31	2,25	2,24
1.08	Rasio penduduk yang bekerja (%)	97,69	97,75	97,76
2	Kesejahteraan Sosial			
2.01	Pendidikan			
2.01.01	Angka melek huruf (%)	97,68	98,17	98,27
2.01.02	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,69	12,74	12,75
2.01.03	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	7,94	8,55	8,68
2.01.04	Angka Partisipasi Kasar			
	- SD/MI	114,64	100	100,00
	- SLTP/MTs	88,48	90,71	91,17
2.01.05	Angka Partisipasi Murni			
	- SD/MI	97,86	98,35	98,45
	- SLTP/MTs	80,19	80,59	80,67
2.02	Kesehatan			
2.03.01	Angka Kelangsungan Hidup Bayi per / 1000 kelahiran hidup (%)	99,14	100	100,00
2.03.02	Angka Usia Harapan Hidup (Th)	66,27	67,94	68,28
2.03.03	Persentase Gizi buruk (%)	8,70	5,89	5,45
2.03	Kesempatan Kerja			
2.04.01	Rasio Penduduk Yang Bekerja (%)	97,69	98,18	98,28
2.04.02	Angka Partisipasi Kerja (%)	63,53	68,44	69,47
2.04	Angka Kriminalitas			
2.05.01	Rasio Kriminalitas (%)	0,00	0,00	0,00
3	Fokus Seni dan Budaya			
3.01	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Kali)	3	3	3

3.02	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya (Unit)	2	2	2
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM			
1	Pelayanan Urusan Wajib			
1.01	Pendidikan			
1.01.01	SD/MI			
1.01.01.01	Angka Partisipasi Sekolah (%)	98,00	99,23	99,48
1.01.01.02	Rasio Ketersediaan Sekolah	97,77	99,00	99,25
1.01.01.03	Rasio guru/ murid	54,50	55,90	56,18
1.01.01.04	Rasio guru/ murid per kelas rata-rata (per-1.000)	52,55	60,05	61,55
1.01.02	SMP/MTs			
1.01.02.01	Angka Partisipasi Sekolah (%)	95,21	77,90	96,65
1.01.02.02	Rasio Ketersediaan Sekolah (%)	94,47	41,93	95,90
1.01.02.03	Rasio guru/ murid per kelas rata-rata (per- 10.000)	45,60	60,92	54,88
1.01.02.04	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (%)	97,68	98,17	98,27
1.01.03	Fasilitas Pendidikan			
1.01.03.01	Sekolah kondisi bangunan baik SD/MI (%)	83,18	85,28	85,71
1.01.03.02	Sekolah kondisi bangunan baik SMP/MTs (%)	85,11	87,26	87,70
1.01.04	PAUD			
1.01.04.01	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA (siswa)	3.415	3,501	3,519
1.01.05	Angka Putus Sekolah			
1.01.05.01	SD/MI (%)	0,75	0,02	0,01
1.01.05.02	SMP/MTs (%)	4,80	0,15	0,08
1.01.06	Angka Kelulusan			
1.01.06.01	Angka Kelulusan SD/MI (%)	97,00	100,00	100,00
1.01.06.02	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	96,00	100,00	100,00
1.01.06.03	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	96,00	100,00	100,00
1.01.06.04	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)	95,15	97,55	98,04
1.02	Kesehatan			
1.02.01	Rasio Posyandu per satuan balita (/1.000)	16,14	16,55	16,63
1.02.02	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (/1.000)	0,66	0,84	0,88
1.02.03	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (/1.000)	0,03	0,03	0,03
1.02.04	Rasio dokter per satuan penduduk (/1000)	0,20	0,26	0,27
1.02.05	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (/1000)	7,39	9,43	9,90
1.02.06	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	2,40	3,06	3,22
1.02.07	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (%)	91,00	93,30	93,76
1.02.08	Cakupan kelurahan UCI (%)	43,00	44,09	44,31
1.02.09	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	96,31	98,74	99,24
1.02.10	Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, DBD (%)	50,00	63,81	67,00
1.02.11	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	63,60	81,17	85,23
1.02.12	Cakupan kunjungan bayi (%)	70,29	89,71	94,20
1.02.13	Cakupan puskesmas (%)	216,67	100,00	100,00
1.02.14	Cakupan pembantu puskesmas (%)	46,91	90,32	100,00
1.02.15	PHBS (%)	60,50	62,03	62,34

1.03	Pekerjaan Umum			
1.03.01	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	63,89	79,46	82,64
1.03.02	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	76,10	79,59	80,30
1.03.03	Persentase rumah tangga pengguna Air Bersih (%)	71,54	78,24	79,58
1.03.04	Panjang jalan dilalui roda 4 (Km)	385,76	403,43	407,07
1.03.05	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) (Km)	245,48	276,17	282,30
1.04	Perumahan			
1.04.01	Rasio rumah layak huni	0,12	0,19	0,21
1.04.02	Rasio permukiman layak huni	0,86	1,10	1,15
1.04.03	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	41,61	51,66	53,60
1.04.04	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	31,78	51,18	56,30
1.04.05	Persentase permukiman yang tertata (%)	95,46	96,49	96,66
1.04.06	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	4,54	3,51	3,34
1.04.07	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	31,78	19,83	18,05
1.04.08	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	5,64	4,36	4,15
1.04.09	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	73,82	77,20	77,90
1.05	Penataan Ruang			
1.05.01	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	34,00	53,75	55,90
1.05.02	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	13,55	16,94	17,16
1.06	Perencanaan Pembangunan Daerah			
1.06.01	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak ada)	ada	ada	ada
1.06.02	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (ada/tidak ada)	ada	ada	ada
1.06.03	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (ada/tidak ada)	ada	ada	ada
1.06.04	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak ada)	ada	ada	ada
1.06.05	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100,00	100,00	100,00
1.06.06	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100,00	100,00	100,00
1.06.07	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (%)	100,00	100,00	100,00
1.07	Perhubungan			
1.07.01	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	35.712	45,579	47.857
1.07.02	Jumlah Pelabuhan Laut /Udara/ Terminal Bis	9	0,00	9
1.07.03	Persentase layanan angkutan darat (%)	8,97	146,00	12,02
1.07.04	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,28	9,00	0,38
1.07.05	Jumlah arus penumpang angkutan umum Darat (orang)	15.548	11,45	20.836

1.07.06	Jumlah arus penumpang angkutan umum Kapal Laut dan Very (orang)	12.995	100,00	17.415
1.07.07	Jumlah arus penumpang angkutan umum Pesawat Udara (Orang)	7.169	42,50	9.607
1.08	Lingkungan Hidup			
1.08.01	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak ada	ada	ada
1.08.02	Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/ Kota	Tidak ada	ada	ada
1.08.03	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten /Kota	Tidak ada	ada	ada
1.08.04	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	78,00	86,00	88,00
1.08.05	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota (jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina) / (Org.)	0	5,00	6
1.08.06	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup (ada/tidak ada)	Tidak ada	Ada	Ada
1.08.07	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota (%)	45,00	65,00	70,00
1.08.09	Presentase cakupan area pelayanan (%)	0,40	100,00	5,00
1.08.10	Presentase jumlah sampah yang tertangani (%)	74,00	4,00	76,50
1.08.11	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	50	76,00	90
1.09	Pertanahan			
1.09.01	Luas Lahan bersertifikat (%)	0,01	0,25	0,47
1.09.02	Jumlah bidang tanah yang didistribusi (Ha)	NA	NA	NA
1.09.03	Jumlah penerima akses reforma agraria (KK)	NA	NA	NA
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil			
1.10.01	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%)	94,16	97,42	98,26
1.10.02	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	76,36	80,62	81,23
1.10.03	Rasio pasangan berakte nikah (%)	62,72	65,59	66,18
1.10.04	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten (ada/tidak ada)	ada	ada	ada
1.10.05	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (sudah/ belum)	sudah	sudah	sudah
1.10.06	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	92,64	96,88	97,76
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1.11.01	Partisipasi perempuan di lembaga swasta / partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	57,50	58,08	58,19
1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			
1.12.01	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,42	0,54	0,56
1.12.02	Rata-rata jumlah anak per keluarga (Orang)	2	3,00	3
1.12.03	Rasio akseptor KB (%)	16,87	21,53	22,61
1.12.04	Cakupan peserta KB aktif (%)	54,50	55,88	56,16

1.12.05	Keluarga Sejahtera I (%)	30,40	31,17	31,32
1.13	Sosial			
1.13.01	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	58,98	75,86	79,65
1.13.02	Persentase PMKS yang tertangani (%)	58,98	75,86	79,65
1.13.03	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	58,98	75,86	79,65
1.14	Ketenagakerjaan			
1.14.01	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	8,80	11,23	11,79
1.14.02	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	4,81	6,14	6,45
1.15	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
1.15.01	Persentase koperasi aktif (%)	67,9	78,79	81,15
1.16	Penanaman Modal			
1.16.01	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	227	479	633
1.16.02	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	20.594.242.289	33.502.255.705	36.852.481.276
1.16.03	Rasio daya serap tenaga kerja	239	307	322
1.16.04	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	20,43	33,50	36,85
1.17	Kebudayaan			
1.17.01	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Keg)	0	1	1
1.17.02	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	9	9	9
1.17.03	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	10	10	10
1.18	Pemuda dan Olah Raga			
1.18.01	Persentase wirausaha muda (%)	41,33	52,75	55,39
1.18.02	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	0,00	1	1,00
1.18.03	Jumlah atlet berprestasi	0	1	1
1.18.04	Jumlah prestasi olahraga	0	1	1
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			
1.19.01	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Keg)	1	1	1
1.19.02	Kegiatan pembinaan politik daerah (Keg)	1	1	1
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
1.20.01	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1,21	1,54	1,62
1.20.02	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	1,40	1,79	1,88
1.20.03	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah (Ada/tidak)	ada	ada	ada
1.20.04	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (%)	1,78	2,27	2,39
1.20.05	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (%)	0,23	0,23	0,23
1.20.07	Indeks Resiko Bencana (%)	0,0065	0,0046	0,0039
1.20.08	Desa Rawan Bencana (desa)	37	30,00	29
1.20.09	Desa Tanggu Bencana (desa)	45	52,00	54
1.20.10	Jumlah Sistim Informasi Manajemen / SIM (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada

1.20.11	Maturitas SPIP (Level)	2,29	2,80	2,94
1.20.12	Kapabilitas APIP (Level)	2,00	2,05	2,06
1.21	Ketahanan Pangan			
1.21.01	Ketersediaan pangan utama Beras / Non Beras			
1.21.01.01	Ketersediaan pangan utama (%)	0,74	2,54	2,94
1.21.01.02	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (kkal/kap/hr)	63,05	88,10	100,00
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan			
1.22.01	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	50,00	100,00	90,00
1.22.02	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga pemberdayaan masyarakat /LPM (%)	20,00	100,00	50,00
1.22.03	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	45,00	100,00	85,00
1.22.04	Persentase LSM aktif (%)	10,00	100,00	45,00
1.22.05	Persentase LPM Berprestasi (%)	20,00	100,00	50,00
1.22.06	Persentase PKK aktif (%)	50,00	100,00	100,00
1.22.07	Persentase Posyandu aktif (%)	80,00	63,30	100,00
1.22.08	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	25,00	100,00	50,00
1.22.09	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%)	20,00	100,00	50,00
1.23	Kearsipan			
1.23.01	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	100	100	100
1.24	Komunikasi dan Informatika			
1.24.01	Cakupan Layanan Telekomunikasi	59,02	87,72	92,72
1.24.02	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon(%)	65,26	68,59	69,27
1.24.03	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	15,33	19,57	20,54
1.24.04	SPBE/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Ada/Belum Ada)	Ada	Ada	Ada
1.25	Perpustakaan			
1.25.01	Persentase Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%)	2,25	2,87	3,02
1.25.02	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	50	70,00	75
1.25.03	Rasio perpustakaan persatuan penduduk /1.000	0,013	0,013	0,013
1.25.04	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	65,00	71,77	73,20
2	Pelayanan Urusan Wajib			
2.01	Pertanian			
2.01.01	Kontribusi sektor pertanian /perkebunan terhadap PDRB (%)	36,60	37,52	37,71
2.01.02	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	3,34	3,54	3,58
2.01.03	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	1,21	3,31	3,81
2.01.04	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	1,94	1,99	2,00
2.01.05	Cakupan bina kelompok petani (%)	38,54	80,06	88,4

2.01.06	Nilai tukar petani	139,59	143,11	143,83
2.02	Pariwisata			
2.02.01	Kunjungan wisata (%)	75,24	77,15	77,53
2.02.02	Lama kunjungan Wisata (kali)	52	52,00	52
2.02.03	PAD sektor pariwisata (%)	44,84	45,97	46,20
2.03	Kelautan dan Perikanan			
2.03.01	Konsumsi ikan (ton)	100	100	5.500
2.03.02	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	55	85	90
2.03.03	Nilai tukar nelayan	115	121	122
2.03.04	Produksi perikanan tangkap (ton)	14.933	15,310	15.387
2.03.05	Produksi perikanan budidaya (ton)	3.050	3,127	3.143
2.04	Perdagangan			
2.04.01	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	7,60	7,79	7,83
2.04.02	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	19,22	24,53	25,76
C	ASPEK DAYA SAING			
1	Kemampuan Ekonomi Daerah			
1.01	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp)	670.614	740.412	755.221
1.02	Pengeluaran konsumsi pangan perkapita (Rp)	380.918	420.564	428.976
1.03	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (Rp)	289.696	319.848	326.245
1.04	Produktivitas total daerah (Juta/Kapita/Tahun)	1.438.432	1.588.145	1.619.908
1.05	Nilai Tukar Petani	139,59	143,11	143,83
2	Fasilitas Wilayah / Infrastruktur			
2.01	Aksesibilitas Daerah			
2.01.01	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,28	0,36	0,38
2.02	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum			
2.02.01	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang)	35.712	45.579	47.857
2.02.02	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (Ton)	1.893	2.416	2.537
2.03	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun			
2.03.01	Jumlah orang melalui dermaga per tahun (Orang)	69.208	88.329	92.746
2.03.02	Jumlah barang melalui dermaga per tahun (Ton)	3.704	4.728	4.964
2.03.03	Jumlah orang melalui lapangan terbang per tahun (Orang)	23.499	29.991	31.490
2.03.04	Jumlah barang melalui lapangan terbang per tahun (ton)	235	300	315
2.03.05	Jumlah orang melalui terminal per tahun (Orang)	1.918	2.448	2.571
2.03.06	Jumlah barang melalui terminal per tahun (Kg)	9.592	12.242	12,854
2.04	Penataan Wilayah			
2.04.01	Luas wilayah kekeringan (%)	6,00	4,64	4,41
2.04.02	Luas wilayah perkotaan (%)	0,80	1,03	1,08
2.05	Hotel dan Restoran			
2.05.01	Jenis, kelas, dan jumlah restoran (unit)	35	40	41
2.05.02	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel (unit)	14	14	14
2.05.03	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel melati (unit)	14	14	14

2.06	Air Bersih, Listrik, Komunikasi dan Informasi			
2.06.01	Persentase RT pengguna air bersih (%)	71,54	78,24	79,58
2.06.02	Rasio ketersediaan daya listrik	1	1	1
2.06.03	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	86,84	89,03	89,48
2.06.04	Persentase penduduk yang menggunakan HP/ telepon (%)	65,26	68,59	69,27
3	Sumber Daya Manusia			
3.01	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	4,81	6,14	6,45
3.02	Rasio ketergantungan (%)	61,98	59,24	58,71

Sumber : RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026

BAB VII

PENUTUP

BAB VII

PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan keterpaduan dari pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan sebelumnya, maka Pemerintah Kabupaten Buru Selatan telah melakukan berbagai tahapan perencanaan dalam melengkapi dokumen perencanaan RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 yang dimulai dari penyerapan aspirasi masyarakat melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan atau biasa disebut dengan Musrenbang RKPD yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan sampai ke tingkat Kabupaten, kemudian tingkat Provinsi dan Nasional.

Berkaitan dengan itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 sendiri merupakan rencana tahunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 untuk disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Buru Selatan sebagai pedoman dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2025.

Disamping itu, dokumen RKPD juga berfungsi sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) penyelenggaran urusan pemerintah baik urusan wajib maupun urusan pilihan, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, serta dijadikan pedoman dalam rangka melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

1. RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025, tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka pelayanan publik maupun investasi pemerintah, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah kabupaten serta prioritas pembangunan daerah termasuk didalamnya rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten, Kecamatan, serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dan telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 ini dengan sebaik-baiknya.
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), melalui tahapan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

4. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan dan sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan serta program/kegiatan/sub kegiatan.
5. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan, guna melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
6. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan dari masing-masing Kepala OPD.
7. Pada akhir Tahun Anggaran 2025 setiap Kepala (OPD) wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan Tahun 2025.
8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi kepala OPD, yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berikutnya.

Sejalan dengan hal diatas, bahwasanya Pemerintah Daerah juga memperhatikan aspek pembiayaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 yang mencakup semua pembiayaan yang notabenenya bersumber dari dana pemerintah maupun dari sektor swasta dan/atau masyarakat dalam bentuk skema kemitraan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi dan ekstensifikasi) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mewujudkan satu iklim yang kondusif bagi upaya pengelolaan sumber keuangan daerah secara kontinyu dan berkesinambungan.

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan tetapi juga ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, disiplin dan kejujuran dari para pelaku pembangunan (*Stakeholders*) dalam mengimplementasikan rencana. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada dengan memanfaatkan serta mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

Namrole, Juni 2024

TTD

BUPATI BURU SELATAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PENDIDIKAN KAB. BURU SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN						221,284,888,725.00							232,377,483,164.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						220,882,648,425.00							231,955,130,849.00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						220,882,648,425.00							231,955,130,849.00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	141,016,844,825.00						-	148,067,687,069.00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	30,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	31,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	30,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		31,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	131,266,605,250.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	137,829,935,513.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun Orang/bulan	131,241,605,250.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		137,803,685,513.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				2 Laporan	25,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		26,250,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	50,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	52,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	50,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		52,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1,289,404,500.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	1,353,874,726.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	300,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		315,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	275,998,800.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		289,798,740.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				50 Orang	526,284,150.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		552,598,358.00	DINAS PENDIDIKAN

	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	187,121,550.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		196,477,628.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1,724,960,325.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	1,811,208,342.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	164,876,775.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		173,120,614.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	259,290,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		272,254,500.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1,300,793,550.00	Semua Kota/Kab	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		1,365,833,228.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	350,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	367,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	200,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		210,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	150,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		157,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	6,305,874,750.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	6,621,168,488.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	46,194,750.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		48,504,488.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	37,800,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		39,690,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	6,221,880,000.00	Kec. Namrole, Kec. Waesama, Kec. Ambalau, Kec. Kepala Madan, Kec. Leksula, dan Kec.Fena Fafan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		6,532,974,000.00	DINAS PENDIDIKAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	79,005,803,600.00						-	82,984,443,780.00	

	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	36,375,767,600.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	38,194,555,980.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				9 Unit	2,697,450,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		2,832,322,500.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				5 Ruang	819,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		859,950,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				4 Ruang	800,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		840,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	2,065,677,600.00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		2,168,961,480.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	900,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		945,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	1,258,950,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		1,321,897,500.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	1,000,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		1,050,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	600,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		630,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				5 Paket	300,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		315,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				8 Unit	900,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		945,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				35 Orang	300,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		315,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														

			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				12 Satuan Pendidikan	300,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		315,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				107 Satuan Pendidikan	14,184,690,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK Non Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		14,893,924,500.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				214 Orang	330,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		346,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar														
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				6 Ruang	1,200,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		1,260,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar														
			Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	1,000,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		1,050,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				214 Orang	500,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		525,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														

			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				25 Konten Digital	400,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		420,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				214 Orang	500,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		525,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				107 Dokumen	300,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		315,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				200 Dokumen	270,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		283,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				200 Paket	400,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		420,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				10 Ruang	2,200,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		2,310,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	1,000,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		1,050,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				107 Orang	250,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		262,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	1,000,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		1,050,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				200 Peserta Didik	400,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		420,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				7 Paket	500,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK Non Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		525,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	31,813,929,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	33,432,975,450.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														

			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				9 Unit	2,697,450,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		2,832,322,500.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				4 Ruang	971,859,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		1,020,451,950.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				4 Ruang	1,000,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		1,050,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				5 Ruang	1,532,600,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		1,609,230,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	656,600,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		689,430,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	800,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		840,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														

			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	1,000,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		1,050,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	1,200,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		1,260,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				7 Ruang	1,400,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		1,470,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium														
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				7 Ruang	1,500,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		1,575,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula														
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				3 Ruang	600,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		630,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah														
			Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	750,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		787,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	750,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		787,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				10 Paket	250,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		262,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				8 Unit	900,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		945,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				100 Peserta Didik	200,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		210,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				30 Orang	250,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		262,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				20 Orang	250,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		262,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														

			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				10 Satuan Pendidikan	260,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		273,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				47 Satuan Pendidikan	7,045,420,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK Non Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		7,426,041,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				94 Orang	150,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		157,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				47 Orang	200,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		210,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				25 Konten Digital	400,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		420,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				94 Orang	250,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		262,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				47 Dokumen	250,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		262,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				47 Dokumen	250,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		262,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				47 Satuan Pendidikan	250,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		262,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				10 Ruang	2,200,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		2,310,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				47 Orang	250,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		262,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				200 Paket	400,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		420,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				14 Ruang	2,800,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK Non Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		2,940,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				4 Paket	400,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		420,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-			-	8,528,790,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	8,955,229,500.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				12 Unit	1,200,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		1,260,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD														
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				20 Paket	200,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		210,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				30 Orang	200,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		210,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														

			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				30 Orang	200,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		210,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				125 Satuan Pendidikan	3,478,790,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK Non Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		3,652,729,500.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				125 Orang	200,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		210,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				50 Dokumen	200,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		210,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Ruang	1,000,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		1,050,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				200 Paket	200,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		210,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														

			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				7 Unit	1,050,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		1,102,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				8 Paket	400,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		420,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				15 Satuan Pendidikan	200,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		210,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	2,287,317,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	2,401,682,850.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				3 Satuan Pendidikan	1,587,317,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		1,666,682,850.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				4 Satuan Pendidikan	400,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAK Non Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		420,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

			<i>Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan</i>				4 Unit	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		105,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>				4 Dokumen	200,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		210,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-			-	860,000,000.00						-	903,000,000.00	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-			-	860,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	903,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
			<i>Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun</i>				107 Dokumen	210,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		220,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
			<i>Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya</i>				107 Orang	250,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		262,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar														
			<i>Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun</i>				6 Dokumen	200,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		210,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar														

			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				12 Dokumen	200,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		210,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
	X	NON URUSAN						402,240,300.00							422,352,315.00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						402,240,300.00							422,352,315.00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	402,240,300.00						-	422,352,315.00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	402,240,300.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	422,352,315.00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	295,938,300.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		310,735,215.00	DINAS PENDIDIKAN
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	106,302,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		111,617,100.00	DINAS PENDIDIKAN
	J U M L A H							221,284,888,725.00							232,377,483,164.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BURU SELATAN TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						68,080,334,305.00						68,304,782,805.00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						64,676,301,805.00							64,900,750,305.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						64,676,301,805.00							64,900,750,305.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	37,811,449,098.00						-	37,911,449,098.00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	387,986,500.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	387,986,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	14,641,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		14,641,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	22,110,437,037.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	22,210,437,037.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				542 Orang/bula n	22,110,437,037.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		22,210,437,037.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1,682,362,904.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	1,682,362,904.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	36,602,500.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		36,602,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

1.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	36,275,274.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		36,275,274.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1.02.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	20,936,630.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		20,936,630.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1.02.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	21,961,500.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		21,961,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1,317,690,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		1,317,690,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	4,465,505,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	4,465,505,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1.02.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	878,460,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		878,460,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1.02.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	878,460,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfulle	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		878,460,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	512,435,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		512,435,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	878,460,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		878,460,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	658,845,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		658,845,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	658,845,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		658,845,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	8,498,992,157.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	8,498,992,157.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	21,961,500.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		21,961,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	89,602,920.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		89,602,920.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	107,942,237.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		107,942,237.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	8,279,485,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		8,279,485,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	666,165,500.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	666,165,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	14,641,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		14,641,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	14,641,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		14,641,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				5 Unit	14,641,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		14,641,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				9 Unit	95,166,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		95,166,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	175,692,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		175,692,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	175,692,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		175,692,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	175,692,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		175,692,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	25,093,291,707.00						-	25,217,740,207.00	

	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	17,406,766,707.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	17,406,766,707.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya														
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1` Unit	1,464,100,000.00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Waetawa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		1,464,100,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas														
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	1,464,100,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Oki Lama	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		1,464,100,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1,171,280,000.00	Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Trukat	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		1,171,280,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				2 Unit	1,464,100,000.00	Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Waekatin	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		1,464,100,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas														
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				13 Unit	878,460,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		878,460,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				40 Unit	878,460,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		878,460,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	878,460,000.00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Fogi	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		878,460,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				13 Unit	219,615,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		219,615,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				40 Unit	219,615,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		219,615,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				43 Unit	219,615,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		219,615,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				14 Unit	1,464,100,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		1,464,100,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														

			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center				14 Unit	146,410,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		146,410,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				14 Unit	146,410,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		146,410,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	878,460,000.00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Fogi	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		878,460,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			-				-	5,913,581,707.00	-	-	-	-	-		5,913,581,707.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	6,895,911,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	7,020,359,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1741 Orang	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1662 Orang	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1773 Orang	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7496 Orang	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9367 Orang	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				36835 Orang	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2800 Orang	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														

			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5942 Orang	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				215 Orang	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				58 Orang	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				148 Orang	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1444 Orang	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				14 Dokumen	146,410,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		146,410,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				14 Dokumen	146,410,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		146,410,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				14 Dokumen	219,615,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		219,615,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				14 Dokumen	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				14 Dokumen	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				14 Dokumen	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				14 Dokumen	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														

			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				58 Orang	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				58 Orang	124,448,500.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				14 Dokumen	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				14 Dokumen	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				14 Dokumen	2,196,150,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		2,196,150,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				9367 Orang	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														

			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				14 Paket	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	146,410,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		146,410,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				14 Unit	0.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				14 Dokumen	292,820,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		292,820,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				13 Dokumen	292,820,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		292,820,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				14 Dokumen	175,692,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		175,692,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				11 Unit	146,410,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		146,410,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				13 Laporan	146,410,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		146,410,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				13 Dokumen	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	395,307,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	395,307,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	395,307,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		395,307,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	395,307,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	395,307,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				14 Unit	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				14 Unit	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				14 Unit	146,410,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		146,410,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-			-	746,691,000.00						-	746,691,000.00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	248,897,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	248,897,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>				1 Dokumen	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>				1 Dokumen	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	373,345,500.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	373,345,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>				1 Dokumen	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</i>				17 Orang	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>				1 Dokumen	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	124,448,500.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				1 Orang	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-			-	600,281,000.00						-	600,281,000.00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-			-	124,448,500.00				5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	124,448,500.00				5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-			-	175,692,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	175,692,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	175,692,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	175,692,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	-			-	175,692,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	175,692,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	175,692,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	175,692,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	424,589,000.00						-	424,589,000.00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	124,448,500.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	175,692,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	175,692,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	175,692,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		175,692,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	124,448,500.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3,404,032,500.00							3,404,032,500.00	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						3,404,032,500.00							3,404,032,500.00	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-			-	1,368,933,500.00						-	1,368,933,500.00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-			-	746,691,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	746,691,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota														

			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.02.2.01.0004	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan														
			Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan				1 Dokumen	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				160 Satuan Pendidikan	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.02.2.01.0012	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				4 Organisasi	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.02.2.01.0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				4 Organisasi	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga														

			Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				13 Kegiatan	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	622,242,500.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	622,242,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				1 Dokumen	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.02.2.02.0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan														
			Jumlah Kajian Dampak Kependudukan				1 Dokumen	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 Laporan	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga														
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														

			<i>Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga</i>				1 Laporan	124,448,500.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-			-	1,412,856,500.00						-	1,412,856,500.00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-			-	124,448,500.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK</i>				1 Laporan	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-			-	322,102,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	322,102,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB														
			<i>Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia</i>				6 Unit	175,692,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		175,692,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														
			<i>Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>				570 Orang	146,410,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		146,410,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	592,960,500.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	592,960,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	175,692,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		175,692,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB														
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				6 Unit	146,410,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		146,410,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak														
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				1 Laporan	146,410,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		146,410,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-			-	373,345,500.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	373,345,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														

			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				1 Organisasi	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB														
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				1 Laporan	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-			-	622,242,500.00						-	622,242,500.00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	124,448,500.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)														
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				1 Laporan	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	497,794,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	497,794,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

	2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Organisasi	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)														
			Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Organisasi	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja														
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				1 Laporan	124,448,500.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		124,448,500.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	J U M L A H							68,080,334,305.00							68,304,782,805.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) RSUD dr. SALIM ALKATIRI KAB. BURU SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		RSUD DR. SALIM ALKATIRI						32,639,624,000.00							32,066,605,200.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						32,639,624,000.00							32,066,605,200.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						32,639,624,000.00							32,066,605,200.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6,810,624,000.00						-	7,151,155,200.00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6,810,624,000.00				5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	7,151,155,200.00	RSUD DR. SALIM ALKATIRI
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				300 Orang/bulan	6,810,624,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		7,151,155,200.00	RSUD DR. SALIM ALKATIRI
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	25,829,000,000.00						-	24,915,450,000.00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	13,829,000,000.00				5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	12,315,450,000.00	RSUD DR. SALIM ALKATIRI
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya														
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	4,200,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		2,205,000,000.00	RSUD DR. SALIM ALKATIRI

	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1,100,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		1,155,000,000.00	RSUD DR. SALIM ALKATIRI
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				3 Unit	900,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		945,000,000.00	RSUD DR. SALIM ALKATIRI
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				10 Unit	729,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		765,450,000.00	RSUD DR. SALIM ALKATIRI
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				100 Unit	3,600,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU & DAK Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		3,780,000,000.00	RSUD DR. SALIM ALKATIRI
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				100 Unit	300,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		315,000,000.00	RSUD DR. SALIM ALKATIRI
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	3,000,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		3,150,000,000.00	RSUD DR. SALIM ALKATIRI

	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	12,000,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	12,600,000,000.00	RSUD DR. SALIM ALKATIRI
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	2,000,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		2,100,000,000.00	RSUD DR. SALIM ALKATIRI
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	10,000,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		10,500,000,000.00	RSUD DR. SALIM ALKATIRI
	J U M L A H							32,639,624,000.00							32,066,605,200.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KAB. BURU SELATAN TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH						57,379,431,000.00							941,137,374,100.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						57,379,431,000.00							941,137,374,100.00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						57,379,431,000.00							941,137,374,100.00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5,550,342,800.00						-	6,105,377,080.00	
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2,993,444,000.00			-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	3,292,788,400.00	DINAS PUPR
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	2,993,444,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		3,292,788,400.00	DINAS PUPR
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	200,000,000.00			-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	220,000,000.00	DINAS PUPR
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	200,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		220,000,000.00	DINAS PUPR

	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1,048,298,800.00			-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	1,153,128,680.00	DINAS PUPR
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	107,856,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		118,641,600.00	DINAS PUPR
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	149,040,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		163,944,000.00	DINAS PUPR
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	43,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		47,300,000.00	DINAS PUPR
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	748,402,800.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		823,243,080.00	DINAS PUPR
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1,074,600,000.00			-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	1,182,060,000.00	DINAS PUPR
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	9,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		9,900,000.00	DINAS PUPR
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	37,200,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		40,920,000.00	DINAS PUPR
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	30,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		33,000,000.00	DINAS PUPR
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	998,400,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		1,098,240,000.00	DINAS PUPR
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	234,000,000.00			-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	257,400,000.00	DINAS PUPR
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	84,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		92,400,000.00	DINAS PUPR
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														

			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				2 Unit	150,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		165,000,000.00	DINAS PUPR
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-			-	2,500,000,000.00					-		2,750,000,000.00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2,500,000,000.00			-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	2,750,000,000.00	DINAS PUPR
	1.03.02.2.01.0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi				0.4 KM	400,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		440,000,000.00	DINAS PUPR
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0.4 KM	500,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		550,000,000.00	DINAS PUPR
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0.5 KM	500,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		550,000,000.00	DINAS PUPR
	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				0.4 KM	400,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		440,000,000.00	DINAS PUPR
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														

			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				2 Dokumen	500,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		550,000,000.00	DINAS PUPR
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				0.2 KM	200,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		220,000,000.00	DINAS PUPR
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-			-	920,000,000.00						-	1,012,000,000.00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	920,000,000.00			-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	1,012,000,000.00	DINAS PUPR
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun				1 Unit	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		110,000,000.00	DINAS PUPR
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	250,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		275,000,000.00	DINAS PUPR
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				1 Liter/Detik	500,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		550,000,000.00	DINAS PUPR
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														

			<i>Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				1 Unit	70,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		77,000,000.00	DINAS PUPR
4.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-			-	650,000,000.00						-	715,000,000.00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	650,000,000.00			-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	715,000,000.00	DINAS PUPR
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman														
			<i>Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun</i>				10 M³/Hari	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		55,000,000.00	DINAS PUPR
	1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat														
			<i>Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun</i>				15 M³/Hari	200,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		220,000,000.00	DINAS PUPR
	1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan														
			<i>Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun</i>				25 M³/Hari	400,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		440,000,000.00	DINAS PUPR
5.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-			-	2,750,000,000.00						-	3,025,000,000.00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2,750,000,000.00			-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	3,025,000,000.00	DINAS PUPR
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														

			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				500 M	750,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		825,000,000.00	DINAS PUPR
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				5 Sistem Drainase Perkotaan	750,000,000.00	-	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		825,000,000.00	DINAS PUPR
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				5 Sistem Drainase Perkotaan	750,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		825,000,000.00	DINAS PUPR
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				1 Dokumen	500,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		550,000,000.00	DINAS PUPR
6.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-			-	10,600,000,000.00						-	11,660,000,000.00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	10,600,000,000.00			-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	11,660,000,000.00	DINAS PUPR
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung														
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				1 Dokumen	200,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		220,000,000.00	DINAS PUPR
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				8 Dokumen	10,000,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		11,000,000,000.00	DINAS PUPR
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1 Dokumen	400,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		440,000,000.00	DINAS PUPR
7.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-			-	1,000,000,000.00						-	0.00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1,000,000,000.00			-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	0.00	DINAS PUPR
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya														
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				5 Kawasan	1,000,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		0.00	DINAS PUPR
8.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-			-	30,109,088,200.00						-	912,239,997,020.00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	30,109,088,200.00			-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	912,239,997,020.00	DINAS PUPR
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan														

			<i>Panjang Jalan yang Dibangun</i>				10 KM	17,900,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		19,690,000,000.00	DINAS PUPR
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														
			<i>Jumlah Jembatan yang Dibangun</i>				5 Jembatan	10,409,088,200.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		11,449,997,020.00	DINAS PUPR
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			<i>Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya</i>				50 KM	800,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		880,000,000,000.00	DINAS PUPR
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin</i>				3 KM	1,000,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		1,100,000,000.00	DINAS PUPR
9.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-			-	3,300,000,000.00						-	3,630,000,000.00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-			-	1,550,000,000.00			-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	1,705,000,000.00	DINAS PUPR
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	850,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		935,000,000.00	DINAS PUPR
	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota														

			<i>Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota</i>				3 Dokumen	650,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		715,000,000.00	DINAS PUPR
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														
			<i>Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.</i>				1 Laporan	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		55,000,000.00	DINAS PUPR
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1,050,000,000.00			-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	1,155,000,000.00	DINAS PUPR
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
			<i>Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang</i>				4 Sistem Informasi	1,050,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		1,155,000,000.00	DINAS PUPR
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	700,000,000.00			-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	770,000,000.00	DINAS PUPR
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>				1 Dokumen	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		110,000,000.00	DINAS PUPR
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang														

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				3 Laporan	600,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		660,000,000.00	DINAS PUPR
	J U M L A H							57,379,431,000.00							941,137,374,100.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KAB. BURU SELATAN TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN						4,969,438,000.00							4,973,000,000.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4,564,138,000.00							4,298,000,000.00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						4,564,138,000.00							4,298,000,000.00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2,834,138,000.00						-	3,008,000,000.00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	23,500,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	27,500,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	6,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		7,500,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	6,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		7,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		6,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	6,500,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		7,000,000.00	DINAS PERUMAHAN

	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1,858,098,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	1,913,500,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	1,845,598,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		1,900,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7,500,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		8,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	5,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		5,500,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	17,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	20,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	17,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		20,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	330,768,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	385,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	15,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		16,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	9,768,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		10,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	6,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		9,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				45 Laporan	300,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		350,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	70,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	90,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	40,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		50,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	30,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		40,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	431,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	462,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	20,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		25,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	6,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		12,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	35,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		45,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	370,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		380,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	103,772,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	110,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paiknya</i>				1 Unit	84,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		84,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				5 Unit	9,772,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		11,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	10,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		15,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-			-	240,000,000.00						-	615,000,000.00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	120,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	315,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan														
			<i>Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan</i>				2 Dokumen	20,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		50,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani														
			<i>Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani</i>				4 Dokumen	25,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		75,000,000.00	DINAS PERUMAHAN

	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana														
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				6 Dokumen	45,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		65,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus														
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				1 Dokumen	15,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		50,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	15,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		75,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	70,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	200,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				2 Unit Rumah	50,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		100,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit Rumah	20,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		100,000,000.00	DINAS PERUMAHAN

	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	-			-	50,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	100,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>				12 Laporan	50,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		100,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-			-	1,230,000,000.00						-	150,000,000.00	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	550,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	0.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh</i>				2 Dokumen	550,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		0.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	680,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	150,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh</i>				12 Laporan	50,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		150,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh														

			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				2 Dokumen	630,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		0.00	DINAS PERUMAHAN
4.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-			-	100,000,000.00						-	200,000,000.00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	200,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				5 Unit Rumah	100,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		200,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
5.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-			-	160,000,000.00						-	325,000,000.00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-			-	160,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	325,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	10,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		25,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian														

			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				2 Lokasi	100,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		200,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				12 Laporan	50,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		100,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						405,300,000.00							675,000,000.00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						405,300,000.00							675,000,000.00	
1.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-			-	300,000,000.00						-	500,000,000.00	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	300,000,000.00			-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	500,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah				12 Dokumen	300,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		500,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
2.	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	-	-			-	105,300,000.00						-	175,000,000.00	
	2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	-	-			-	50,000,000.00			-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	75,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

			Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong				12 Laporan	50,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		75,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	-	-			-	55,300,000.00			-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	100,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong														
			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.				12 Laporan	55,300,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		100,000,000.00	DINAS PERUMAHAN
	J U M L A H							4,969,438,000.00							4,973,000,000.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. BURU SELATAN TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN						3,495,916,000.00							0.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3,490,916,000.00							0.00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						3,490,916,000.00							0.00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2,483,782,000.00						-	0.00	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1,042,598,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	0.00	SATPOL - PP
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan Orang/bulan	1,037,598,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	SATPOL - PP
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Bulan Laporan	5,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	SATPOL - PP
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	25,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	0.00	SATPOL - PP
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	25,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	SATPOL - PP
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	337,778,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	0.00	SATPOL - PP
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	32,182,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	SATPOL - PP

	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	55,596,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	SATPOL - PP
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan Laporan	250,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	SATPOL - PP
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	96,250,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	0.00	SATPOL - PP
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	71,250,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	SATPOL - PP
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			-				-	25,000,000.00	-	-	-	-	-		0.00	SATPOL - PP
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	754,700,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	0.00	SATPOL - PP
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan Laporan	3,500,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	SATPOL - PP
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan Laporan	24,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	SATPOL - PP
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan Laporan	727,200,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	SATPOL - PP
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	227,456,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	0.00	SATPOL - PP
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	84,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	SATPOL - PP
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	73,956,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	SATPOL - PP
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4,500,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	SATPOL - PP
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	65,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	SATPOL - PP
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	912,134,000.00						-	0.00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	669,934,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	0.00	SATPOL - PP
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				12 Bulan Dokumen	36,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	SATPOL - PP
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat														
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				2 Dokumen	5,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	SATPOL - PP
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				12 Bulan laporan	518,934,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	SATPOL - PP
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														

			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				12 Bulan Laporan	60,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	SATPOL - PP
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				10 Set Unit	50,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	SATPOL - PP
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-			-	162,200,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	0.00	SATPOL - PP
	1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			-				-	5,000,000.00	-	-	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	SATPOL - PP
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Bulan Laporan	40,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	SATPOL - PP
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Bulan Laporan	117,200,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	SATPOL - PP
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-			-	80,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	0.00	SATPOL - PP
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				2 Laporan	80,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	SATPOL - PP
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-			-	95,000,000.00						-	0.00	

	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	95,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	0.00	SATPOL - PP
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				7 Orang	70,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	SATPOL - PP
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				6 Unit	25,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	SATPOL - PP
	X	NON URUSAN						5,000,000.00							0.00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						5,000,000.00							0.00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5,000,000.00						-	0.00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	5,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	0.00	SATPOL - PP
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan Paket	5,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	SATPOL - PP
	J U M L A H							3,495,916,000.00							0.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BURU SELATAN TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						3,256,571,968.00							3,528,549,000.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3,256,571,968.00							3,528,549,000.00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						3,256,571,968.00							3,528,549,000.00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2,871,571,968.00						-	3,070,549,000.00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	15,000,000.00			-	-	-	-	16,500,000.00	BPBD
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	-	-		5,500,000.00	BPBD
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	-	-		5,500,000.00	BPBD
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	5,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	-	-		5,500,000.00	BPBD
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1,517,771,968.00			-	-	-	-	1,675,249,000.00	BPBD
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	1,517,771,968.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	-	-		1,675,249,000.00	BPBD

	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	90,000,000.00			-	-	-	-	91,000,000.00	BPBD
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	40,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Eifule	DAU	-	-	-		40,500,000.00	BPBD
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Eifule	DAU	-	-	-		50,500,000.00	BPBD
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	310,000,000.00			-	-	-	-	322,500,000.00	BPBD
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Eifule	DAU	-	-	-		4,500,000.00	BPBD
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	26,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Eifule	DAU	-	-	-		26,500,000.00	BPBD
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Eifule	DAU	-	-	-		10,500,000.00	BPBD
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Eifule	DAU	-	-	-		10,500,000.00	BPBD
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	10,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Eifule	DAU	-	-	-		10,500,000.00	BPBD
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	250,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	-	-		260,000,000.00	BPBD
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	105,000,000.00			-	-	-	-	105,500,000.00	BPBD
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	35,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Eifule	DAU	-	-	-		35,500,000.00	BPBD

	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	70,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	-	-		70,000,000.00	BPBD
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	708,800,000.00			-	-	-	-	709,800,000.00	BPBD
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	10,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	-	-		10,500,000.00	BPBD
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	10,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	-	-		10,500,000.00	BPBD
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	688,800,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	-	-		688,800,000.00	BPBD
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	125,000,000.00			-	-	-	-	150,000,000.00	BPBD
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	-	-		120,000,000.00	BPBD
	1.05.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	25,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Lektama	DAU	-	-	-		30,000,000.00	BPBD
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-			-	385,000,000.00						-	458,000,000.00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	60,000,000.00			-	-	-	-	60,500,000.00	BPBD
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				150 Orang	60,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	-	-		60,500,000.00	BPBD

	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-			-	160,000,000.00			-	-	-	-	195,500,000.00	BPBD
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				1 Kegiatan	60,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	-	-		60,500,000.00	BPBD
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				15 Unit	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	-	-		75,000,000.00	BPBD
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	-	-		60,000,000.00	BPBD
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-			-	95,000,000.00			-	-	-	-	116,000,000.00	BPBD
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	-	-		60,500,000.00	BPBD
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				500 Orang	45,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	-	-		55,500,000.00	BPBD
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-			-	70,000,000.00			-	-	-	-	86,000,000.00	BPBD
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang di laksanakan				1 Kegiatan	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	-	-		65,500,000.00	BPBD

	1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	20,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	-	-		20,500,000.00	BPBD
	J U M L A H							3,256,571,968.00							3,528,549,000.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS SOSIAL KAB. BURU SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL						4,500,000,000.00							2,907,420,000.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4,500,000,000.00							2,907,420,000.00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						4,500,000,000.00							2,907,420,000.00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3,325,700,000.00						-	1,606,120,000.00	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2,011,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	232,100,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	2,000,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		220,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	11,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		12,100,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	414,500,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	455,950,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	130,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		143,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	17,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		18,700,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	17,500,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		19,250,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	250,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		275,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	90,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	99,330,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	55,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		60,830,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				26 Unit	35,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		38,500,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	810,200,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	818,740,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		6,600,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	14,400,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		15,840,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	65,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		71,500,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	724,800,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		724,800,000.00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-			-	270,000,000.00						-	297,000,000.00	
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	-			-	170,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	187,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT														
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Keluarga	170,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Waesama, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		187,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	110,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				130 Keluarga	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		110,000,000.00	DINAS SOSIAL

3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-			-	278,000,000.00						-	305,800,000.00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-			-	235,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	258,500,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Orang	40,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		44,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				130 Orang	25,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		27,500,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	40,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		44,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	30,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		33,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak														
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				130 Orang	25,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		27,500,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														

			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		27,500,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan														
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	50,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		55,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-			-	43,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	47,300,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang														
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan perlengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	20,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		22,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	23,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		25,300,000.00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-			-	500,000,000.00						-	550,000,000.00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	500,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	550,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														

			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				32000 Orang	380,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		418,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				11000 Keluarga	40,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		44,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				130 Keluarga	80,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		88,000,000.00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-			-	126,300,000.00						-	148,500,000.00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-			-	75,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	82,500,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				230 Orang	40,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		44,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	35,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		38,500,000.00	DINAS SOSIAL

	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	51,300,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	66,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	51,300,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		66,000,000.00	DINAS SOSIAL
	J U M L A H							4,500,000,000.00							2,907,420,000.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BURU SELATAN TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK						4,296,618,000.00							4,166,198,000.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4,296,618,000.00							4,166,198,000.00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						125,000,000.00							175,000,000.00	
1.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-			-	125,000,000.00						-	175,000,000.00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	100,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		100,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	75,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	75,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				5 Orang	75,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		75,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN

	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						4,171,618,000.00							3,991,198,000.00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3,319,501,000.00						-	3,316,198,000.00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	0.00	DINAS PEMBERDAYAAN
	2.13.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				1 Dokumen	10,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	DINAS PEMBERDAYAAN
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2,277,401,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	2,280,098,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bula n	2,260,098,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		2,260,098,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	17,303,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		20,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	536,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	540,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		50,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	150,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		150,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		22,500,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				48 Dokumen	16,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		17,500,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	300,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		300,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	75,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	75,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	75,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		75,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	329,600,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	329,600,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		5,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	15,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		15,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	309,600,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		309,600,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	91,500,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	91,500,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	91,500,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		91,500,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN
2.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	577,117,000.00						-	325,000,000.00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-			-	577,117,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	325,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	150,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		150,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN

	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				200 Orang	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	DINAS PEMBERDAYAAN
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	DINAS PEMBERDAYAAN
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Laporan	77,117,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	DINAS PEMBERDAYAAN
	2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				1 Laporan	150,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		175,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN
3.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-			-	275,000,000.00						-	350,000,000.00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	275,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	350,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	75,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		100,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														

			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	200,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		250,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN
	J U M L A H							4,296,618,000.00							4,166,198,000.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. BURU SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KETAHANAN PANGAN						3,892,894,860.00							4,119,837,600.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3,892,894,860.00							4,119,837,600.00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						3,892,894,860.00							4,119,837,600.00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2,651,691,805.00						-	2,800,767,600.00	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9,796,000.00				5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	10,200,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	4,997,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		5,100,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				8 Dokumen	4,799,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		5,100,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1,705,128,600.00				5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	1,805,428,600.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	1,691,375,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		1,791,375,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	8,098,500.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		8,298,500.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	5,655,100.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		5,755,100.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	80,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	81,230,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	80,000,000.00	Semua Kota/Kab	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		81,230,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	446,154,205.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	472,409,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	110,211,205.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		121,801,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	74,520,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		75,810,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			-				-	15,000,000.00	-	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		18,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	246,423,000.00	Semua Kota/Kab	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		256,798,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	326,613,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	336,700,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	3,813,000.00	Semua Kota/Kab	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		4,900,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	18,000,000.00	Kec. Namrole, Lektama	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		19,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	304,800,000.00	Kec. Namrole, Lektama	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		312,800,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	84,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	94,800,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	84,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		94,800,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	-	-			-	100,000,000.00						-	115,000,000.00	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	115,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya														
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				2 Unit	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		115,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-			-	930,705,000.00						-	987,070,000.00	

	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-			-	399,205,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	428,170,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				5 Laporan	85,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		90,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia														
			Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				3 Unit	71,050,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		72,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				25 Keluarga	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		120,970,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis				6 Laporan	69,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		70,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				5 Dokumen	74,155,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		75,200,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN

	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-			-	212,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	220,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				15 Ton	212,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		220,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-			-	319,500,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	338,900,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			<i>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>				8 Laporan	319,500,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		338,900,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-			-	152,100,000.00						-	158,000,000.00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	-			-	67,100,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	68,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
			<i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan</i>				5 Dokumen	67,100,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		68,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN

	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	85,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	90,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				5 Laporan	85,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		90,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
5.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-			-	58,398,055.00						-	59,000,000.00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	58,398,055.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	59,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				2 Dokumen	58,398,055.00	Kec. Namrole, Labuang	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		59,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	J U M L A H							3,892,894,860.00							4,119,837,600.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BURU SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						6,019,130,000.00							6,311,360,000.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5,959,130,000.00							6,245,360,000.00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						5,959,130,000.00							6,245,360,000.00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5,074,130,000.00						-	5,274,360,000.00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	17,500,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	17,500,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	7,500,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		7,500,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	10,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		10,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1,368,160,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	1,369,160,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	1,353,160,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		1,353,160,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		16,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	250,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	275,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		55,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	200,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		220,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	837,470,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	918,700,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8,470,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		7,700,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	65,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		70,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	80,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		88,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	70,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		77,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	14,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		16,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	600,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		660,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	370,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	407,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	150,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		165,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			-				-	70,000,000.00	-	-	-	-	-		77,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	150,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		165,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1,731,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	1,737,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		11,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	25,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		26,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,696,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		1,700,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	500,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	550,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	500,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		550,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	250,000,000.00						-	275,000,000.00	

	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	-			-	100,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	110,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota														
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	100,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		110,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-			-	150,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	165,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD														
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	100,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		110,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS														
			Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi				1 Dokumen	50,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		55,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	110,000,000.00						-	121,000,000.00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	60,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	66,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	30,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		33,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	30,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		33,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	50,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	55,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	50,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		55,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-			-	30,000,000.00						-	33,000,000.00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-			-	30,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	33,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				1 Unit	30,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		33,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	-			-	50,000,000.00						-	55,000,000.00	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	-	-			-	50,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	55,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3														
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				1 Laporan	50,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		55,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-			-	80,000,000.00						-	88,000,000.00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	80,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	88,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														

			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				1 Dokumen	30,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		33,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				100 Badan Usaha	50,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		55,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	-	-			-	50,000,000.00						-	55,000,000.00	
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-	-			-	50,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	55,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen	50,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		55,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-			-	75,000,000.00						-	80,000,000.00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	75,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	80,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	75,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		80,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-			-	50,000,000.00						-	55,000,000.00	

	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	55,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				1 Entitas	50,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		55,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	30,000,000.00						-	33,000,000.00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-	-			-	30,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	33,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				20 Pengaduan	30,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		33,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-			-	160,000,000.00						-	176,000,000.00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	160,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	176,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				1 Kelompok	50,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		55,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	30,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		33,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				1 Unit	50,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		55,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota														
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	30,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		33,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						60,000,000.00							66,000,000.00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						60,000,000.00							66,000,000.00	
1.	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	-	-			-	60,000,000.00						-	66,000,000.00	
	3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	-	-			-	60,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	66,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.04.2.01.0014	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota														
			Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan				1 Ha	30,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		33,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.04.2.01.0015	Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota														
			Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem				1 Ha	30,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		33,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	J U M L A H							6,019,130,000.00							6,311,360,000.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BURU SELATAN TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						2,863,479,000.00							1,800,500,000.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2,863,479,000.00							1,800,500,000.00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						2,863,479,000.00							1,800,500,000.00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2,506,479,000.00						-	1,239,000,000.00	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1,651,079,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	26,500,000.00	DISDUKCAPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1,631,079,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	DISDUKCAPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	20,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		26,500,000.00	DISDUKCAPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	17,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	85,000,000.00	DISDUKCAPIL
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	17,000,000.00	Kec. Waesama, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		85,000,000.00	DISDUKCAPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	325,900,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	463,300,000.00	DISDUKCAPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		5,500,000.00	DISDUKCAPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	36,900,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		42,000,000.00	DISDUKCAPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	96,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		102,000,000.00	DISDUKCAPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	23,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		31,500,000.00	DISDUKCAPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	6,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		6,300,000.00	DISDUKCAPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	162,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		276,000,000.00	DISDUKCAPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	15,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	60,000,000.00	DISDUKCAPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	15,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		60,000,000.00	DISDUKCAPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	379,500,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	458,250,000.00	DISDUKCAPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	2,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		5,250,000.00	DISDUKCAPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	17,500,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		21,000,000.00	DISDUKCAPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	360,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		432,000,000.00	DISDUKCAPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	118,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	145,950,000.00	DISDUKCAPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	84,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		88,200,000.00	DISDUKCAPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	20,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		31,500,000.00	DISDUKCAPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	14,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		26,250,000.00	DISDUKCAPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-			-	267,000,000.00						-	438,000,000.00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	267,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	438,000,000.00	DISDUKCAPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				15000000 dokumen Dokumen	28,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		40,000,000.00	DISDUKCAPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	11,000,000.00	Kec. Waesama, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		95,000,000.00	DISDUKCAPIL
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				15000000 dokumen Dokumen	28,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		40,000,000.00	DISDUKCAPIL
	2.12.02.2.01.0008	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk														

			Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk				80000000 Dokumen	200,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		263,000,000.00	DISDUKCAPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-			-	75,000,000.00						-	107,500,000.00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			-	75,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	107,500,000.00	DISDUKCAPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				3000 Dokumen	28,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		55,000,000.00	DISDUKCAPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				4 Layanan	47,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		52,500,000.00	DISDUKCAPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-			-	15,000,000.00						-	16,000,000.00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-			-	15,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	16,000,000.00	DISDUKCAPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				10 Dokumen	15,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		16,000,000.00	DISDUKCAPIL
	J U M L A H							2,863,479,000.00							1,800,500,000.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERHUBUNGAN KAB. BURU SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERHUBUNGAN						5,290,340,000.00							5,584,500,000.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5,290,340,000.00							5,584,500,000.00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						5,290,340,000.00							5,584,500,000.00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2,735,340,000.00						-	2,844,500,000.00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	62,500,000.00			-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	74,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		60,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				65 Dokumen	6,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		7,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				65 Laporan	6,500,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		7,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1,509,000,000.00			-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	1,559,500,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	1,500,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		1,550,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6 Laporan	9,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		9,500,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	75,000,000.00			-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	80,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				6 Dokumen	75,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		80,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	460,040,000.00			-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	486,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		5,500,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	55,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		60,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	110,040,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		120,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		35,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	10,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		10,500,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	250,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		255,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	35,000,000.00			-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	40,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	35,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		40,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	477,800,000.00			-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	483,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	5,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		5,500,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	7,200,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		7,500,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	465,600,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		470,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	110,000,000.00			-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	115,500,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		105,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	10,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		10,500,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	6,000,000.00			-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	6,500,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	6,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		6,500,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-			-	1,400,000,000.00						-	1,465,000,000.00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	1,250,000,000.00			-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	1,305,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				40 Unit	1,000,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		1,050,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				20 Unit	250,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		255,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	150,000,000.00			-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	160,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	80,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		85,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	70,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		75,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-			-	1,155,000,000.00						-	1,275,000,000.00	
	2.15.03.2.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	30,000,000.00			-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	35,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	30,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		35,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	25,000,000.00			-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	30,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota														

			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	25,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		30,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.08	Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	-	-			-	100,000,000.00			-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	110,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.08.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal				1 Laporan	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		110,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-			-	1,000,000,000.00			-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	1,100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				1 Laporan	1,000,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang	-		1,100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H							5,290,340,000.00							5,584,500,000.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BURU SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						2,676,354,000.00							2,722,084,000.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2,676,354,000.00							2,722,084,000.00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						2,626,354,000.00							2,669,584,000.00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2,411,354,000.00						-	2,443,834,000.00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	43,400,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	45,570,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		5,250,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	38,400,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		40,320,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1,322,354,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	1,322,704,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1,315,354,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		1,315,354,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	7,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		7,350,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	70,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	73,500,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	70,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		73,500,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	373,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	391,650,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		21,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		15,750,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	38,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		39,900,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	10,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		10,500,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	290,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		304,500,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	60,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	63,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	20,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		21,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	40,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		42,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	458,600,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	463,410,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	12,200,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		12,810,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	84,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		88,200,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	362,400,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		362,400,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	84,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	84,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	84,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		84,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	-			-	115,000,000.00						-	120,750,000.00	

	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	115,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	120,750,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				6 Komunitas	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		52,500,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				1 Media	65,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		68,250,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-			-	100,000,000.00						-	105,000,000.00	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	105,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional														
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional				2 Aplikasi	40,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		42,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah														

			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan				1 Dokumen	40,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		42,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				4 Perangkat Daerah	20,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		21,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						50,000,000.00							52,500,000.00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-			-	50,000,000.00						-	52,500,000.00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	52,500,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		52,500,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	J U M L A H							2,676,354,000.00							2,722,084,000.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB. BURU SELATAN TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						2,446,421,000.00							2,036,000,000.00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2,239,421,000.00							1,808,000,000.00		
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						500,000,000.00							520,000,000.00		
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	500,000,000.00						-	520,000,000.00		
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	500,000,000.00				-	-	-	-	520,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				59 Laporan	500,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-		520,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						1,739,421,000.00							1,288,000,000.00		
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	36,000,000.00				5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	40,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	18,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		20,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	18,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-		20,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	

	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1,069,921,000.00			-	-	-	-	0.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				11 Orang/bulan	1,069,921,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-		0.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	100,000,000.00			-	-	-	-	120,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				5 Orang	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-		120,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	73,500,000.00			-	-	-	-	599,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	35,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-		37,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	18,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-		20,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				5 Dokumen	20,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-		22,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				20 Laporan	500,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-		520,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	26,000,000.00			-	-	-	-	29,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				10 Laporan	20,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-		22,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	6,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-		7,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	84,000,000.00			-	-	-	-	90,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paikaknya				1 Unit	84,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-		90,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	-	-			-	100,000,000.00						-	120,000,000.00	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100,000,000.00			-	-	-	-	120,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				25 Unit Usaha	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-		120,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-			-	150,000,000.00						-	170,000,000.00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	150,000,000.00			-	-	-	-	170,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				40 Orang	150,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-		170,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-			-	100,000,000.00						-	120,000,000.00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-			-	100,000,000.00			-	-	-	-	120,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0008	Pemulihan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				40 Unit Usaha	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-		120,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	X	NON URUSAN						207,000,000.00							228,000,000.00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						207,000,000.00							228,000,000.00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	207,000,000.00						-	228,000,000.00	

	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7,000,000.00			-	-	-	-	8,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	7,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-		8,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	200,000,000.00			-	-	-	-	220,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	200,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-	-		220,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	J U M L A H							2,446,421,000.00							2,036,000,000.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BURU SELATAN TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						2,731,349,000.00							2,954,074,000.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2,731,349,000.00							2,954,074,000.00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						2,731,349,000.00							2,954,074,000.00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2,443,372,000.00						-	2,637,301,000.00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	18,749,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	19,686,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4,441,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		4,663,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	14,308,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		15,023,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1,568,852,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	1,647,689,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	1,560,949,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		1,638,996,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7,903,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		8,693,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	60,712,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	66,783,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL

	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	20,950,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		23,045,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	39,762,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		43,738,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	274,399,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	367,617,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	28,960,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		31,856,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		71,280,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6,845,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		7,529,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	8,565,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		9,421,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	225,029,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		247,531,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	40,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	44,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	20,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		22,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	20,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		22,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	396,660,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	399,126,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	5,460,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		6,006,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	19,200,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		21,120,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	372,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		372,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	84,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	92,400,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	84,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		92,400,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL
2.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-			-	120,000,000.00						-	132,000,000.00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	120,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	132,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	120,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		132,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL
3.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-			-	144,086,000.00						-	158,493,000.00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	144,086,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	158,493,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														

			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				100 Pelaku Usaha	87,289,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		96,017,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				100 Pelaku Usaha	29,797,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		32,776,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				1 Kegiatan Usaha	27,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		29,700,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL
4.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-			-	23,891,000.00						-	26,280,000.00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	23,891,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	26,280,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan				3 Dokumen	23,891,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		26,280,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL
	J U M L A H							2,731,349,000.00								2,954,074,000.00

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. BURU SELATAN TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						3,834,624,000.00							4,017,931,000.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3,822,624,000.00							4,005,691,000.00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						3,822,624,000.00							4,005,691,000.00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2,512,384,000.00						-	2,562,391,000.00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	18,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	18,360,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	18,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		18,360,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1,389,784,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	1,417,579,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1,374,784,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		1,402,279,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Kamlanglale	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		15,300,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	97,600,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	99,552,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				58 Paket	11,600,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Kamlanglale	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		11,832,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	86,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		87,720,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	397,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	404,940,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	49,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Kamlanglale	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		49,980,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Kamlanglale	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		51,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	33,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Kamlanglale	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		33,660,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	15,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Kamlanglale	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		15,300,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	250,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Kamlanglale	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		255,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	135,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	137,600,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	55,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Kamlanglale	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		56,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	35,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Kamlanglale	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		35,700,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	45,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Kamlanglale	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		45,900,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	-	-			-	382,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	389,580,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	19,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Kamlanglale	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		19,380,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	15,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Kamlanglale	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		15,300,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				43 Laporan	348,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Kamlanglale	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		354,900,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	-	-			-	93,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	94,780,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	84,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Kamlanglale	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		85,600,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	9,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Kamlanglale	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		9,180,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-			-	180,000,000.00						-	255,000,000.00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-			-	130,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	204,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda														
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				10 Orang	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Kamlanglale	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		102,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				50 Orang	80,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Kamlanglale	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		102,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	51,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
			<i>Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>				10 Organisasi	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		51,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-			-	1,080,240,000.00						-	1,137,300,000.00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	565,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	576,300,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota														
			<i>Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia</i>				1 Unit	500,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Kamlanglale	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		510,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar</i>				1 Dokumen	65,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Kamlanglale	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		66,300,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	305,240,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	346,800,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	80,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		91,800,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				40 Orang	225,240,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		255,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	80,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	81,600,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah														
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				0 Orang	80,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		81,600,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-			-	50,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	51,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		51,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-			-	80,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	81,600,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				1 Dokumen	80,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		81,600,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-			-	50,000,000.00						-	51,000,000.00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-			-	50,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	51,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah														

			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		51,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	X	NON URUSAN						12,000,000.00							12,240,000.00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						12,000,000.00							12,240,000.00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	12,000,000.00						-	12,240,000.00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	12,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	12,240,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	12,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Kamlanglale	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaa n pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		12,240,000.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	J U M L A H							3,834,624,000.00							4,017,931,000.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BURU SELATAN TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						2,754,000,000.00							2,991,610,000.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2,754,000,000.00							2,991,610,000.00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						2,332,350,000.00							2,537,960,000.00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1,756,350,000.00						-	1,902,460,000.00	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1,108,850,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	1,234,410,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1,105,600,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		1,226,160,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	3,250,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		8,250,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	63,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	69,300,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		11,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		11,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	10,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		11,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

	2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	3,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		3,300,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	30,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		33,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	344,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	345,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	10,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		11,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	334,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		334,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	240,500,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	253,750,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	108,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		108,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	132,500,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		145,750,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-	-			-	576,000,000.00						-	635,500,000.00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	405,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	445,500,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				6 Perpustakaan	60,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		66,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	30,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		33,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				150 Orang	80,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		88,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				2000 Eksemplar	227,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		249,700,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	8,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		8,800,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	171,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	190,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				5 Perpustakaan	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		110,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				9 Orang	11,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		14,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				6 Lokus	60,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		66,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						421,650,000.00							453,650,000.00	

1.	2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	61,500,000.00						-	67,650,000.00	
	2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	18,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	19,800,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			3 Orang	18,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		19,800,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	39,500,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	43,450,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	7,500,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		8,250,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	12,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		13,200,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			12 Dokumen	5,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		5,500,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			12 Dokumen	15,000,000.00	Kec. Namrole, Waenono	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		16,500,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	4,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	4,400,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	4,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		4,400,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-	-		-	360,150,000.00						-	386,000,000.00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	56,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	59,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota													

			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				12 Laporan	56,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		59,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-			-	304,150,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	327,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														
			<i>Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN</i>				45 Pengguna	70,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		77,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota</i>				12 Laporan	234,150,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		250,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	J U M L A H							2,754,000,000.00							2,991,610,000.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERIKANAN KAB. BURU SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERIKANAN						8,101,700,000.00							8,468,700,000.00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						8,101,700,000.00							8,468,700,000.00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						8,101,700,000.00							8,468,700,000.00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4,131,700,000.00						-	4,318,700,000.00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	15,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	16,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	15,000,000.00	Kec. Namrole, Elfule	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		16,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1,607,500,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	1,710,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	1,600,000,000.00	Kec. Namrole, Elfule	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		1,700,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7,500,000.00	Kec. Namrole, Elfule	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		10,000,000.00	DINAS PERIKANAN

	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	200,000,000.00			-	3) Peningkatan penguatan wawasan kebangsaan dan jati diri masyarakat serta pemantapan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, taat hukum dan harmonis	-	-	210,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				75 Orang	100,000,000.00	Desa Oki Baru Kec. Namrole, Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan dan Desa Nalbessy Kec. Leksula	DAU	-	3) Peningkatan penguatan wawasan kebangsaan dan jati diri masyarakat serta pemantapan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, taat hukum dan harmonis	-		110,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	100,000,000.00	Kec. Namrole, Elfule	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		100,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	530,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	540,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	50,000,000.00	Kec. Namrole, Masnana	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		50,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	15,000,000.00	Kec. Namrole, Elfule	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		17,500,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	90,000,000.00	Kec. Namrole, Elfule	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		95,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	15,000,000.00	Kec. Namrole, Elfule	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		16,500,000.00	DINAS PERIKANAN

	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	10,000,000.00	Kec. Namrole, Elfule	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		11,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	350,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		350,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	100,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	110,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	50,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		55,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	50,000,000.00	Kec. Namrole, Elfule	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		55,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	580,200,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	581,200,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10,000,000.00	Kec. Namrole, Elfule	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		11,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	35,000,000.00	Kec. Namrole, Elfule	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		35,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	535,200,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		535,200,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1,099,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	1,151,500,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paiknva				1 Unit	84,000,000.00	Kec. Namrole, Elfule	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		84,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1,000,000,000.00	Kec. Namrole, Masnana	DAU	-	2) Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pengen dalian pemanfaatan ruang	-		1,050,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	15,000,000.00	Kec. Namrole, Elfule	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		17,500,000.00	DINAS PERIKANAN
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-			-	3,400,000,000.00						-	3,540,000,000.00	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	2,600,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	2,705,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	100,000,000.00	Desa Ori Baru Kec. Namrole, Desa Wamsisi Kec. Waesama, Desa Ulima Kec. Ambalau, Desa Biloro Kec. Kepala Madan dan Desa Nalbessy Kec. Leksula	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		105,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				20 Unit	2,500,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU & DAK Fisik	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		2,600,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	800,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	835,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														

			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				50 Orang	500,000,000.00	Desa Waefusi Kec. Namrole, Desa Waelikut Kec. Waesama, Desa Masawoy Kec. Ambalau, Desa Biloro Kec. Kepala Madan dan Desa Leksula Kec. Leksula	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		525,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				20 Unit	300,000,000.00	Desa Oki Baru Kec. Namrole, Desa Waelikut Kec. Waesama dan Desa Nalbessy Kec. Leksula	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		310,000,000.00	DINAS PERIKANAN
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-			-	150,000,000.00						-	160,000,000.00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-			-	100,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	105,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				10 Kelompok	100,000,000.00	Desa Oki Baru Kec. Namrole, Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan dan Desa Nalbessy Kec. Leksula	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		105,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-			-	50,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	55,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	50,000,000.00	Desa Waefusi Kec. Namrole, Desa Nanali Kec. Kepala Madan, Desa Tifu Kec. Leksula dan Desa Mngeswaen Kec. Fena Fafan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		55,000,000.00	DINAS PERIKANAN
4.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-			-	420,000,000.00						-	450,000,000.00	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-			-	120,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	130,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko														
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				2 Dokumen	120,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		130,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-			-	100,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	110,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko														
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				20 Unit Usaha	100,000,000.00	Desa Batu Tulis Kec. Namrole, Desa Waelikut Kec. Waesama, Desa Biloro Kec. Kepala Madan dan Desa Nalbessy Kec. Leksula	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		110,000,000.00	DINAS PERIKANAN

	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	200,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	210,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				20 Pelaku Usaha	200,000,000.00	Desa Labuang Kec. Namrole, Desa Wamsisi Kec. Waesama, Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan dan Desa Leksula Kec. Leksula	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		210,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	J U M L A H							8,101,700,000.00							8,468,700,000.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PARIWISATA KAB. BURU SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PARIWISATA						3,598,581,000.00							3,598,581,000.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						530,920,000.00							530,920,000.00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						530,920,000.00							530,920,000.00	
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-			-	380,920,000.00						-	380,920,000.00	
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	380,920,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	380,920,000.00	DINAS PARIWISATA
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				10 Unit	380,920,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		380,920,000.00	DINAS PARIWISATA
2.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-			-	150,000,000.00						-	150,000,000.00	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	150,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	150,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				1 Objek	150,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Leksula, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		150,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						3,067,661,000.00							3,067,661,000.00	

	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						3,067,661,000.00							3,067,661,000.00	
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2,317,661,000.00						-	2,317,661,000.00	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	15,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	15,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	15,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		15,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1,324,361,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	1,324,361,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bula n	1,314,361,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		1,314,361,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		10,000,000.00	DINAS PARIWISATA

	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	277,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	277,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		20,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		20,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		15,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		12,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	10,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		10,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	200,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		200,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	100,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	100,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		50,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		50,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	497,300,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	497,300,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	15,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		15,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	10,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		10,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	472,300,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		472,300,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	104,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	104,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	84,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		84,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	10,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		10,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	10,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		10,000,000.00	DINAS PARIWISATA
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-			-	450,000,000.00						-	450,000,000.00	

	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-			-	150,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	150,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				12 Laporan	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		50,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		100,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	300,000,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	300,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				4 Lokasi	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		100,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				2 Unit	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		100,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

			<i>Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>				5 Laporan	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		100,000,000.00	DINAS PARIWISATA
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-			-	300,000,000.00						-	300,000,000.00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	300,000,000.00			-	3) Peningkatan penguatan wawasan kebangsaan dan jati diri masyarakat serta pemantapan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, taat hukum dan harmonis	-	-	300,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri</i>				1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	3) Peningkatan penguatan wawasan kebangsaan dan jati diri masyarakat serta pemantapan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, taat hukum dan harmonis	-		50,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri														
			<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri</i>				3 Dokumen	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		100,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri</i>				2 Kegiatan	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		100,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														

			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				7 Promosi	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		50,000,000.00	DINAS PARIWISATA
	J U M L A H							3,598,581,000.00							3,598,581,000.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERTANIAN KAB. BURU SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERTANIAN						10,026,921,000.00						10,355,162,000.00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						10,026,921,000.00							10,355,162,000.00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						10,026,921,000.00							10,355,162,000.00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6,240,089,000.00						-	6,378,988,400.00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	4,100,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	4,305,000.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4,100,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		4,305,000.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4,381,262,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	4,431,420,050.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				68 Orang/bulan	4,378,101,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		4,428,101,000.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				0 Laporan	3,161,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		3,319,050.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	697,767,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	732,655,350.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	72,952,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		76,599,600.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				0 Paket	2,960,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		3,108,000.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	221,258,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		232,320,900.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	7,256,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		7,618,800.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	8,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		8,400,000.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	385,341,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		404,608,050.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1,025,850,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	1,077,142,500.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	9,450,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		9,922,500.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	6,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		6,300,000.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				129 Laporan	1,010,400,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		1,060,920,000.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	131,110,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	133,465,500.00	DINAS PERTANIAN

	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	84,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		84,000,000.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	47,110,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		49,465,500.00	DINAS PERTANIAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-			-	2,101,640,000.00						-	2,206,722,000.00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	2,101,640,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	2,206,722,000.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				0 Laporan	235,936,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		247,732,800.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				0 Laporan	1,865,704,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		1,958,989,200.00	DINAS PERTANIAN
3.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-			-	1,556,446,000.00						-	1,634,268,300.00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-			-	1,556,446,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	1,634,268,300.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				14 Ha	1,556,446,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		1,634,268,300.00	DINAS PERTANIAN
4.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-			-	128,746,000.00					-		135,183,300.00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	128,746,000.00			-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-	-	135,183,300.00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				4 Orang	128,746,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	5) Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	-		135,183,300.00	DINAS PERTANIAN
	J U M L A H							10,026,921,000.00							10,355,162,000.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BURU SELATAN TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						3,795,988,000.00							4,015,760,000.00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						3,795,988,000.00							4,015,760,000.00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						3,475,988,000.00							3,635,760,000.00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2,603,658,000.00						-	2,707,760,000.00	
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1,472,898,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	1,572,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	1,457,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		1,556,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	15,898,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		16,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN

	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	92,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	55,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	50,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		55,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	42,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	440,260,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	464,260,000.00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	55,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		65,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	77,760,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		84,760,000.00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10,500,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		11,500,000.00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kacaat demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		13,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	285,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		290,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	50,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	55,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		55,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	403,500,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	411,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	20,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		25,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	25,500,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		26,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	43,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		44,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	315,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		316,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	145,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	150,500,000.00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	87,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		87,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	8,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		8,500,000.00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		55,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-			-	231,150,000.00						-	243,000,000.00	

	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-			-	55,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	60,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	55,000,000.00	Desa Wamsisi, Kec. Waesama dan Desa Leksula, Kec. Leksula	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		60,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-	-			-	176,150,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	183,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				12 Dokumen	65,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		70,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				12 Dokumen	111,150,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		113,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-			-	300,000,000.00						-	320,000,000.00	

	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	50,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	60,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		60,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-			-	250,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	260,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	250,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		260,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
4.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-			-	161,180,000.00						-	165,000,000.00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	161,180,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	165,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional														

			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				3 Pelaku Usaha	161,180,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		165,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
5.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-			-	180,000,000.00						-	200,000,000.00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-			-	180,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	200,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				350 Unit	90,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		100,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				300 Orang	90,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		100,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						320,000,000.00							380,000,000.00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-			-	250,000,000.00						-	300,000,000.00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-			-	250,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	300,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN

	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				2 Dokumen	250,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		300,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
2.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-			-	70,000,000.00						-	80,000,000.00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	70,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	80,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				12 Dokumen	70,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		80,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN
	J U M L A H							3,795,988,000.00								4,015,760,000.00

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) SEKRETARIAT DAERAH KAB. BURU SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DAERAH						19,657,975,000.00						21,723,772,500.00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						19,657,975,000.00							21,723,772,500.00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						19,657,975,000.00							21,723,772,500.00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	18,907,975,000.00						-	20,898,772,500.00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	50,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	55,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Kamlanglale	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		55,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	8,050,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	8,855,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				117 Orang/bulan	8,000,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		8,800,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			0				1 0	50,000,000.00	-	-	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		55,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	25,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	27,500,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	25,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		27,500,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	250,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	275,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		110,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	150,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		165,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	3,607,975,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	4,068,772,500.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	75,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		82,500,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	250,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		275,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	300,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		330,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				292545 Paket	132,975,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		146,272,500.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	400,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		440,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	150,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		165,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	300,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		330,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	2,000,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		2,300,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	950,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	1,045,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	200,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		220,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	150,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		165,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Unit	200,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		220,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	200,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		220,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	200,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		220,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1,300,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	1,430,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		110,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	200,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		220,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1,000,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		1,100,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1,575,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	1,732,500,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paiknya				4 Unit	1,200,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		1,320,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	75,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		82,500,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	300,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		330,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	980,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	1,078,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	500,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		550,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	200,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		220,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 Orang	280,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		308,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	2,120,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	2,332,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	750,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		825,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														

			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	750,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		825,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	620,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		682,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	750,000,000.00						-	825,000,000.00	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-			-	750,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	825,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	750,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		825,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	J U M L A H							19,657,975,000.00							21,723,772,500.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BURU SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA						1,642,000,000.00							1,657,921,916.00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						1,642,000,000.00							1,657,921,916.00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						1,642,000,000.00							1,657,921,916.00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	826,019,073.00						-	841,940,989.00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	11,576,266.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	11,576,266.00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	11,576,266.00	Kec. Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		11,576,266.00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	400,241,868.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	416,163,784.00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	34,885,003.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		34,885,003.00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	31,724,712.00	Kec. Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		31,724,712.00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15,193,827.00	Kec. Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		15,193,827.00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	318,438,326.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		334,360,242.00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	342,200,939.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	342,200,939.00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	14,233,019.00	Kec. Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		14,233,019.00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12,908,700.00	Kec. Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		12,908,700.00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	315,059,220.00	Kec. Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		315,059,220.00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	72,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	72,000,000.00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paiknnya				1 Unit	72,000,000.00	Kec. Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		72,000,000.00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	815,980,927.00						-	815,980,927.00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-	-			-	815,980,927.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	815,980,927.00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				5 Dokumen	400,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		400,000,000.00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				3 Dokumen	150,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		150,000,000.00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	265,980,927.00	Kec. Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		265,980,927.00	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
	J U M L A H							1,642,000,000.00							1,657,921,916.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM (SETDA) KAB. BURU SELATAN TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM						881,200,000.00								
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						881,200,000.00							881,200,000.00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						881,200,000.00							881,200,000.00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	650,190,000.00							650,190,000.00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7,000,000.00			-	-			7,000,000.00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-			7,000,000.00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	35,000,000.00			-	-			35,000,000.00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	35,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-			35,000,000.00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	212,590,000.00			-	-			212,590,000.00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	14,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-			14,000,000.00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	12,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-			12,000,000.00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	9,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-			9,000,000.00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	14,500,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-				14,500,000.00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	163,090,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-				163,090,000.00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	15,000,000.00			-	-				15,000,000.00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel															
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	15,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-				15,000,000.00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	308,600,000.00			-	-				308,600,000.00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	5,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-				5,000,000.00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	303,600,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-				303,600,000.00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	72,000,000.00			-	-				72,000,000.00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	72,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-				72,000,000.00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-			-	231,010,000.00								231,010,000.00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-			-	231,010,000.00			-	-				231,010,000.00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	36,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-				36,000,000.00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian															
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				3 Laporan	195,010,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	-				195,010,000.00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
	J U M L A H							881,200,000.00									

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (SETDA) KAB. BURU SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						8,627,105,030.00							9,489,815,533.00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						8,627,105,030.00							9,489,815,533.00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						8,627,105,030.00							9,489,815,533.00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	897,569,250.00						-	987,326,175.00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7,590,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	8,349,000.00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7,590,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		8,349,000.00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	76,948,300.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	84,643,130.00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	76,948,300.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		84,643,130.00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	290,572,750.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	319,630,025.00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	71,472,600.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		78,619,860.00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2,325,900.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		2,558,490.00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	13,701,600.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		15,071,760.00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10,999,450.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		12,099,395.00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	192,073,200.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		211,280,520.00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	443,258,200.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	487,584,020.00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12,707,200.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		13,977,920.00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	9,570,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		10,527,000.00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2,321,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		2,553,100.00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	418,660,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		460,526,000.00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	79,200,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	87,120,000.00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	79,200,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		87,120,000.00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	7,729,535,780.00						-	8,502,489,358.00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	7,729,535,780.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	8,502,489,358.00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														

			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	7,553,985,780.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		8,309,384,358.00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	175,550,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		193,105,000.00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	J U M L A H							8,627,105,030.00							9,489,815,533.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BAGIAN HUKUM (SETDA) KAB. BURU SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN HUKUM						948,000,000.00						981,400,000.00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						948,000,000.00							981,400,000.00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						948,000,000.00							981,400,000.00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	758,000,000.00						-	791,400,000.00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	2,000,000.00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Orang Dokumen	2,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		2,000,000.00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	80,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	110,000,000.00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				52 Orang Paket	10,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		10,000,000.00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		50,000,000.00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	20,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		50,000,000.00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	237,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	239,700,000.00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		10,000,000.00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	7,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		7,700,000.00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		11,000,000.00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	10,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		11,000,000.00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9 Orang Laporan	200,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		200,000,000.00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	10,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	10,000,000.00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	10,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		10,000,000.00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	357,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	357,700,000.00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		7,700,000.00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				41 Orang Laporan	350,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		350,000,000.00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	72,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	72,000,000.00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	72,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		72,000,000.00	BAGIAN HUKUM
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	190,000,000.00						-	190,000,000.00	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-			-	190,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	190,000,000.00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				20 Perda dan Perbup Dokumen	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		100,000,000.00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				1 Kasus	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		50,000,000.00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				1 Website Dokumen	40,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		40,000,000.00	BAGIAN HUKUM
	J U M L A H							948,000,000.00							981,400,000.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BAGIAN UMUM (SETDA) KAB. BURU SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN UMUM						7,409,114,612.00							7,545,947,000.00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						7,409,114,612.00							7,545,947,000.00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						7,409,114,612.00							7,545,947,000.00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	7,409,114,612.00						-	7,545,947,000.00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	45,800,000.00			-	-	-	-	50,700,000.00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	21,500,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	-	-		25,200,000.00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	24,300,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		25,500,000.00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	114,377,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	104,377,000.00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	114,377,000.00	Semua Kota/Kab	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		104,377,000.00	BAGIAN UMUM

	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1,584,720,500.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	1,607,820,000.00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	45,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		35,000,000.00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	158,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		200,000,000.00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	65,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		62,000,000.00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	40,200,500.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		40,320,000.00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	24,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		11,500,000.00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1,230,000,000.00	Semua Kota/Kab	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		1,235,000,000.00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	22,520,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		24,000,000.00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	2,906,698,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	2,995,000,000.00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1,600,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		1,650,000,000.00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	350,510,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		380,000,000.00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	956,188,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		965,000,000.00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2,333,539,112.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	2,318,050,000.00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	46,739,112.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		26,250,000.00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	440,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		445,000,000.00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,846,800,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		1,846,800,000.00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	423,980,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	470,000,000.00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	200,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		220,000,000.00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	223,980,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		250,000,000.00	BAGIAN UMUM
	J U M L A H							7,409,114,612.00							7,545,947,000.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BAGIAN ORGANISASI (SETDA) KAB. BURU SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN ORGANISASI						868,400,000.00						0.00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						868,400,000.00							0.00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						868,400,000.00							0.00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	868,400,000.00						-	0.00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	0.00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Bulan Laporan	5,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	27,200,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	0.00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	27,200,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BAGIAN ORGANISASI

	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	219,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	0.00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	16,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	8,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	185,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BAGIAN ORGANISASI

	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	22,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	0.00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	22,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	258,200,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	0.00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,500,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	34,800,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2,500,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	218,400,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	72,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	0.00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	72,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	265,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	0.00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														

			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				5 Dokumen	110,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				5 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				5 Dokumen	55,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				5 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BAGIAN ORGANISASI
	J U M L A H							868,400,000.00							0.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOLER (SETDA) KAB. BURU SELATAN TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOLER						924,000,000.00							1,012,700,000.00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						924,000,000.00							1,012,700,000.00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						924,000,000.00							1,012,700,000.00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	924,000,000.00						-	1,012,700,000.00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5,500,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	32,000,000.00	BAGIAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	5,500,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		32,000,000.00	BAGIAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	40,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	50,600,000.00	BAGIAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	40,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		50,600,000.00	BAGIAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	161,772,800.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	174,872,800.00	BAGIAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,500,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		16,600,000.00	BAGIAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12,520,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		13,520,000.00	BAGIAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15,200,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		16,200,000.00	BAGIAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				30 Laporan	118,552,800.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		128,552,800.00	BAGIAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	80,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	82,500,000.00	BAGIAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	80,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		82,500,000.00	BAGIAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	326,490,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	338,490,000.00	BAGIAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	6,090,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		7,090,000.00	BAGIAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	34,800,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		35,800,000.00	BAGIAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				35 Laporan	285,600,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		295,600,000.00	BAGIAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	72,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	75,000,000.00	BAGIAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	72,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		75,000,000.00	BAGIAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	238,237,200.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	259,237,200.00	BAGIAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan</i>				50 Laporan	119,118,600.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		120,118,600.00	BAGIAN PROTOKOLER
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														

			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				50 Laporan	119,118,600.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		139,118,600.00	BAGIAN PROTOKOLER
	J U M L A H							924,000,000.00							1,012,700,000.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (SETDA) KAB. BURU SELATAN TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						942,800,000.00							1,006,180,000.00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						933,300,000.00							995,730,000.00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						933,300,000.00							995,730,000.00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	638,300,000.00						-	671,230,000.00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9,500,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	10,450,000.00	B. PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	9,500,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		10,450,000.00	B. PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9,600,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	10,560,000.00	B. PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	9,600,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		10,560,000.00	B. PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	138,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	151,800,000.00	B. PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	138,000,000.00	Semua Kota/Kab	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		151,800,000.00	B. PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	150,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	165,000,000.00	B. PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		2,200,000.00	B. PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	38,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		41,800,000.00	B. PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			0				1 0	21,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		23,100,000.00	B. PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		4,400,000.00	B. PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	85,000,000.00	Semua Kota/Kab	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		93,500,000.00	B. PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	319,200,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	320,220,000.00	B. PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7,200,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		7,920,000.00	B. PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		3,300,000.00	B. PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	309,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		309,000,000.00	B. PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	12,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	13,200,000.00	B. PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	1,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		1,100,000.00	B. PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			0				0 0	11,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		12,100,000.00	B. PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-			-	295,000,000.00						-	324,500,000.00	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	295,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	324,500,000.00	B. PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				60 Dokumen	175,000,000.00	Semua Kota/Kab	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		192,500,000.00	B. PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	120,000,000.00	-	-	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		132,000,000.00	B. PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	X	NON URUSAN						9,500,000.00							10,450,000.00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						9,500,000.00							10,450,000.00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	9,500,000.00						-	10,450,000.00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9,500,000.00			-	-	-	-	10,450,000.00	B. PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	9,500,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	-	-		10,450,000.00	B. PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	J U M L A H							942,800,000.00							1,006,180,000.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (SETDA) KAB. BURU SELATAN TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						840,400,000.00							949,100,000.00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						840,400,000.00							949,100,000.00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						840,400,000.00							949,100,000.00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	528,730,000.00						-	609,100,000.00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	5,100,000.00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		5,100,000.00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	25,700,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	30,000,000.00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	25,700,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		30,000,000.00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	148,280,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	207,600,000.00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		75,000,000.00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6,700,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		7,000,000.00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5,500,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		5,600,000.00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	86,080,000.00	Semua Kota/Kab	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		120,000,000.00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	277,750,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	294,400,000.00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,150,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		4,000,000.00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	8,400,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		15,000,000.00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	266,200,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		275,400,000.00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	72,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	72,000,000.00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paiknnya				2 Unit	72,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		72,000,000.00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-			-	311,670,000.00						-	340,000,000.00	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-			-	311,670,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	340,000,000.00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	140,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		150,000,000.00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	171,670,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		190,000,000.00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	J U M L A H							840,400,000.00							949,100,000.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) SEKRETARIAT DPRD KAB. BURU SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DPRD						27,475,866,000.00							27,475,866,000.00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						27,475,866,000.00							27,475,866,000.00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						27,475,866,000.00							27,475,866,000.00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	18,773,128,000.00						-	18,773,128,000.00	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3,218,203,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	3,218,203,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/bulan	3,207,186,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		3,207,186,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	11,017,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		11,017,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	261,748,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	261,748,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	75,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		75,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009															
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	186,748,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		186,748,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2,921,472,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	2,921,472,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		25,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	288,806,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		288,806,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	155,402,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		155,402,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,915,657,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		1,915,657,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	41,607,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		41,607,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	45,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		45,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	450,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		450,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	275,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	275,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				75 Unit	150,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		150,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		50,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	75,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		75,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD

	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	641,800,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	641,800,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	19,800,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		19,800,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	222,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		222,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	400,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		400,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	148,420,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	148,420,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	139,400,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		139,400,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	9,020,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		9,020,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	10,816,905,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	10,816,905,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				20 Orang/Bulan	10,228,695,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		10,228,695,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	487,710,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		487,710,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				20 Orang	100,500,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		100,500,000.00	SEKRETARIAT DPRD

	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-	-			-	489,580,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	489,580,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				1 Laporan	285,800,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		285,800,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				1 Paket	203,780,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		203,780,000.00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-			-	8,702,738,000.00						-	8,702,738,000.00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-			-	10,206,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	10,206,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD														
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	10,206,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		10,206,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	33,380,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	33,380,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	9,406,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		9,406,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	9,406,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		9,406,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	4,856,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		4,856,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	4,856,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		4,856,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	4,856,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		4,856,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	4,856,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	4,856,000.00	SEKRETARIAT DPRD

	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	4,856,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		4,856,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	1,402,590,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	1,402,590,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1 Dokumen	979,240,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		979,240,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	405,600,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		405,600,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	17,750,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		17,750,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	4,451,706,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	4,451,706,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				1 Laporan	1,500,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		1,500,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	10,206,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		10,206,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				1 Dokumen	2,941,500,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		2,941,500,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-	2,800,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	2,800,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1 Dokumen	2,800,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		2,800,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	J U M L A H							27,475,866,000.00							27,475,866,000.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB. BURU SELATAN TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						9,120,548,000.00						10,206,546,200.00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						9,120,548,000.00							10,206,546,200.00	
	5.01	PERENCANAAN						8,724,137,100.00							9,723,495,800.00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6,200,641,000.00						-	6,534,058,000.00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	187,669,900.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	189,669,900.00	BAPPELITBANG
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	86,352,200.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		87,352,200.00	BAPPELITBANG
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	101,317,700.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		102,317,700.00	BAPPELITBANG
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3,655,280,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	3,758,280,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	3,589,708,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		3,689,708,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		52,000,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15,572,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		16,572,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	140,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	235,517,000.00	BAPPELITBANG

	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	40,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		42,000,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		193,517,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1,036,691,100.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	1,060,691,100.00	BAPPELITBANG
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		11,000,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	119,673,100.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		129,673,100.00	BAPPELITBANG
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	206,820,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		216,820,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	55,195,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		56,195,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	22,200,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		23,200,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	622,803,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		623,803,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	275,200,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	287,200,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	80,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		81,000,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	75,200,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		76,200,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				50 Unit	120,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		130,000,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	817,800,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	892,700,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	13,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		15,600,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	160,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		180,000,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12/Bulan Laporan	6,400,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		8,700,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				54 Orang/ Laporan	638,400,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		688,400,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	88,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	110,000,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				6 Unit	38,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		40,000,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	25,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		35,000,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		35,000,000.00	BAPPELITBANG

2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	-			-	1,144,589,001.00						-	1,377,161,300.00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-			-	654,589,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	747,211,300.00	BAPPELITBANG
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen	79,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		131,570,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				1 Dokumen	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		120,000,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	86,432,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	BAPPELITBANG
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	63,257,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		73,257,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		157,684,300.00	BAPPELITBANG
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan														
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				6 Usulan	112,500,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		121,300,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dokumen	113,400,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		143,400,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	167,500,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	215,500,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				45 OPD/Orang	67,500,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		70,500,000.00	BAPPELITBANG

	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		145,000,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	167,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	244,500,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	86,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		110,000,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				1 Laporan	81,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		134,500,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-			-	155,500,001.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	169,950,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				1 Dokumen	85,700,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		96,900,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				1 Dokumen	69,800,001.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		73,050,000.00	BAPPELITBANG
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-			-	1,378,907,099.00						-	1,812,276,500.00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-			-	344,867,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	480,656,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)				1 Dokumen	60,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		65,789,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														

			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	108,297,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		148,297,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				6 Laporan	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		180,000,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	76,570,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		86,570,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-			-	397,520,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	569,520,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	125,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		155,000,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	84,870,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		164,870,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	82,650,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		95,650,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														

			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	105,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		154,000,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-			-	636,520,099.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	762,100,500.00	BAPPELITBANG
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		173,000,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		110,000,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		110,000,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		110,000,000.00	BAPPELITBANG
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	78,404,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		94,040,500.00	BAPPELITBANG
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	85,040,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		87,060,000.00	BAPPELITBANG

	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	73,076,099.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		78,000,000.00	BAPPELITBANG
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						396,410,900.00							483,050,400.00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-			-	396,410,900.00						-	483,050,400.00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-			-	239,600,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	263,050,400.00	BAPPELITBANG
	5.05.02.2.01.0007	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa				1 Laporan	73,600,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		79,000,000.00	BAPPELITBANG
	5.05.02.2.01.0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa				1 Laporan	80,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		87,050,400.00	BAPPELITBANG
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	86,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		97,000,000.00	BAPPELITBANG
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-			-	78,405,450.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	110,000,000.00	BAPPELITBANG
	5.05.02.2.02.0008	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				1 Dokumen	78,405,450.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		110,000,000.00	BAPPELITBANG
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-			-	78,405,450.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	110,000,000.00	BAPPELITBANG
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	78,405,450.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Labuang	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		110,000,000.00	BAPPELITBANG
	J U M L A H							9,120,548,000.00							10,206,546,200.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BURU SELATAN TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						13,990,000,000.00							15,377,000,000.00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						13,990,000,000.00							15,377,000,000.00	
	5.02	KEUANGAN						13,990,000,000.00							15,377,000,000.00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	9,660,000,000.00						-	10,626,000,000.00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	320,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	352,000,000.00	BPKAD
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	110,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		121,000,000.00	BPKAD
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	110,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		121,000,000.00	BPKAD
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		110,000,000.00	BPKAD
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6,210,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	6,831,000,000.00	BPKAD
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan Orang/bulan	6,000,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		6,600,000,000.00	BPKAD
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		110,000,000.00	BPKAD
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	110,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		121,000,000.00	BPKAD

	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	415,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	456,500,000.00	BPKAD
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 tahun Orang	250,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		275,000,000.00	BPKAD
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1 paket Orang	165,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		181,500,000.00	BPKAD
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1,380,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	1,518,000,000.00	BPKAD
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 tahun Paket	25,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		27,500,000.00	BPKAD
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	120,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		132,000,000.00	BPKAD
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 tahun Paket	235,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		258,500,000.00	BPKAD
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 bulan Paket	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		110,000,000.00	BPKAD
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 bulan Dokumen	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		55,000,000.00	BPKAD
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	700,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		770,000,000.00	BPKAD
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	150,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		165,000,000.00	BPKAD
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	210,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	231,000,000.00	BPKAD
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 tahun Unit	150,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		165,000,000.00	BPKAD
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 tahun Unit	60,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		66,000,000.00	BPKAD
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	975,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	1,072,500,000.00	BPKAD
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 tahun Laporan	25,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		27,500,000.00	BPKAD
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 tahun Laporan	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		55,000,000.00	BPKAD
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 tahun Laporan	900,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		990,000,000.00	BPKAD
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	150,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	165,000,000.00	BPKAD
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 tahun Unit	150,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		165,000,000.00	BPKAD
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-			-	3,620,000,000.00						-	3,970,000,000.00	

	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	1,905,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	2,084,500,000.00	BPKAD
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	120,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		132,000,000.00	BPKAD
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		110,000,000.00	BPKAD
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	150,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		165,000,000.00	BPKAD
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	120,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		121,000,000.00	BPKAD
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														

			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	150,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		165,000,000.00	BPKAD
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	120,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		132,000,000.00	BPKAD
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				1 Dokumen	120,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		132,000,000.00	BPKAD
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				1 Dokumen	180,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		198,000,000.00	BPKAD
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	550,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		605,000,000.00	BPKAD
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 tahun Dokumen	135,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		148,500,000.00	BPKAD
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				60 Orang	160,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		176,000,000.00	BPKAD
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	675,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	741,500,000.00	BPKAD
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 tahun Dokumen	120,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		131,000,000.00	BPKAD
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				1 Dokumen	115,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		126,500,000.00	BPKAD
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 Dokumen	130,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		143,000,000.00	BPKAD
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				1 Laporan	110,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		121,000,000.00	BPKAD
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				1 Dokumen	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		110,000,000.00	BPKAD
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		110,000,000.00	BPKAD

	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	1,040,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	1,144,000,000.00	BPKAD
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1 Laporan	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		110,000,000.00	BPKAD
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				1 Dokumen	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		110,000,000.00	BPKAD
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1 Laporan	120,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		132,000,000.00	BPKAD
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	250,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		275,000,000.00	BPKAD
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														

			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				1 Dokumen	180,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		198,000,000.00	BPKAD
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	90,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		99,000,000.00	BPKAD
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	110,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		121,000,000.00	BPKAD
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	90,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		99,000,000.00	BPKAD
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	0.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	0.00	BPKAD
	5.02.02.2.04.0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi														

			Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi				1 Laporan	0.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BPKAD
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	0.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BPKAD
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	0.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BPKAD
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-			-	710,000,000.00						-	781,000,000.00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	710,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	781,000,000.00	BPKAD
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	120,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		132,000,000.00	BPKAD
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														

			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	120,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		132,000,000.00	BPKAD
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	110,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		121,000,000.00	BPKAD
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	130,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		143,000,000.00	BPKAD
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	110,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		121,000,000.00	BPKAD
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Orang	120,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		132,000,000.00	BPKAD
	J U M L A H							13,990,000,000.00								15,377,000,000.00

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BURU SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						3,833,801,000.00						0.00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						3,833,801,000.00							0.00	
	5.02	KEUANGAN						3,833,801,000.00							0.00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3,353,801,000.00						-	0.00	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2,054,281,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan Orang/bulan	2,054,281,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	57,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang Orang	57,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	345,920,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	43,578,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	16,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan Paket	50,342,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Bulan Dokumen	6,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan Laporan	230,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	40,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	40,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	742,600,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan Laporan	7,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan Laporan	46,800,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan Laporan	688,800,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	114,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	84,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30,000,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	480,000,000.00						-	0.00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	480,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Bulan Laporan	80,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				3 Unit	60,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Bulan Laporan	80,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														

			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				5 Obyek Pajak	70,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				12 Bulan Layanan	60,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Bulan Dokumen	130,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	J U M L A H							3,833,801,000.00							0.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. BURU SELATAN TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA						8,261,734,000.00						0.00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						7,897,971,000.00							0.00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						5,594,971,000.00							0.00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2,739,971,000.00						-	0.00	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1,849,014,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	0.00	BKPSDM
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	1,849,014,000.00	Kec. Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BKPSDM
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	95,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	0.00	BKPSDM
	5.03.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun														

			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				50 Orang	95,000,000.00	Semua Kota/Kab	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BKPSDM
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	225,963,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	0.00	BKPSDM
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	105,003,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BKPSDM
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	120,960,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BKPSDM
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	485,994,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	0.00	BKPSDM
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	17,250,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BKPSDM
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	108,372,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BKPSDM
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	360,372,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BKPSDM
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	84,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	0.00	BKPSDM
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	84,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BKPSDM
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-			-	2,855,000,000.00						-	0.00	

	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-			-	950,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	0.00	BKPSDM
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				0 Laporan	750,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BKPSDM
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	200,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BKPSDM
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-	-			-	655,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	0.00	BKPSDM
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				0 Dokumen	150,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BKPSDM
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				0 Dokumen	505,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BKPSDM
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-	-			-	1,250,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	0.00	BKPSDM
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				0 Orang	1,250,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BKPSDM
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						2,303,000,000.00							0.00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-			-	2,303,000,000.00						-	0.00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-			-	1,150,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	0.00	BKPSDM
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				0 Orang	1,150,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BKPSDM

	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-			-	1,153,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	0.00	BKPSDM
	5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional														
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun				0 Dokumen	1,153,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BKPSDM
	X	NON URUSAN						363,763,000.00							0.00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						363,763,000.00							0.00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	363,763,000.00						-	0.00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	363,763,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	0.00	BKPSDM
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	363,763,000.00	Kab. Buru Selatan,	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BKPSDM
	J U M L A H							8,261,734,000.00							0.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) INSPEKTORAT DAERAH KAB. BURU SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT DAERAH						5,200,000,000.00							0.00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						5,200,000,000.00							0.00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						5,200,000,000.00							0.00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3,184,539,000.00						-	0.00	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2,153,329,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	2,149,129,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4,200,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	167,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	167,000,000.00	Kabupaten Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	454,218,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	75,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	115,200,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8,018,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	6,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	250,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	108,500,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	15,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				28 Unit	93,500,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	300,900,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	7,500,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	43,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	84,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	166,400,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	592,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	592,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	-			-	1,510,461,000.00						-	0.00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-			-	1,310,461,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				15 Laporan	150,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				45 Laporan	325,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				20 Laporan	150,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	35,461,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				81 Laporan	275,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														

			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				12 Kesepakatan	100,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				45 Dokumen	275,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-			-	200,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				45 Laporan	75,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				45 Laporan	125,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-			-	505,000,000.00						-	0.00	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-	-			-	505,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				45 perangkat daerah	75,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				45 perangkat daerah	55,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														

			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				3 Kegiatan	350,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				45 perangkat daerah	25,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	INSPEKTORAT DAERAH
	J U M L A H							5,200,000,000.00							0.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN NAMROLE KAB. BURU SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN NAMROLE						1,439,500,000.00							1,439,500,000.00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1,439,500,000.00							1,439,500,000.00	
	7.01	KECAMATAN						1,439,500,000.00							1,439,500,000.00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1,439,500,000.00						-	1,439,500,000.00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	14,500,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	14,500,000.00	KECAMATAN NAMROLE
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		4,000,000.00	KECAMATAN NAMROLE
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3,500,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		3,500,000.00	KECAMATAN NAMROLE
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3,500,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		3,500,000.00	KECAMATAN NAMROLE
	7.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				1 Dokumen	3,500,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		3,500,000.00	KECAMATAN NAMROLE
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1,305,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	1,305,000,000.00	KECAMATAN NAMROLE
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	1,300,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		1,300,000,000.00	KECAMATAN NAMROLE
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		5,000,000.00	KECAMATAN NAMROLE
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	50,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	50,000,000.00	KECAMATAN NAMROLE
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	50,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		50,000,000.00	KECAMATAN NAMROLE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	25,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	25,000,000.00	KECAMATAN NAMROLE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		25,000,000.00	KECAMATAN NAMROLE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	45,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	45,000,000.00	KECAMATAN NAMROLE
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	45,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Namrole, Elfule	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		45,000,000.00	KECAMATAN NAMROLE
	J U M L A H							1,439,500,000.00							1,439,500,000.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN LEKSULA KAB. BURU SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN LEKSULA						3,573,918,000.00							3,577,418,000.00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3,573,918,000.00							3,577,418,000.00	
	7.01	KECAMATAN						3,573,918,000.00							3,577,418,000.00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3,473,418,000.00						-	3,473,418,000.00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2,489,068,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	2,489,068,000.00	KECAMATAN LEKSULA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	2,489,068,000.00	Kab. Buru Selatan, Leksula, Leksula	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		2,489,068,000.00	KECAMATAN LEKSULA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	409,550,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	409,550,000.00	KECAMATAN LEKSULA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bln Paket	27,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Leksula, Leksula	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		27,000,000.00	KECAMATAN LEKSULA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Bln Paket	125,550,000.00	Kab. Buru Selatan, Leksula, Leksula	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		125,550,000.00	KECAMATAN LEKSULA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Leksula, Leksula	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		7,000,000.00	KECAMATAN LEKSULA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19 Desa Laporan	250,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Leksula, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		250,000,000.00	KECAMATAN LEKSULA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	479,800,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	479,800,000.00	KECAMATAN LEKSULA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	12,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Leksula, Leksula	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		12,000,000.00	KECAMATAN LEKSULA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	7,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Leksula, Leksula	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		7,000,000.00	KECAMATAN LEKSULA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				61/OB Laporan	460,800,000.00	Kab. Buru Selatan, Leksula, Leksula	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		460,800,000.00	KECAMATAN LEKSULA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	95,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	95,000,000.00	KECAMATAN LEKSULA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	72,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Leksula, Leksula	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		72,000,000.00	KECAMATAN LEKSULA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				4 Unit	23,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Leksula, Leksula	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		23,000,000.00	KECAMATAN LEKSULA
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	46,500,000.00						-	47,500,000.00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	22,500,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	22,500,000.00	KECAMATAN LEKSULA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				19 Desa Laporan	22,500,000.00	Kab. Buru Selatan, Leksula, Leksula	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		22,500,000.00	KECAMATAN LEKSULA

	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	24,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	25,000,000.00	KECAMATAN LEKSULA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Desa Laporan	24,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Leksula, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		25,000,000.00	KECAMATAN LEKSULA
3.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	54,000,000.00						-	56,500,000.00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	54,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	56,500,000.00	KECAMATAN LEKSULA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				19 Desa Dokumen	24,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Leksula, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		24,500,000.00	KECAMATAN LEKSULA
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				19 Desa Dokumen	30,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Leksula, Leksula	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		32,000,000.00	KECAMATAN LEKSULA
	J U M L A H							3,573,918,000.00							3,577,418,000.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN WAESAMA KAB. BURU SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN WAESAMA						2,156,907,000.00							2,382,339,975.00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2,156,907,000.00							2,382,339,975.00	
	7.01	KECAMATAN						2,156,907,000.00							2,382,339,975.00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2,074,157,000.00						-	2,295,452,475.00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9,904,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	10,349,325.00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2,905,000.00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		3,110,625.00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	3,843,000.00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		3,924,900.00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	3,156,000.00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		3,313,800.00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1,352,246,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	1,419,858,300.00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	1,348,667,000.00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		1,416,100,350.00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3,579,000.00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		3,757,950.00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	287,967,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	420,365,350.00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,419,000.00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		2,539,950.00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	30,180,000.00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		31,689,000.00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	41,152,000.00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		43,209,600.00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	13,250,000.00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		131,912,500.00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	200,966,000.00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		211,014,300.00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	26,690,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	28,024,500.00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	21,690,000.00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		22,774,500.00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		5,250,000.00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	314,850,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	330,230,000.00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,250,000.00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		5,500,000.00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	12,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		12,250,000.00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				37 Laporan	297,600,000.00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		312,480,000.00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	82,500,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	86,625,000.00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	75,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		78,750,000.00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7,500,000.00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		7,875,000.00	KECAMATAN WAESAMA
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	12,000,000.00						-	12,600,000.00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	12,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	12,600,000.00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				12 Dokumen	12,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		12,600,000.00	KECAMATAN WAESAMA
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	28,476,000.00						-	29,899,800.00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	28,476,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	29,899,800.00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				3 Laporan	28,476,000.00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		29,899,800.00	KECAMATAN WAESAMA
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	29,558,000.00						-	31,035,900.00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	29,558,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	31,035,900.00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>				36 Orang	11,428,000.00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		11,999,400.00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i>				25 Orang	10,492,000.00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		11,016,600.00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>				20 Dokumen	7,638,000.00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		8,019,900.00	KECAMATAN WAESAMA
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	12,716,000.00						-	13,351,800.00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	12,716,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	13,351,800.00	KECAMATAN WAESAMA
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>				36 Dokumen	12,716,000.00	Kab. Buru Selatan, Waesama, Wamsisi	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		13,351,800.00	KECAMATAN WAESAMA
	J U M L A H							2,156,907,000.00							2,382,339,975.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN KEPALA MADAN KAB. BURU SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN KEPALA MADAN						2,224,865,000.00						0.00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2,190,298,000.00							0.00	
	7.01	KECAMATAN						2,190,298,000.00							0.00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2,110,298,000.00						-	0.00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1,353,851,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	0.00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	1,339,385,000.00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	14,466,000.00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	11,750,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	0.00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	11,750,000.00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	20,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	0.00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	20,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	236,212,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	0.00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	33,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6,212,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	180,000,000.00	Kec. Kepala Madan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	47,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	0.00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	47,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	337,850,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	0.00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,250,000.00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	4,400,000.00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	331,200,000.00	Kec. Kepala Madan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	103,635,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	0.00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paiknya				2 Unit	103,635,000.00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	KECAMATAN KEPALA MADAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	10,000,000.00						-	0.00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	10,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	0.00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	10,000,000.00	Kec. Kepala Madan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	KECAMATAN KEPALA MADAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	20,000,000.00						-	0.00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	20,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	0.00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	20,000,000.00	Kec. Kepala Madan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	KECAMATAN KEPALA MADAN
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	50,000,000.00						-	0.00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	50,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	0.00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				16 Dokumen	20,000,000.00	Kec. Kepala Madan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	30,000,000.00	Kec. Kepala Madan	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	X	NON URUSAN						34,567,000.00							0.00	

	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						34,567,000.00							0.00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	34,567,000.00						-	0.00	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	34,567,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	0.00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	34,567,000.00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Biloro	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0.00	KECAMATAN KEPALA MADAN
	J U M L A H							2,224,865,000.00							0.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN AMBALAU KAB. BURU SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN AMBALAU						1,528,975,000.00								
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1,528,975,000.00							1,820,829,000.00	
	7.01	KECAMATAN						1,528,975,000.00							1,820,829,000.00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1,435,937,500.00							1,700,829,000.00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik			15,000,000.00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik			5,000,000.00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	5,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik			10,000,000.00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	761,237,500.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik			931,129,000.00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	748,200,000.00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik			916,129,000.00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	13,037,500.00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik			15,000,000.00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	185,500,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik			235,500,000.00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik			15,000,000.00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik			10,000,000.00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10,500,000.00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik			10,500,000.00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	150,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik			200,000,000.00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	317,200,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik			317,200,000.00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik			10,000,000.00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				41 Laporan	307,200,000.00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik			307,200,000.00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	162,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik			202,000,000.00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	72,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik			72,000,000.00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	90,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik			130,000,000.00	KECAMATAN AMBALAU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	15,000,000.00							25,000,000.00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	15,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik			25,000,000.00	KECAMATAN AMBALAU

	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	15,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik			25,000,000.00	KECAMATAN AMBALAU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	10,000,000.00							15,000,000.00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	10,000,000.00			-	3) Peningkatan penguatan wawasan kebangsaan dan jati diri masyarakat serta pemantapan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, taat hukum dan harmonis			15,000,000.00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	10,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DAU	-	3) Peningkatan penguatan wawasan kebangsaan dan jati diri masyarakat serta pemantapan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, taat hukum dan harmonis			15,000,000.00	KECAMATAN AMBALAU
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	13,037,500.00							15,000,000.00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	13,037,500.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	14		15,000,000.00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				70 Orang	13,037,500.00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik			15,000,000.00	KECAMATAN AMBALAU
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	55,000,000.00							65,000,000.00	

	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	55,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik			65,000,000.00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				7 Dokumen	15,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik			15,000,000.00	KECAMATAN AMBALAU
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	40,000,000.00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik			50,000,000.00	KECAMATAN AMBALAU
	J U M L A H							1,528,975,000.00								

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN FENA FAFAN KAB. BURU SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN FENA FAFAN						1,682,583,000.00							1,697,615,000.00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1,682,583,000.00							1,697,615,000.00	
	7.01	KECAMATAN						1,682,583,000.00							1,697,615,000.00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1,572,615,000.00						-	1,574,615,000.00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	921,815,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	921,815,000.00	KECAMATAN FENA FAFAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	921,815,000.00	Kec. Fena Fafan, Waekatin	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		921,815,000.00	KECAMATAN FENA FAFAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	300,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	300,000,000.00	KECAMATAN FENA FAFAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket Paket	25,000,000.00	Kec. Fena Fafan, Waekatin	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		25,000,000.00	KECAMATAN FENA FAFAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				16 Org Paket	40,000,000.00	Kec. Fena Fafan, Waekatin	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		40,000,000.00	KECAMATAN FENA FAFAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bln Paket	5,000,000.00	Kec. Fena Fafan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		5,000,000.00	KECAMATAN FENA FAFAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bln Laporan	230,000,000.00	Kec. Fena Fafan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		230,000,000.00	KECAMATAN FENA FAFAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	262,800,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	262,800,000.00	KECAMATAN FENA FAFAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bln Laporan	6,000,000.00	Kec. Fena Fafan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		6,000,000.00	KECAMATAN FENA FAFAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				34 OB Laporan	256,800,000.00	Kec.Fena Fafan, Waekatin	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		256,800,000.00	KECAMATAN FENA FAFAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	88,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	90,000,000.00	KECAMATAN FENA FAFAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paiaknya				1 Paket Unit	72,000,000.00	Kec.Fena Fafan, Waekatin	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		72,000,000.00	KECAMATAN FENA FAFAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Paket Unit	16,000,000.00	Kec.Fena Fafan, Waekatin	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		18,000,000.00	KECAMATAN FENA FAFAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	61,000,000.00						-	65,000,000.00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	23,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	25,000,000.00	KECAMATAN FENA FAFAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Desa Laporan	23,000,000.00	Kec.Fena Fafan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		25,000,000.00	KECAMATAN FENA FAFAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	38,000,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	40,000,000.00	KECAMATAN FENA FAFAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Desa Laporan	38,000,000.00	Kec.Fena Fafan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		40,000,000.00	KECAMATAN FENA FAFAN
3.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	48,968,000.00						-	58,000,000.00	

	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	48,968,000.00			-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	58,000,000.00	KECAMATAN FENA FAFAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Desa Dokumen	18,000,000.00	Kec.Fena Fafan, Semua Kel/Desa	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		25,000,000.00	KECAMATAN FENA FAFAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				12 Desa Dokumen	30,968,000.00	Kec. Fena Fafan, Waekatin	DAU	-	4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	-		33,000,000.00	KECAMATAN FENA FAFAN
	J U M L A H							1,682,583,000.00							1,697,615,000.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BURU SELATAN TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						40,733,681,200.00							489,430,000.00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						40,733,681,200.00							489,430,000.00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						40,733,681,200.00							489,430,000.00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2,466,492,000.00						-	299,430,000.00	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1,642,160,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	15,898,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	1,626,262,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15,898,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		15,898,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	55,960,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	55,960,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	55,960,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		55,960,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	316,572,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	128,572,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	25,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		25,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				22 Paket	95,040,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		95,040,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8,532,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		8,532,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	12,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18 Laporan	170,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	34,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	34,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	34,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		34,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	417,800,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	65,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		5,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	45,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		45,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	15,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		15,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	352,800,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-			-	800,000,000.00						-	0.00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	undefined	-			undefined undefined	800,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	Siswa dan Siswi SMU/SMK	-	0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														
			Jumlah Paskibraka				100 Orang	800,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	Siswa dan Siswi SMU/SMK		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-			-	179,850,000.00						-	0.00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-			-	179,850,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				13 Dokumen	65,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				0 Orang	114,850,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-			-	37,000,000.00						-	0.00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-			-	37,000,000.00				1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	37,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualiatas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-			-	36,803,339,200.00						-	0.00	

	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-			-	36,803,339,200.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				4 Dokumen	36,803,339,200.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-			-	447,000,000.00						-	190,000,000.00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-			-	447,000,000.00			-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-	-	190,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	126,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				25 Orang	131,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		0.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			-				-	190,000,000.00	Kab. Buru Selatan	DAU	-	1) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, dan kualitas demokrasi, percepatan pembangunan sumber daya manusia	-		190,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	JUMLAH							40,733,681,200.00							489,430,000.00	